

INDEKS KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

PENGARAH

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Rahmat Bagja
Fritz Edward Siregar

PEMBINA

Gunawan Suswantoro

PENANGGUNG JAWAB

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

KETUA TIM

Ilham Yamin

WAKIL KETUA

Djoni Irfandi
R. Alief Sudewo
Eko Agus Wibisono

PENELITI

Masykurudin Hafidz (Koordinator)
Ahsanul Minan
Yohan Wahyu
Toto Sugiarto
Engelbert Johannes Rohi
Yusfitriadi
Sunanto
Veri Junaidi
Erik Kurniawan
Sri Budi Eko Wardani
Nugroho Noto Susanto
Muhammad Zaid
Mohamad Ihsan
Deytri Aritonang

ASISTEN PENELITI

Adriansyah Pasga Dagama
Ira Sasmita
M. Qodri Imaduddin
Andika Asykar
Chandra Maulana Akbar
Anjar Arifin
Mouliza K. D. Sweinstani
Rury Uswatun Hasanah
Taufiequrrohman
Rafael Maleakhi

DISAIN & TATA LETAK

Shofie Ahmadi

SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya sehingga Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. IKP 2018 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah.

IKP Pilkada 2018 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Dalam studi IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Pada tahun 2018 terdapat 171 daerah yang menggelar pilkada, yang terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Bawaslu menyusun IKP Pilkada di 171 daerah tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Ketiga aspek tersebut adalah penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Dari tiga aspek tersebut, IKP dirumuskan ke dalam 10 variabel dan 30 indikator untuk mengukur indeks agar lebih mudah diidentifikasi. Hasil pengukuran dari masing-masing aspek, variabel, dan indikator di 171 daerah tersebut dijadikan pijakan oleh Bawaslu menyusun IKP Pilkada 2018.

Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP Pilkada 2018, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih sederhana dan semakin fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya, serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan pilkada dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP Pilkada 2018.

IKP Pilkada 2018 dirilis lebih awal dibandingkan IKP Pilkada 2017. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada. Melalui serangkaian tahapan,

“Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan
Keadilan Pemilu”

Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat pemilu dalam proses penyempurnaan IKP tersebut. Sementara dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada di tahun 2018.

Untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pilkada 2018 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada 2018. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP Pilkada 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan pemilihan kepala daerah yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah berperan aktif melakukan penyusunan IKP Pilkada 2018. Besar harapan kami agar IKP Pilkada 2018 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

ABHAN

Ketua

PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, memerlukan pemetaan dan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk itu Bawaslu melakukan serangkaian kajian dan analisis secara deret waktu (*time series*) untuk memenuhi kebutuhan publik dan para *stakeholder* akan informasi yang dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu. Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kepemiluan yang bisa diandalkan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan komitmen Bawaslu untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai pusat pengkajian dan analisis kepemiluan di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kepemiluan. Melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan di setiap wilayah yang hendak melangsungkan pilkada. Harapannya, segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir, dan dicegah. Pendekteksian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu atau pilkada. Tentu hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah.

Penyusunan IKP mendasarkan pada tiga dimensi yaitu kontestasi, partisipasi dan penyelenggaraan. Dimensi kontestasi mencakup subyek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu. Dalam dimensi kontestasi dilihat seberapa adil dan setara proses kompetisi berlangsung di antara para kontestan. Sementara dimensi partisipasi menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih. Dimensi ini melihat

bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan memengaruhi proses pemilihan umum.

Adapun dimensi penyelenggaraan adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dimensi ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Dengan mengacu kepada IKP ini, Bawaslu menjalankan tugas pencegahan dalam pengawasan pemilu dengan pemetaan yang lebih komprehensif terkait dengan potensi pelanggaran dan kerawanan penyelenggaraan pemilu. IKP juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pemilu, seperti kementerian dan lembaga negara, institusi akademik, masyarakat sipil, media, serta publik secara luas dalam menyediakan sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan, terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SAMBUTAN | iii |
| PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| BAB 1 | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu | 3 |
| 1.3 Definisi dan Operasionalisasi Konsep..... | 4 |
| 1.4 Tahapan Penyusunan IKP Pilkada 2018 | 9 |
| 1.5 Data dan Metode | 10 |
| 1.6 Metode Pengukuran dan Analisis Data..... | 16 |
| BAB 2 | |
| GAMBARAN IKP PILKADA 2018 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | 13 |
| 2.1 IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi..... | 13 |
| 2.2 IKP Pilkada 2018 Tingkat Kabupaten/Kota | 15 |
| 2.2.1. Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tinggi..... | 18 |
| 2.2.2. Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Sedang | 20 |
| 2.2.3. Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah..... | 23 |
| 2.2.4. Kabupaten/Kota dengan Situasi Khusus | 27 |
| 2.3 IKP Pilkada 2018 di Tingkat Provinsi Berbasis Dimensi | 29 |
| 2.3.1. Dimensi Penyelenggaraan | 31 |
| 2.3.2. Dimensi Kontestasi..... | 31 |
| 2.3.3. Dimensi Partisipasi | 31 |
| 2.4 IKP Pilkada 2018 di Tingkat Kabupaten/Kota Berbasis Dimensi..... | 31 |
| 2.4.1. Dimensi Penyelenggaraan..... | 33 |
| 2.4.2. Dimensi Kontestasi..... | 33 |
| 2.4.3. Dimensi Partisipasi | 34 |

BAB 3

| | |
|--|-----|
| IKP PILKADA 2018 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | 41 |
| 3.1 Provinsi Aceh | 41 |
| 3.2 Provinsi Sumatera Utara..... | 43 |
| 3.3 Provinsi Sumatera Barat..... | 45 |
| 3.4 Provinsi Riau..... | 46 |
| 3.5 Provinsi Jambi | 49 |
| 3.6 Provinsi Sumatera Selatan..... | 50 |
| 3.7 Provinsi Bengkulu | 53 |
| 3.8 Provinsi Lampung | 54 |
| 3.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 56 |
| 3.10 Provinsi Kepulauan Riau..... | 57 |
| 3.11 Provinsi Jawa Barat..... | 59 |
| 3.12 Provinsi Jawa Tengah | 60 |
| 3.13 Provinsi Jawa Timur | 64 |
| 3.14 Provinsi Banten..... | 67 |
| 3.15 Provinsi Bali..... | 68 |
| 3.16 Provinsi Nusa Tenggara Barat | 69 |
| 3.17 Provinsi Nusa Tenggara Timur | 71 |
| 3.18 Provinsi Kalimantan Barat..... | 76 |
| 3.19 Provinsi Kalimantan Tengah..... | 79 |
| 3.20 Provinsi Kalimantan Timur..... | 84 |
| 3.21 Provinsi Kalimantan Selatan..... | 84 |
| 3.22 Provinsi Kalimantan Utara | 88 |
| 3.23 Provinsi Sulawesi Utara..... | 89 |
| 3.24 Provinsi Sulawesi Tengah | 92 |
| 3.25 Provinsi Sulawesi Selatan..... | 94 |
| 3.26 Provinsi Sulawesi Tenggara..... | 96 |
| 3.27 Provinsi Gorontalo | 99 |
| 3.28 Provinsi Sulawesi Barat..... | 101 |
| 3.29 Provinsi Maluku | 103 |
| 3.30 Provinsi Maluku Utara..... | 104 |
| 3.31 Provinsi Papua..... | 106 |

BAB 4

| | |
|--|-----|
| ASPEK KERAWANAN DALAM IKP PILKADA 2018 | 115 |
| 4.1 Aspek Kerawanan Tinggi..... | 115 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 4.1.1. | Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara | 113 |
| 4.1.2. | Kontestasi | 114 |
| 4.1.3. | Partisipasi..... | 115 |
| 4.1.4. | Netralitas Aparatur Sipil Negara | 115 |
| 4.1.5. | Politik Uang..... | 116 |
| 4.2 | Aspek Lain Potensial Sumber Kerawanan..... | 116 |
| 4.2.1. | Keamanan | 116 |
| 4.2.2. | Politik Identitas..... | 120 |
| 4.2.3. | Media Sosial | 123 |
| | | |
| BAB 5 | | |
| | PENCEGAHAN KERAWANAN DALAM IKP PILKADA 2018 | 125 |
| 5.1 | Tindak Lanjut | 125 |
| 5.2 | Rekomendasi | 127 |
| | | |
| | DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 131 |
| | LAMPIRAN..... | 132 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Pembobotan Dimensi, Variabel, dan Indikator | 7 |
| Tabel 1.2 | Kategori Skor IKP..... | 12 |
| Tabel 2.1 | IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi..... | 14 |
| Tabel 2.2 | IKP Pilkada 2018 Tingkat Kabupaten/Kota | 16 |
| Tabel 2.3 | IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tertinggi..... | 19 |
| Tabel 2.4 | IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Sedang | 21 |
| Tabel 2.5 | IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah | 24 |
| Tabel 2.6 | Daerah Potensi Bencana Alam | 28 |
| Tabel 2.7 | IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi Kerawanan Tertinggi Berbasis Dimensi..... | 30 |
| Tabel 2.8 | IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi Berbasis Dimensi.... | 32 |
| Tabel 2.9 | IKP 2018 IKP Pilkada 2018 Tingkat Kabupaten/Kota Berbasis Dimensi..... | 35 |
| Tabel 3.1 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Aceh | 41 |
| Tabel 3.2 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sumatera Utara | 42 |
| Tabel 3.3 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sumatera Barat | 33 |
| Tabel 3.4 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Riau..... | 46 |
| Tabel 3.5 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Jambi | 49 |
| Tabel 3.6 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sumatera Selatan | 51 |
| Tabel 3.7 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Bengkulu..... | 53 |
| Tabel 3.8 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Lampung | 54 |
| Tabel 3.9 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Bangka Belitung | 56 |
| Tabel 3.10 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Kepulauan Riau | 58 |
| Tabel 3.11 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Jawa Barat | 59 |
| Tabel 3.12 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Jawa Tengah..... | 61 |
| Tabel 3.13 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Jawa Timur..... | 64 |
| Tabel 3.14 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Banten | 67 |
| Tabel 3.15 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Bali | 68 |
| Tabel 3.16 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat..... | 69 |
| Tabel 3.17 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur..... | 71 |
| Tabel 3.18 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Barat..... | 77 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 3.19 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Tengah | 79 |
| Tabel 3.20 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Timur | 84 |
| Tabel 3.21 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Selatan..... | 85 |
| Tabel 3.22 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Utara..... | 88 |
| Tabel 3.23 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Utara | 89 |
| Tabel 3.24 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Tengah | 92 |
| Tabel 3.25 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Selatan | 95 |
| Tabel 3.26 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara | 97 |
| Tabel 3.27 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Gorontalo | 100 |
| Tabel 3.28 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Barat | 102 |
| Tabel 3.29 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Maluku | 103 |
| Tabel 3.30 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Maluku Utara | 105 |
| Tabel 3.31 | IKP Pilkada 2018 Provinsi Papua | 107 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 1.1 | Pembobotan Dimensi IKP Pilkada 2018 | 7 |
| Gambar 1.2 | Tahapan Riset IKP Pilkada 2018..... | 9 |
| Gambar 4.1. | Jumlah Daerah Berdasar Tingkat Kerawanan di Aspek Keamanan | 117 |
| Gambar 4.2. | Jumlah Daerah Berdasar Tingkat Kerawanan di Aspek Politik Identitas | 122 |
| Gambar 4.3 | Jumlah Daerah Berdasar Tingkat Kerawanan di Aspek Penggunaan Media Sosial..... | 124 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------------|---|
| AHP | <i>Analytical Hierarchy Process</i> |
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| ASN | Aparatur Sipil Negara |
| Bawaslu RI | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia |
| CSO | <i>Civil Society Organization</i> |
| DAK2 | Data Agregat Kependudukan per Kecamatan |
| DKI Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| DKPP | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu |
| DPD RI | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia |
| DPP | Dewan Pimpinan Pusat |
| DPR RI | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPS | Daftar Pemilih Sementara |
| DPT | Daftar Pemilih Tetap |
| DPTb | Daftar Pemilih Tambahan |
| e-KTP | Kartu Tanda Penduduk Elektronik |
| Gakkumdu | Penegakan hukum terpadu |
| IKP | Indeks Kerawanan Pemilu |
| KBBI | Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| Kemendagri | Kementerian Dalam Negeri |
| Kemenkopolhukam | Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan |
| KPU RI | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Medsos | Media Sosial |
| MK | Mahkamah Konstitusi |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| NGO | <i>Non-governmental organization</i> |
| NPHD | Naskah Perjanjian Hibah Daerah |
| Ormas | Organisasi kemasyarakatan |
| Panwascam | Panitia Pengawas Kecamatan |
| Panwaslih | Panita Pengawas Pemilihan |
| Panwaslu | Panitia Pengawas Pemilihan Umum |
| Parpol | Partai politik |
| Pemilu | Pemilihan Umum |
| Pileg | Pemilihan umum legislatif |
| Pilkada | Pemilihan kepala daerah |
| Pilpres | Pemilihan umum presiden |
| Pilwakot | Pemilihan Wali Kota |
| PNS | Pegawai Negeri Sipil |
| Polri | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| PPK | Panitia Pemilihan Kecamatan |
| PPL | Pengawas Pemilu Lapangan |
| PPS | Panitia Pemungutan Suara |
| PTUN | Pengadilan Tata Usaha Negara |
| SARA | Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan |
| SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SLTA | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| SP3 | Surat Penghentian Penyidikan Perkara |
| TNI | Tentara Nasional Indonesia |
| TPS | Tempat Pemungutan Suara |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan IKP telah dimulai Bawaslu sejak tahun 2014 menjelang penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyusunan IKP ini dilaksanakan kembali pada tahun 2015 dan 2016 dengan sasaran penyelenggaraan pilkada serentak pertama pada Desember 2015 dan pilkada serentak kedua pada Februari 2017. (Lihat IKP Pileg 2014, IKP Pilpres 2014, IKP Pilkada 2015, dan IKP Pilkada 2017)

Dalam penyusunan IKP Pilkada 2015, Bawaslu memfokuskan kepada lima aspek penilaian yang meliputi: a) profesionalitas penyelenggara pemilu; b) politik uang; c) akses pengawasan; d) partisipasi masyarakat; dan e) keamanan daerah. Kelima aspek ini diterjemahkan ke dalam 16 variabel dan 30 indikator. Pada tahapan analisis dan penilaian data, aspek profesionalitas diberi bobot paling tinggi, yakni 30, dan diikuti dengan politik uang 20, akses pengawasan 15, partisipasi masyarakat 20, dan keamanan daerah 15. (Bawaslu, 2015)

Dari kelima aspek tersebut terlihat bahwa IKP Pilkada 2015 lebih memfokuskan penelitiannya kepada masalah profesionalitas penyelenggara pemilu. Hal ini menyebabkan beberapa praktik dalam proses kontestasi (persaingan) antar peserta pemilu menjadi kurang terpotret dengan baik. Padahal dalam konteks ini banyak muncul potensi kerawanan, seperti pada aspek pencalonan, dan mobilisasi birokrasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Bawaslu melakukan perbaikan penyusunan IKP Pilkada 2017 yang diperuntukkan untuk

persiapan penyelenggaraan pilkada serentak gelombang kedua yang diselenggarakan pada Februari 2017 (Bawaslu, 2016). Perubahan terutama dilakukan pada fokus penelitian yang lebih diarahkan untuk memotret dimensi kontestasi dan partisipasi. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada kategorisasi yang diperkenalkan oleh Robert Dahl (1982). Dahl memaknai demokrasi sebagai tatanan politik yang dapat diukur dengan dua dimensi, yaitu: (1) tingkat kompetisi dan oposisi yang dimungkinkan dalam tatanan politik; dan (2) tingkat partisipasi politik dari warga negara.

Kedua dimensi, kontestasi dan partisipasi, dilengkapi dengan dimensi penyelenggaraan pemilu untuk memotret profesionalitas penyelenggara dalam mengelut pemilu sehingga IKP memiliki tiga dimensi yang menjadi landasan pengukuran indeks. Ketiga dimensi ini diterjemahkan menjadi 10 variabel dan 31 indikator dengan memberi bobot masing-masing dimensi. Dimensi kontestasi diberi bobot 35%, partisipasi 35%, dan penyelenggaraan diberi bobot 30%. Pemberian bobot ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan penilaian ahli atau *expert judgment* dari tim peneliti.

Selain perubahan fokus penelitian, Bawaslu juga menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menganalisis dan memberikan pembobotan atas data yang didapatkan. AHP adalah sebuah metode yang dikenalkan oleh Saaty (1980) untuk membantu menganalisis berbagai data yang rumit untuk membantu membuat keputusan/penilaian dan menyusun seperangkat prioritas. Metode ini bekerja dengan cara membandingkan secara berpasangan (*pairwise comparison*) setiap wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) satu persatu untuk tiap indikator. Prinsip kerja penentuan skor akhir melalui metode AHP seperti layaknya kompetisi yang mempertemukan *head to head* setiap wilayah yang melangsungkan pilkada tahun 2018 untuk menghasilkan klasemen peringkat.

Perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyusunan IKP Pilkada 2017 mampu menghasilkan potret proyeksi kerawanan penyelenggaraan pilkada yang lebih baik. Publik dan para pemangku kepentingan pemilu seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, media massa, dan masyarakat sipil sangat antusias karena IKP ini dinilai mampu menyediakan informasi, analisis data, serta rekomendasi yang konkret.

Oleh karena itu, dalam penyusunan IKP Pilkada 2018 ini Bawaslu mempertahankan penggunaan tiga dimensi, yakni dimensi kontestasi, dimensi partisipasi, dan dimensi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga mempertahankan variabel dan indikator, komposisi pembobotan, serta penggunaan metode AHP dalam menentukan bobot dimensi. Untuk memperoleh produk IKP yang lebih baik, Bawaslu membuat beberapa perubahan yang didasari oleh kebutuhan untuk menghasilkan potret tingkat kerawanan pemilu yang lebih tepat, faktual, dan aktual.

Untuk itu, sejumlah hal dipertahankan dan hal lain ada yang dihilangkan. Misalnya, jumlah variabel tetap dipertahankan, namun jumlah indikator berkurang satu dari 31 indikator pada IKP Pilkada 2017 menjadi 30 indikator pada IKP Pilkada 2018. Di samping itu, dalam IKP Pilkada 2018 ini dilakukan sejumlah perubahan, baik dalam bentuk penghapusan sejumlah indikator yang dinilai kurang relevan seperti angka kemiskinan dan kondisi budaya patriarki, maupun pengelompokan ulang atas beberapa indikator, serta perubahan pertanyaan penelitian untuk mempermudah proses penggalian data dengan berorientasi pada penyajian data sekunder.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu

Penyusunan IKP Pilkada 2018 ini bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu sebagai bahan menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilu dan sekaligus diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pilkada 2018 untuk menyiapkan langkah antisipasi atas potensi kerawanan Pilkada 2018.

IKP Pilkada 2018 ini diharapkan dapat menjadi:

1. Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis.
2. Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu.
3. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

1.3 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

Pemilu merupakan salah satu komponen dan indikator demokrasi. Nils-Christian Bormann dan Matt Golder (2013) dengan mengutip pendapat Przeworski menyatakan bahwa sebuah rezim pemerintahan dikategorikan sebagai rezim demokratis jika kepala pemerintahan (eksekutif) dan anggota legislatif dipilih, dan terdapat lebih dari satu partai yang berkompetisi dalam pemilu, serta terdapat pergantian terhadap peraturan-peraturan pemilu yang identik. Rezim yang tidak menerapkan empat indikator tersebut dikategorikan sebagai rezim yang tidak demokratis.

Dengan demikian, pemilu merupakan instrumen demokrasi yang utama untuk mengekspresikan kehendak rakyat tentang pemerintahan. Emilia Drumeva (2004) mengatakan bahwa pemilu tidak hanya menjadi perwujudan dari sistem demokrasi langsung, tetapi juga menjadi jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang representatif (*representative government*).

Sebagai sebuah instrumen demokrasi, penyelenggaraan pemilu perlu memenuhi beberapa parameter untuk memastikan perhelatan kontestasi politik tersebut berjalan adil. Secara internasional, terdapat 15 indikator standar penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni: (International IDEA, 2002)

1. Tersedianya kerangka hukum. Kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis;
2. Pemilihan sistem pemilu. Di dalam sistem pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu;
3. Penetapan daerah pemilihan, di mana daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif;
4. Hak untuk memilih dan dipilih. Semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi;
5. Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen. Hal ini merupakan persoalan penting karena mesin-mesin pelaksana pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, badan

tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu;

6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang;
7. Kesetaraan akses bagi partai politik dan kandidat. Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda;
8. Kampanye pemilu yang demokratis. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan;
9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi. Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Kerangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara;
10. Pembiayaan dan pengeluaran. semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
11. Pemungutan suara. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara;
12. Penghitungan dan rekapitulasi suara. Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka;
13. Peranan wakil partai dan kandidat. Untuk melindungi integritas

dan keterbukaan pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara dan penghitungan suara;

14. Pemantauan pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu;
15. Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu. Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu.

Standar penyelenggaraan pemilu demokratis di atas menjadi pijakan untuk mengukur seberapa demokratis sebuah pemilu digelar. Tentunya hal ini tidak lepas dari dua dimensi demokrasi yang selama ini mewarnai proses politik. Dua dimensi itulah yang diperkenalkan oleh Robert Dahl (1982), yakni kontestasi dan partisipasi. Kontestasi menyangkut subyek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu. Dimensi kontestasi melihat seberapa adil dan setara proses kompetisi berlangsung di antara para kontestan. Sementara dimensi partisipasi menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak. Dimensi ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan untuk mengawasi dan memengaruhi proses pemilihan umum.

Selain dua dimensi yang menjadi dasar dalam pemilihan umum yang demokratis tersebut, juga terdapat satu hal yang berpengaruh dalam literasi kontemporer manajemen pelaksanaan pemilu, yakni faktor penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh subyek penyelenggara pemilu. Hal ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan demokratis.

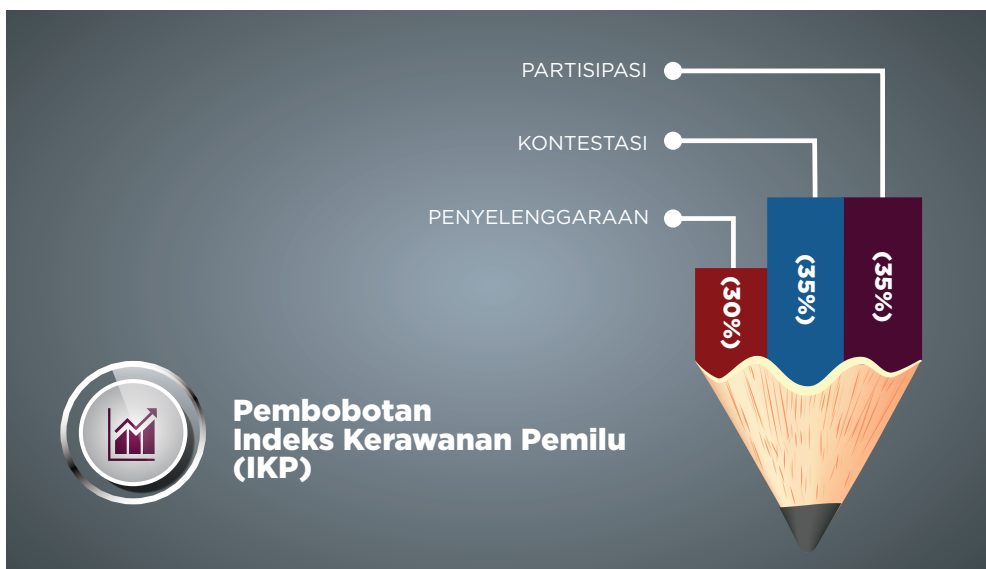
Sebagai sebuah ajang kompetisi dan sekaligus kontestasi dalam rangka memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala daerah secara intrinsik mengandung kerawanan yang tinggi. Hal ini wajar mengingat jabatan yang diperebutkan merupakan jabatan sangat strategis. Tidak hanya untuk diperebutkan oleh partai politik maupun calon perseorangan, namun juga sangat berdekatan dengan kepentingan rakyat pemilih. Pengaturan sistem dan kerangka hukum pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya kompetisi yang sehat dan jauh dari kekerasan (transisi politik secara

damai). Kerawanan ini tidak hanya dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu, namun juga dapat memicu perubahan proses penyelenggaraan menjadi penuh konflik kekerasan. Oleh karenanya kerawanan ini perlu diwaspadai oleh para pemangku kepentingan dalam pemilu.

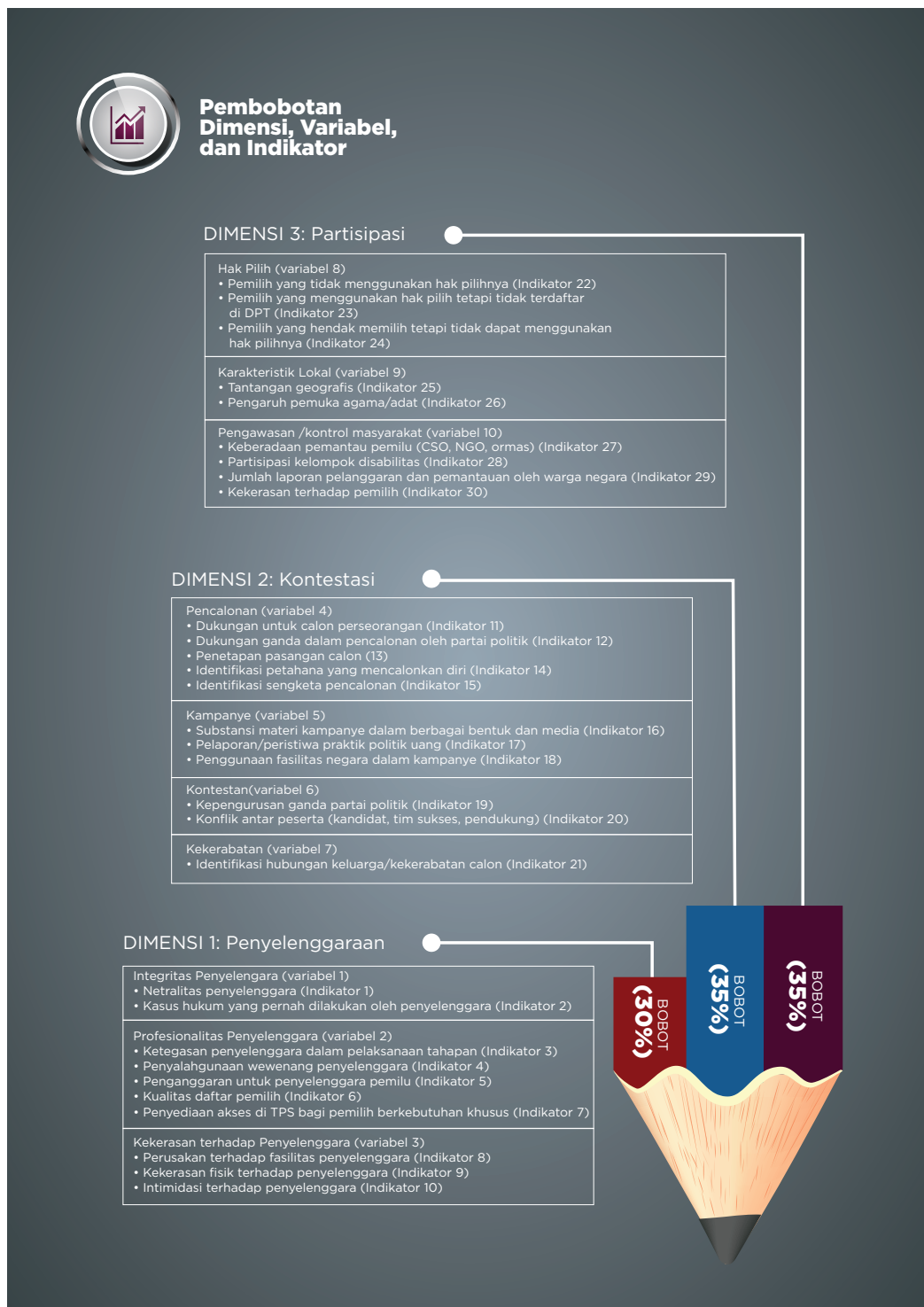
Kata “rawan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/rawan>) berarti mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat. Sementara kerawanan pemilu (pilkada) yang dipergunakan dalam IKP ini dimaknai sebagai: **‘Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis’**. Kerawanan pemilu diidentifikasi berdasarkan dimensi yang diajukan Robert Dahl ditambah dengan dimensi penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan definisi di atas, operasionalisasi konsep kerawanan pemilu terdiri dari tiga dimensi, 10 variabel, dan 30 indikator yang masing-masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. Proses pemberian bobot dilakukan melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang melibatkan para ahli sebagai *expert judgement*. Di bawah ini disajikan bagan dan tabel secara utuh tentang dimensi, variabel, aspek, dan indikator dalam IKP Pilkada 2018.

Gambar 1.1 Pembobotan Dimensi IKP Pilkada 2018



Tabel 1.1 Pembobotan Dimensi, Variabel, dan Indikator



1.4 Tahapan Penyusunan IKP Pilkada 2018

Dalam pelaksanaan riset IKP Pilkada 2018 terdapat beberapa rangkaian tahapan yang diselenggarakan selama Agustus sampai dengan November 2017. Rangkaian tahapan tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar 1.2 Tahapan Riset IKP Pilkada 2018



1. *Workshop* Evaluasi

Rangkaian workshop diawali dengan proses evaluasi atas hasil dan instrumen IKP Pilkada 2017, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan, penyusunan, dan penetapan instrumen IKP Pilkada 2018, termasuk penentuan prioritas dan bobot nilai yang dilakukan oleh Bawaslu, akademisi, praktisi, dan pegiat kepemiluan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data IKP Pilkada 2018 dilakukan pada rentang September sampai dengan November 2017. Sosialisasi dan penjelasan pengisian instrumen dilakukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas

Kabupaten/Kota, yang diikuti dengan pengisian data selama satu bulan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

3. Verifikasi dan Skoring

Data yang telah disediakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota selanjutnya diverifikasi oleh tim peneliti dengan melakukan studi lapangan ke daerah-daerah. Selain itu, konfirmasi data juga dilakukan dengan menghadirkan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota ke Jakarta. Proses skoring akhir dilakukan oleh peneliti berdasarkan triangulasi data isian dan data skoring Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

4. Penyusunan Laporan

Tahapan ini adalah proses terakhir dari penyusunan IKP Pilkada 2018. Tim penyusun meminta masukan dari kementerian/lembaga, penyelenggara pemilu, akademisi dan pegiat pemilu terhadap sajian laporan akhir riset IKP Pilkada 2018. Setelah memperoleh berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, laporan akhir IKP Pilkada 2018 diterbitkan dan siap untuk dipublikasikan.

1.5 Data dan Metode

IKP merupakan suatu pendekatan untuk menyusun proyeksi potensi kerawanan pemilu berdasarkan data/peristiwa yang sudah terjadi (*post factum*). Dalam mengukur potensi tersebut, dilakukan analisis terhadap kondisi terkini dalam suatu daerah dengan mempertimbangkan tahapan pemilu (*time series*).

Pembobotan dilakukan dengan membandingkan tingkat kerawanan satu daerah dengan daerah lain pada level dimensi. Adapun pada level variabel, penilaian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengambil angka rata-rata. Sementara pada level indikator, penilaian kerawanan suatu daerah dilakukan dengan melihat jumlah skor dari indikator.

Berdasarkan konsepsi tersebut, sumber data dalam penyusunan IKP Pilkada 2018 terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer disusun dan dikumpulkan berdasarkan isian data item indikator yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta dilakukan proses verifikasi dan validasi data melalui wawancara tatap muka oleh peneliti. Data sekunder merupakan data resmi yang

bersumber dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), kementerian/lembaga, dan media massa.

Proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa langkah. Pertama, tim peneliti menyusun kerangka item data indikator yang terdiri atas dua jenis data, baik primer maupun sekunder (terlampir dalam laporan akhir). Kedua, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kerangka item data selama kurun waktu satu bulan. Ketiga, tim peneliti melakukan proses verifikasi dan validasi isian item data indikator dengan wawancara tatap muka kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

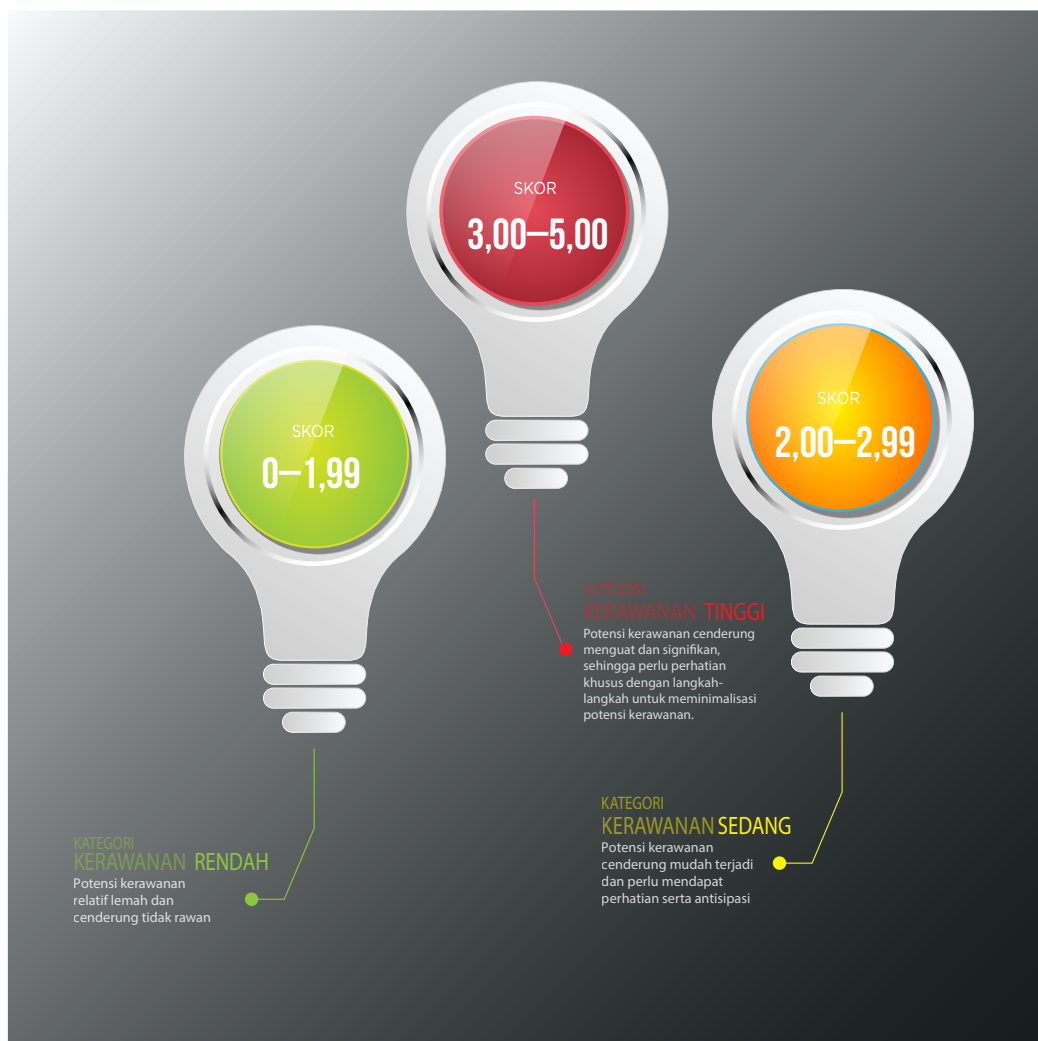
1.6 Metode Pengukuran dan Analisis Data

Penentuan bobot dimensi, variabel, dan indikator dilakukan dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Sementara untuk pengukuran skor akhir IKP Pilkada 2018 dilakukan dengan mengambil angka rata-rata.

Skor dalam setiap indikator ditentukan dengan angka 1, 3, dan 5. Penentuan skor ini mendasarkan pada data pelanggaran pelaksanaan pemilu lima tahun terakhir di setiap daerah serta penilaian ahli terhadap situasi terakhir di daerah tersebut. Proyeksi atas data/peristiwa yang sudah terjadi (*post factum*) untuk mengukur adanya potensi kerawanan. Dalam mengukur potensi tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kondisi terkini dalam suatu daerah dengan mempertimbangkan tahapan pemilu (*time series*).

Sementara untuk penilaian akhir atas peringkat indeks kerawanan dilakukan dengan mengklasifikasi tiga kategori. Tiga kategori tersebut adalah kerawanan rendah, kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi. Kerawanan rendah berada dalam rentang skor 0-1,99, kerawanan sedang 2,00-2,99, dan kerawanan tinggi 3,00-5,00. Indeks kerawanan rendah dimaknai sebagai adanya indikasi kerawanan yang relatif kecil dan cenderung tidak rawan. Kerawanan sedang adalah suatu kondisi adanya indikasi potensi kerawanan yang cukup signifikan yang perlu diperhatikan dan diantisipasi. Sementara kerawanan tinggi adalah keadaan di mana ada indikasi potensi kerawanan yang signifikan yang perlu diperhatikan, diantisipasi, serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisir kerawanan. Di bawah ini disajikan tabel kategori indeks kerawanan.

Tabel 1.2 Kategori Skor IKP



BAB 2

GAMBARAN IKP PILKADA 2018 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

2.1 IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 akan diselenggarakan serentak di 17 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 ini, skor akhir provinsi yang mencakup tiga dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), secara umum memiliki tingkat kerawanan sedang. Dari 17 provinsi di atas, tiga provinsi memiliki kerawanan tinggi (3,00-5,00), dan 14 provinsi memiliki kerawanan sedang (2,00-2,99). Satu hal yang perlu dicermati adalah tidak ada provinsi yang masuk kategori kerawanan rendah.

Tiga provinsi yang masuk kategori nilai kerawanan tinggi (3,00-5,00) adalah Papua dengan skor indeks 3,41; Maluku dengan skor 3,25; dan Kalimantan Barat dengan skor 3,04. Nilai skor tersebut merupakan tiga peringkat teratas penilaian kerawanan tertinggi dari 17 wilayah provinsi yang dinilai. Sementara 14 provinsi lainnya menunjukkan kategori kerawanan sedang (skor 2,00 - 2,99). Provinsi yang masuk kategori ini adalah Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15). Satu hal menarik adalah mayoritas perolehan

indeks provinsi di kerawanan sedang berada di angka 2,5, bahkan ada tiga provinsi yang berpotensi naik ke kategori kerawanan tinggi karena memiliki skor di atas 2,75. Ketiganya adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Sementara itu tujuh provinsi lainnya memiliki nilai skor cukup tinggi, di atas 2,50-2,74. Berikut ini secara lengkap nilai IKP Pilkada 2018 di tingkat provinsi.

Tabel 2.1 IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi



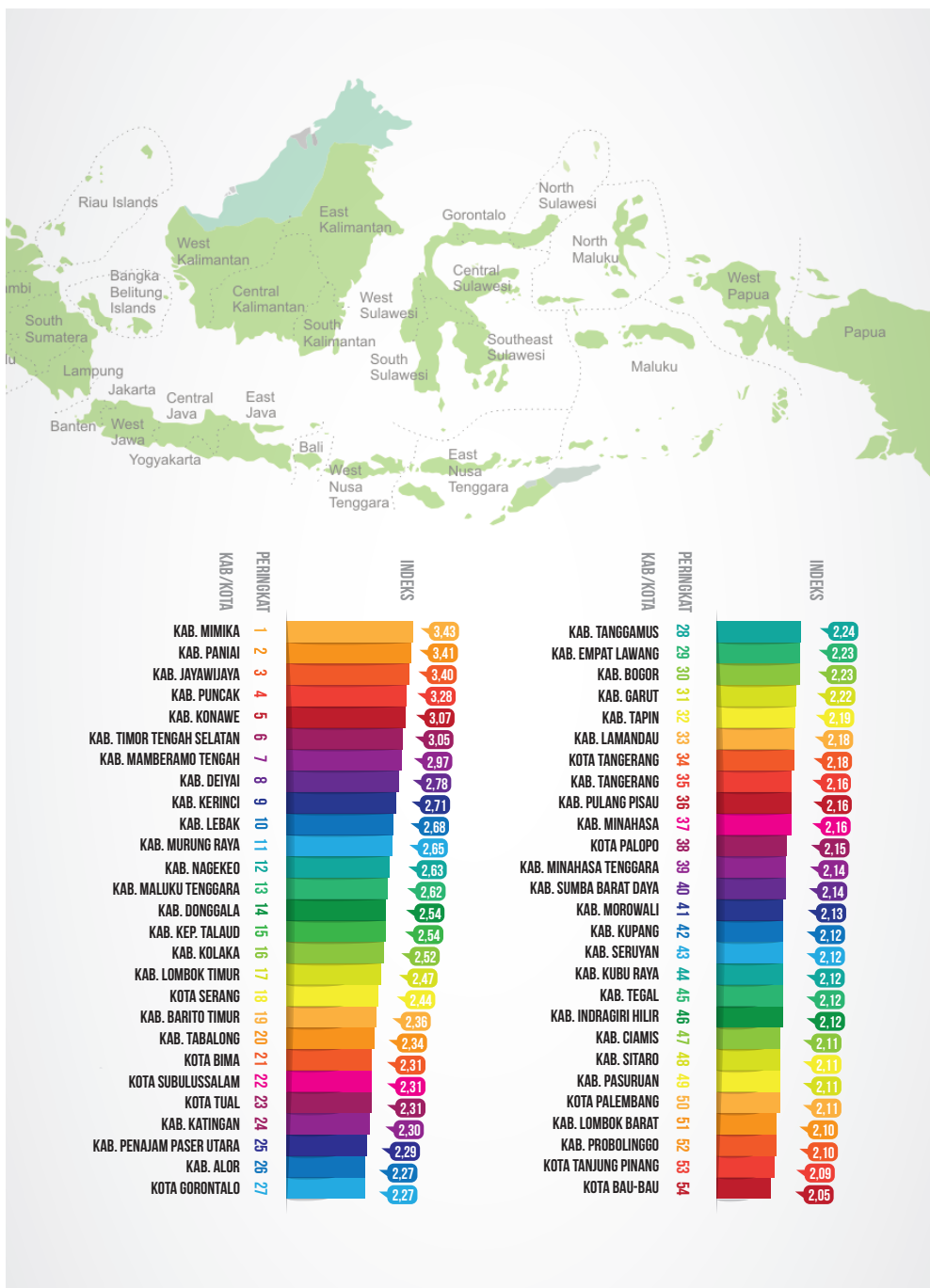
2.2 IKP Pilkada 2018 Tingkat Kabupaten/Kota

Pilkada serentak 2018 tingkat kabupaten/kota digelar di 154 daerah, Penilaian skor akhir dari total ketiga dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi) untuk kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat enam wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi (skor di atas 3,00). Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

Sementara pada kategori kerawanan sedang (skor 2,00–2,99) terdapat 58 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria. Di antara 58 kabupaten/kota tersebut, 11 daerah memiliki skor di atas 2,50. Dua daerah di Provinsi Papua masuk kategori kerawanan sedang namun cenderung tinggi (skor diatas 2,75) adalah Kabupaten Mamberamo Tengah (2,97) dan Kabupaten Deiyai (2,78). Kondisi tersebut semakin menguatkan hasil penilaian derajat kerawanan tinggi Pilkada 2018 di wilayah Provinsi Papua.

Sementara itu, kategori kerawanan rendah (skor dibawah 1,99) terdapat di 90 daerah kabupaten/kota, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merupakan daerah dengan potensi kerawanan terendah, yaitu 1,12. Berikut ini tabel IKP dari 154 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada pada tahun 2018.

Tabel 2.2 IKP 2018 Tingkat Kabupaten/Kota





2.2.1 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui enam daerah yang tergolong dalam tingkat kerawanan tinggi. Keenam daerah itu adalah Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

Empat dari enam daerah tersebut mempunyai karakter yang serupa, yaitu mendapat skor tertinggi pada dimensi penyelenggaraan. Keempat daerah adalah Kabupaten Mimika (4,51), Kabupaten Paniai (4,18), Kabupaten Jayawijaya (3,71), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,38). Sementara Kabupaten Konawe mempunyai skor kerawanan tertinggi dalam dimensi kontestasi dengan skor 3,85. Untuk skor kerawanan tertinggi pada dimensi partisipasi tercatat pada Kabupaten Puncak (3,56).

Skor terendah pada masing-masing dimensi dari enam kabupaten/kota di atas sebenarnya masuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang. Kabupaten Konawe yang mendapatkan skor terendah dalam dimensi penyelenggaraan mendapat skor 2,64. Pada dimensi kontestasi, Kabupaten Paniai sebagai daerah yang mendapatkan skor terendah, mencapai 2,95. Sementara untuk dimensi partisipasi, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Mimika adalah dua daerah yang mendapatkan skor terendah, masing-masing mendapat skor 2,67 dan 2,94.

Keenam daerah kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi itu tersebar di tiga provinsi, yakni Papua, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Puncak. Sementara dua provinsi lainnya yang memiliki kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi adalah Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe) dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Timor Tengah Selatan).

Tabel 2.3 IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tertinggi



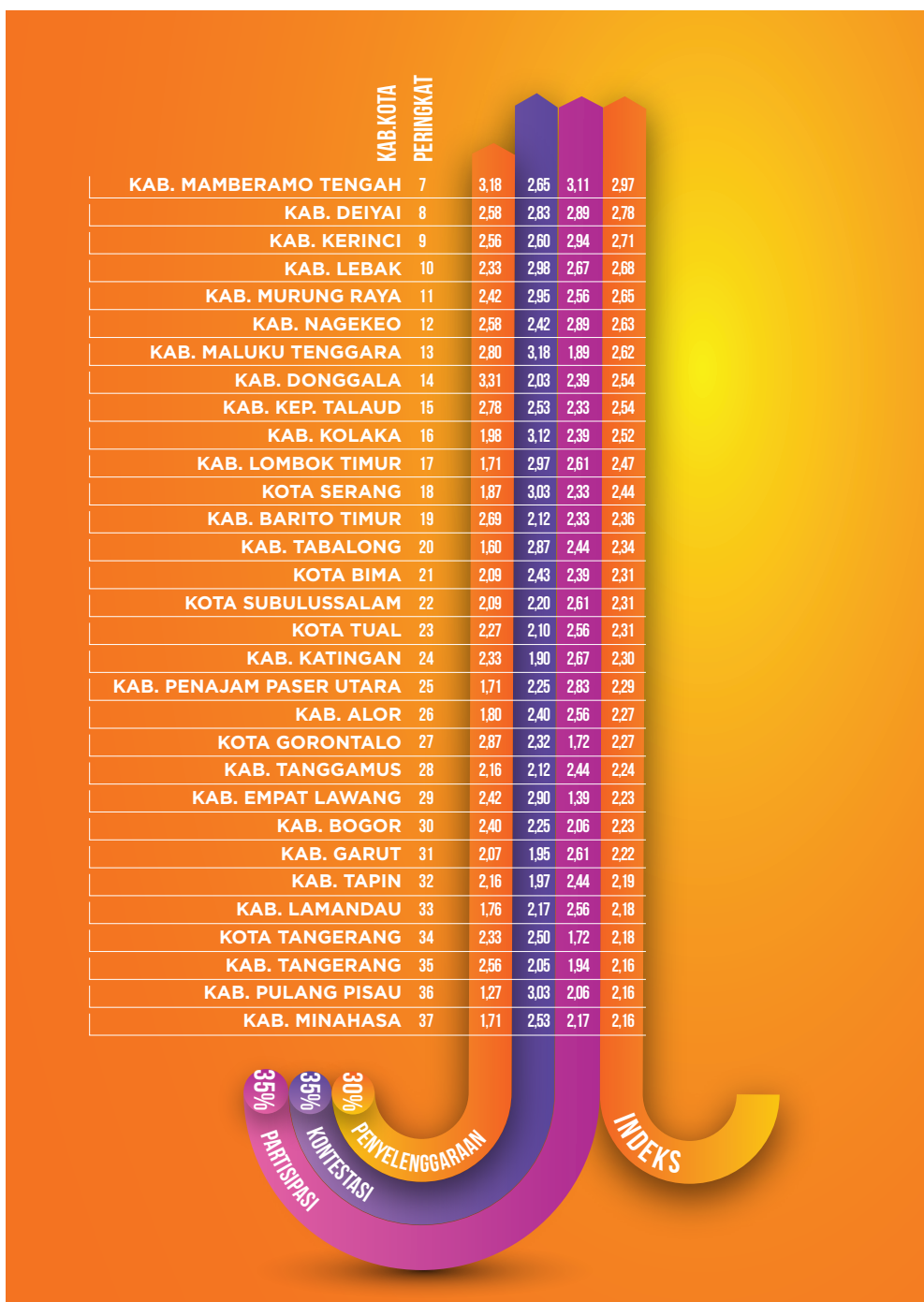
2.2.2 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Sedang

Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan sedang sebanyak 58 daerah yang tersebar di 25 provinsi dari 30 provinsi yang daerah kabupaten/kotanya menyelenggarakan pilkada pada tahun 2018. Sebanyak 25 provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan sedang adalah Papua, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sementara provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan sedang adalah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

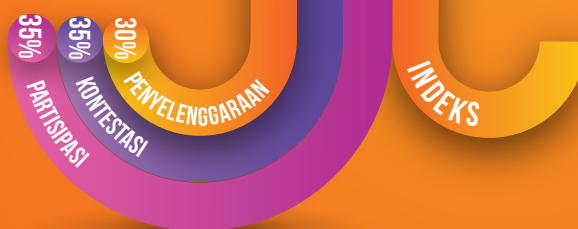
Tiga provinsi, yaitu Banten (4 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Barat (3 kabupaten/kota), dan Maluku (2 kabupaten/kota) merupakan provinsi yang semua daerahnya termasuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang. Sementara Riau dan Kepulauan Riau sama-sama memiliki satu kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada dan termasuk pada kategori tingkat kerawanan sedang.

Walaupun 58 kabupaten/kota di atas termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan sedang, masih terdapat beberapa daerah termasuk dalam kategori tinggi jika dilihat pada masing-masing dimensi. Pada dimensi penyelenggaraan, dua kabupaten/kota masuk pada kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah (3,18) dan Kabupaten Donggala (3,31). Pada dimensi kontestasi, tiga kabupaten/kota masuk pada kategori tingkat kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka (3,12), Kota Serang (3,03), dan Kabupaten Pulang Pisau (3,03). Sementara untuk dimensi partisipasi terdapat empat kabupaten/kota yang masuk pada kategori tingkat kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah (3,11), Kabupaten Seruyan (3,00), dan Kabupaten Sumba Tengah (3,00).

Tabel 2.4 IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Sedang



| KAB. KOTA | PERINGKAT | | | | |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| KOTA PALOPO | 38 | 2,56 | 2,38 | 1,56 | 2,15 |
| KAB. MINAHASA TENGGARA | 39 | 2,33 | 2,07 | 2,06 | 2,14 |
| KAB. SUMBA BARAT DAYA | 40 | 2,67 | 1,77 | 2,06 | 2,14 |
| KAB. MOROWALI | 41 | 2,69 | 1,77 | 2,00 | 2,13 |
| KAB. KUPANG | 42 | 2,13 | 2,02 | 2,22 | 2,12 |
| KAB. SERUYAN | 43 | 1,62 | 1,67 | 3,00 | 2,12 |
| KAB. KUBU RAYA | 44 | 1,82 | 2,43 | 2,06 | 2,12 |
| KAB. TEGAL | 45 | 1,76 | 2,60 | 1,94 | 2,12 |
| KAB. INDRAGIRI HILIR | 46 | 1,76 | 2,65 | 1,89 | 2,12 |
| KAB. CIAMIS | 47 | 1,27 | 2,40 | 2,56 | 2,11 |
| KAB. SITARO | 48 | 1,96 | 2,30 | 2,06 | 2,11 |
| KAB. PASURUAN | 49 | 2,31 | 2,72 | 1,33 | 2,11 |
| KOTA PALEMBANG | 50 | 2,04 | 2,00 | 2,28 | 2,11 |
| KAB. LOMBOK BARAT | 51 | 1,98 | 1,85 | 2,44 | 2,10 |
| KAB. PROBOLINGGO | 52 | 1,69 | 2,48 | 2,06 | 2,10 |
| KOTA TANJUNG PINANG | 53 | 1,96 | 2,28 | 2,00 | 2,09 |
| KOTA BAU-BAU | 54 | 1,40 | 2,53 | 2,11 | 2,05 |
| KOTA PADANG | 55 | 1,27 | 2,20 | 2,56 | 2,04 |
| KAB. PIDIE JAYA | 56 | 1,67 | 1,80 | 2,61 | 2,04 |
| KOTA PALANGKARAYA | 57 | 2,53 | 2,63 | 1,00 | 2,03 |
| KAB. ENDE | 58 | 2,36 | 1,77 | 2,00 | 2,03 |
| KOTA BOGOR | 59 | 1,53 | 2,35 | 2,11 | 2,02 |
| KAB. BIAK NUMFOR | 60 | 2,22 | 1,62 | 2,22 | 2,01 |
| KAB. DAIRI | 61 | 1,84 | 2,65 | 1,50 | 2,01 |
| KAB. SUMBA TENGAH | 62 | 1,40 | 1,52 | 3,00 | 2,00 |
| KAB. GUNUNG MAS | 63 | 1,80 | 2,28 | 1,89 | 2,00 |



2.2.3 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah

Mayoritas kabupaten/kota (90 daerah) yang menyelenggarakan Pilkada 2018 termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah. Daerah yang masuk dalam kategori ini tersebar di 22 provinsi dari 30 provinsi yang daerah kabupaten/kotanya menyelenggarakan pilkada di 2018. Sebanyak 22 provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan rendah adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Sementara delapan provinsi lainnya tidak memiliki kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tingkat kerawanan rendah. Kedelapan provinsi tersebut adalah Papua, Maluku, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Riau, dan Kepulauan Riau. Meskipun 90 daerah masuk dalam kategori tingkat kerawanan rendah, jika dilihat pada masing-masing dimensi, masih banyak daerah yang masuk kategori tingkat kerawanan sedang.

Tingkat kerawanan sedang pada dimensi penyelenggaraan terdapat di 10 daerah, sedangkan pada dimensi kontestasi terdapat di 19 daerah. Sementara pada dimensi partisipasi, daerah yang termasuk pada tingkat kerawanan sedang mencapai 28 daerah. Meskipun ada satu dimensi yang masuk dalam skor kerawanan sedang, bila diakumulasikan dengan dimensi yang lain, tetap saja hasilnya masuk dalam kategori kerawanan rendah. Adapun perolehan skor kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kerawanan rendah dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.5 IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah



| | | KAB. KOTA PERINGKAT | | | |
|--------------------------|-----|------------------------|------|------|------|
| KAB. PURWAKARTA | 93 | 1.93 | 1.53 | 2.00 | 1.82 |
| KOTA SAWAHLUNTO | 94 | 1.80 | 1.53 | 2.11 | 1.82 |
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 95 | 1.13 | 1.53 | 2.67 | 1.81 |
| KAB. BATU BARA | 96 | 2.42 | 1.53 | 1.56 | 1.81 |
| KOTA KOTAMOBAGU | 97 | 1.82 | 2.03 | 1.56 | 1.80 |
| KOTA LUBUK LINGGAU | 98 | 1.27 | 1.62 | 2.44 | 1.80 |
| KAB. BANYUMAS | 99 | 1.40 | 2.05 | 1.89 | 1.80 |
| KAB. SUBANG | 100 | 1.62 | 1.95 | 1.78 | 1.79 |
| KAB. JOMBANG | 101 | 1.13 | 2.63 | 1.50 | 1.79 |
| KAB. PADANG LAWAS UTARA | 102 | 2.51 | 1.93 | 1.00 | 1.78 |
| KAB. KUNINGAN | 103 | 1.13 | 2.50 | 1.61 | 1.78 |
| KAB. SAMPANG | 104 | 1.93 | 1.75 | 1.67 | 1.78 |
| KAB. LUWU | 105 | 2.27 | 1.33 | 1.78 | 1.77 |
| KAB. MUARA ENIM | 106 | 1.49 | 1.85 | 1.89 | 1.76 |
| KAB. BARITO UTARA | 107 | 1.13 | 1.42 | 2.61 | 1.75 |
| KAB. POLEWALI MANDAR | 108 | 1.47 | 1.83 | 1.89 | 1.74 |
| KOTA PONTIANAK | 109 | 1.13 | 1.88 | 2.11 | 1.74 |
| KAB. GIANYAR | 110 | 1.62 | 2.17 | 1.39 | 1.73 |
| KAB. KAYONG UTARA | 111 | 1.71 | 2.20 | 1.22 | 1.71 |
| KAB. GORONTALO UTARA | 112 | 1.71 | 1.85 | 1.56 | 1.71 |
| KAB. OGAN KOMERING ILIR | 113 | 1.13 | 1.33 | 2.56 | 1.70 |
| KAB. MEMPAWAH | 114 | 1.60 | 1.43 | 2.06 | 1.70 |
| KOTA MOJOKERTO | 115 | 1.89 | 1.43 | 1.78 | 1.69 |
| KOTA BANDUNG | 116 | 1.13 | 1.60 | 2.22 | 1.68 |
| KAB. KAPUAS | 117 | 1.49 | 1.43 | 2.06 | 1.67 |
| KAB. LANGKAT | 118 | 1.62 | 1.43 | 1.89 | 1.65 |
| KAB. LAHAT | 119 | 1.49 | 1.20 | 2.22 | 1.64 |
| KAB. ENREKANG | 120 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.64 |
| KAB. TAPANULI UTARA | 121 | 1.82 | 1.70 | 1.39 | 1.63 |
| KOTA PADANG SIDEMPUAN | 122 | 1.49 | 1.63 | 1.72 | 1.62 |



| | KAB.KOTA | PERINGKAT | | | |
|------------------------|----------|-----------|------|------|------|
| KOTA PANGKAL PINANG | 123 | 1,27 | 1,87 | 1,67 | 1,62 |
| KAB. SIDENRENG RAPPANG | 124 | 1,80 | 1,27 | 1,72 | 1,59 |
| KOTA TARAKAN | 125 | 1,27 | 1,50 | 1,94 | 1,59 |
| KAB. BOJONEGORO | 126 | 1,27 | 1,37 | 2,06 | 1,58 |
| KOTA PROBOLINGGO | 127 | 1,36 | 1,67 | 1,67 | 1,57 |
| KOTA MADIUN | 128 | 2,04 | 1,57 | 1,17 | 1,57 |
| KAB. MADIUN | 129 | 2,16 | 1,47 | 1,17 | 1,57 |
| KAB. TANAH LAUT | 130 | 1,13 | 1,70 | 1,78 | 1,56 |
| KOTA BEKASI | 131 | 1,96 | 1,20 | 1,56 | 1,55 |
| KOTA KEDIRI | 132 | 1,49 | 2,13 | 1,00 | 1,54 |
| KAB. PADANG LAWAS | 133 | 1,58 | 1,43 | 1,61 | 1,54 |
| KAB. BANTAENG | 134 | 1,49 | 1,92 | 1,17 | 1,53 |
| KAB. PINRANG | 135 | 1,71 | 1,17 | 1,72 | 1,52 |
| KAB. BANDUNG BARAT | 136 | 1,13 | 1,70 | 1,67 | 1,52 |
| KOTA BENGKULU | 137 | 1,47 | 1,83 | 1,22 | 1,51 |
| KAB. BANGKALAN | 138 | 1,40 | 1,33 | 1,72 | 1,49 |
| KAB. TEMANGGUNG | 139 | 1,13 | 1,53 | 1,72 | 1,48 |
| KOTA MALANG | 141 | 1,13 | 1,43 | 1,72 | 1,44 |
| KAB. WAJO | 140 | 1,13 | 1,27 | 1,89 | 1,44 |
| KAB. MAGETAN | 142 | 1,60 | 1,42 | 1,22 | 1,40 |
| KAB. SINJAI | 143 | 1,60 | 1,37 | 1,22 | 1,39 |
| KOTA PAREPARE | 144 | 1,40 | 1,33 | 1,39 | 1,37 |
| KAB. BELITUNG | 145 | 1,13 | 1,52 | 1,39 | 1,36 |
| KAB. BONE | 146 | 1,71 | 1,17 | 1,22 | 1,35 |
| KOTA MAKASSAR | 147 | 2,16 | 1,00 | 1,00 | 1,35 |
| KAB. SUMEDANG | 148 | 1,27 | 1,37 | 1,33 | 1,33 |
| KAB. BANGKA | 149 | 1,27 | 1,27 | 1,39 | 1,31 |
| KAB. NGANJUK | 150 | 1,13 | 1,50 | 1,00 | 1,22 |
| KOTA CIREBON | 151 | 1,40 | 1,10 | 1,17 | 1,21 |
| KAB. KLUNGKUNG | 152 | 1,27 | 1,00 | 1,33 | 1,20 |
| KAB. SUKAMARA | 153 | 1,13 | 1,10 | 1,33 | 1,19 |
| KAB. MAJALENGKA | 154 | 1,27 | 1,10 | 1,00 | 1,12 |



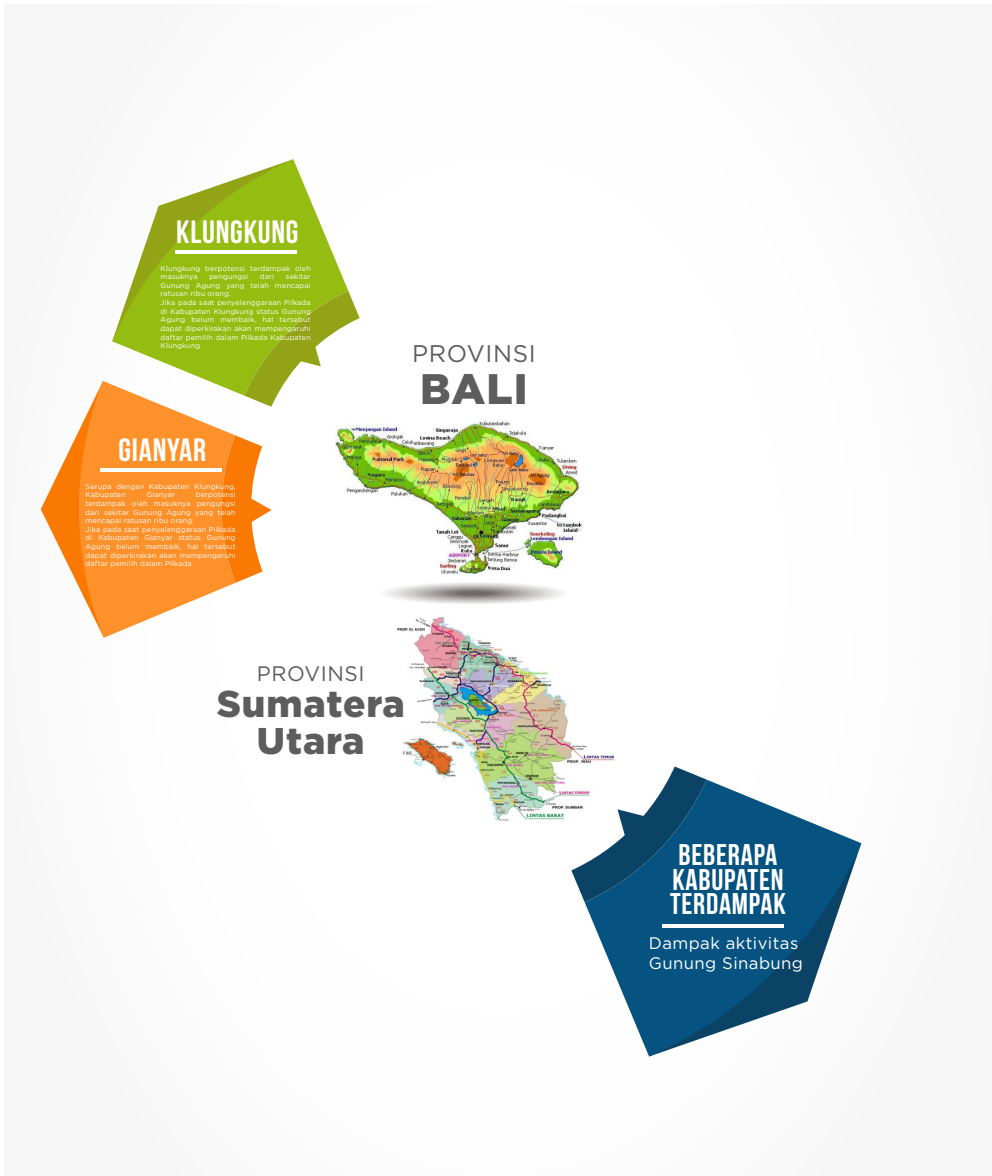
2.2.4 Kabupaten/Kota dengan Situasi Khusus

Di samping pengukuran terhadap tiga dimensi tersebut, terdapat beberapa kabupaten/kota yang meskipun tidak memiliki tingkat kerawanan tinggi, namun sedang menghadapi situasi khusus (atau terdampak oleh situasi khusus yang terjadi di kabupaten/kota sekitarnya) yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Situasi khusus tersebut terkait dengan status siaga bencana yang berpotensi memberikan dampak berupa:

- Migrasi penduduk yang tidak memiliki hak pilih ke kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.
- Migrasi pemilih dari kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada ke daerah lain

Kedua dampak tersebut berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pematangan daftar pemilih yang dapat menimbulkan hilangnya hak pilih atau munculnya penduduk yang tidak memiliki hak pilih namun turut memberikan suara dalam pilkada. Daerah-daerah tersebut meliputi:

Tabel 2.6 Daerah Potensi Bencana Alam



2.3 IKP Pilkada 2018 di Tingkat Provinsi Berbasis Dimensi

Pada bagian ini akan diuraikan IKP Pilkada 2018 tingkat provinsi yang diukur dari masing-masing dimensi. Derajat kerawanan yang dipotret adalah dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Adapun indeks kerawanan berbasis dimensi di 17 provinsi pada pilkada serentak 2018 dapat dilihat sebagai berikut.

Dari 17 (tujuh belas) provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur pada 2018; Provinsi Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat merupakan tiga provinsi yang masuk kategori daerah dengan potensi kerawanan tinggi. Indeks ketiganya berada pada angka di atas 3. Total indeks Provinsi Papua adalah 3,41, Maluku 3,25, dan Kalimantan Barat 3,04.

Untuk Provinsi Papua, dimensi partisipasi merupakan dimensi dengan indeks paling tinggi, yaitu 3,83. Sementara dimensi penyelenggaraan di posisi kedua, yaitu 3,24 dan dimensi kontestasi di tempat ketiga sebesar 3,12. Sementara untuk Provinsi Maluku, urutan dimensi tertinggi sampai terendah adalah penyelenggaraan (3,47), partisipasi (3,17), dan kontestasi (3,15). Pada Provinsi Kalimantan Barat, kerawanan berbasis dimensi secara berurutan sebagai berikut: kontestasi (3,48), partisipasi (2,83), dan penyelenggaraan (2,76). Berikut disajikan tabel IKP Pilkada 2018 tingkat provinsi berbasis dimensi dengan tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 2.7 IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi Kerawanan Tertinggi Berbasis Dimensi



2.3.1 Dimensi Penyelenggaraan

Pada dimensi penyelenggaraan di tingkat provinsi, terdapat tiga provinsi yang termasuk kerawanan tinggi. Ketiga provinsi tersebut secara berurutan dari indeks tertinggi ke terendah adalah Maluku (3,47), Maluku Utara (3,33), serta Papua dan Sumatera Utara dengan skor yang sama (3,24).

Sementara pada kategori kerawanan sedang namun cenderung tinggi terdapat tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan skor sama (2,78). Berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat dengan skor yang sama, yaitu 2,76. Sementara pada kategori kerawanan rendah dalam dimensi penyelenggaraan terdapat Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat dengan perolehan skor sama (1,84).

2.3.2 Dimensi Kontestasi

Penilaian pada dimensi kontestasi menunjukkan lima provinsi dengan derajat kerawanan tinggi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (3,50), disusul Kalimantan Barat (3,48), Maluku (3,15), Papua (3,12), dan Kalimantan Timur (3,05). Sementara untuk kategori kerawanan sedang namun cenderung tinggi (di atas skor 2,75) pada dimensi kontestasi terdapat lima provinsi, yaitu Jawa Timur (2,92), Sumatera Utara (2,90), Sulawesi Tenggara (2,82), Sumatera Selatan (2,78), dan Riau (2,75).

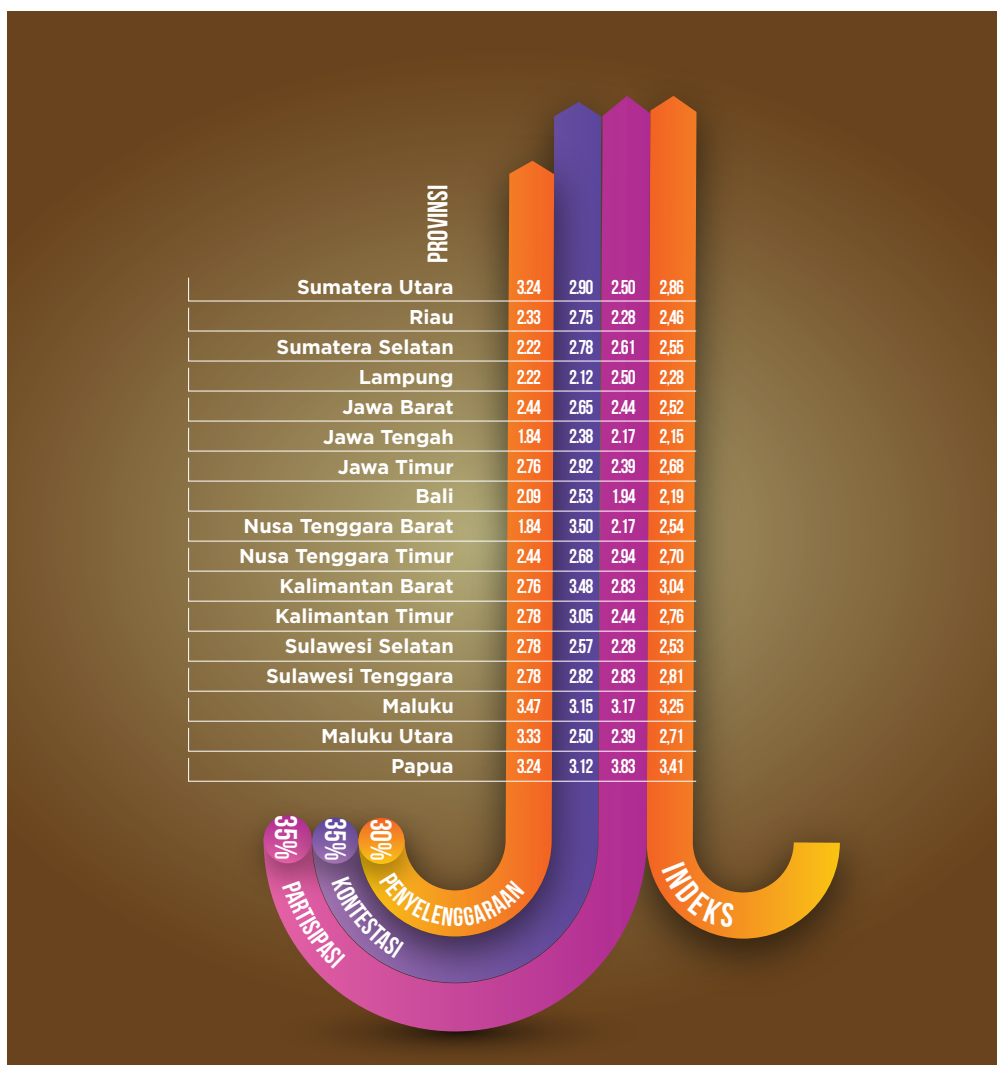
Dalam dimensi kontestasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan rendah (di bawah skor 2,00). Sebanyak tujuh provinsi lainnya dapat dikatakan dalam kategori kerawanan sedang. Ketujuh provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (2,68), Jawa Barat (2,65), Sulawesi Selatan (2,57), Bali (2,53), Maluku Utara (2,50), Jawa Tengah (2,38), dan Lampung (2,12).

2.3.3 Dimensi Partisipasi

Dalam dimensi partisipasi, derajat kerawanan tertinggi pada partisipasi pemilu ada di Provinsi Papua (3,83) dan Maluku (3,17). Untuk kategori kerawanan sedang cenderung tinggi dari partisipasi (skor di atas 2,75) adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,94), Sulawesi Tenggara (2,83), dan Kalimantan Barat (2,83). Sementara itu 10 provinsi lainnya

masuk kategori kerawanan sedang, yaitu Provinsi Riau (2,28), Sumatera Selatan (2,61), Lampung (2,50), Jawa Barat (2,44), Jawa Tengah (2,17), Jawa Timur (2,39), Nusa Tenggara Barat (2,17), Kalimantan Timur (2,44), Sulawesi Selatan (2,28), dan Maluku Utara (2,39). Hanya ada satu provinsi yang masuk kategori kerawanan rendah, yaitu Provinsi Bali (1,94). Untuk memberikan gambaran utuh, di bawah ini disajikan tabel IKP Pilkada 2018 untuk tingkat provinsi berbasis dimensi.

Tabel 2.8 IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi Berbasis Dimensi



2.4 IKP Pilkada 2018 di Tingkat Kabupaten/Kota Berbasis Dimensi

Pada bagian ini akan diuraikan tentang IKP Pilkada 2018 berbasis dimensi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing dimensi, yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi, terdapat beberapa daerah yang termasuk kategori potensi kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.

2.4.1 Dimensi Penyelenggaraan

Pada dimensi penyelenggaraan, terdapat tujuh daerah yang digolongkan ke dalam daerah dengan potensi kerawanan tinggi. Ketujuh daerah yang memiliki skor di atas 3 ini adalah Kabupaten Mimika (4,51), Kabupaten Paniai (4,18), Kabupaten Jayawijaya (3,71), Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,38), Kabupaten Donggala (3,31), Kabupaten Mamberamo Tengah (3,18), dan Kabupaten Puncak (3,02).

Sementara itu, pada kategori daerah dengan potensi kerawanan sedang, sebanyak 37 daerah yang memenuhi kriteria tersebut. Daerah yang dimaksud adalah wilayah yang memiliki total skor dimensi penyelenggaraan dari rentang 2,00 hingga 2,99. Di antara 37 daerah dengan kerawanan sedang tersebut terdapat beberapa daerah yang masuk kategori sedang namun skornya mendekati kerawanan tinggi. Daerah yang masuk kategori ini adalah Kabupaten Parigi Moutong (2,91), Kabupaten Maluku Tenggara (2,8), Kabupaten Kepulauan Talaud (2,78), Kabupaten Barito Timur (2,69), dan Kabupaten Aceh Selatan (2,00). Sementara untuk kategori kerawanan yang terakhir, terdapat 110 daerah yang berada pada kerawanan rendah.

2.4.2 Dimensi Kontestasi

Untuk dimensi kontestasi tercatat enam daerah masuk kategori kerawanan tinggi. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Konawe (3,85), Kabupaten Maluku Tenggara (3,18), Kabupaten Kolaka (3,12), Kabupaten Jayawijaya (3,10), Kota Serang (3,03), dan Kabupaten Pulang Pisau (3,03). Sementara itu, untuk daerah dengan kerawanan sedang pada dimensi kontestasi, terdapat 61 daerah dengan kategori kerawanan tersebut. Lima daerah dengan skor tertinggi pada kategori kerawanan sedang ini adalah Kabupaten Empat Lawang (2,90), Kabupaten Lebak (2,98), Kabupaten Lombok Timur (2,97), serta Kabupaten Murung Raya

dan Kabupaten Paniai yang masing-masing memperoleh skor 2,95. Untuk daerah dengan kategori kerawanan rendah tercatat sebanyak 87 kabupaten/kota.

2.4.3 Dimensi Partisipasi

Pada kerawanan berbasis dimensi partisipasi, terdapat delapan daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Kedelapan daerah tersebut adalah Kabupaten Puncak (3,55), Kabupaten Jayawijaya (3,44), Kabupaten Paniai (3,22), Kabupaten Mamberamo Tengah (3,11). Tiga daerah lainnya, yakni Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Seruyan sama-sama memiliki skor 3,00. Sementara itu daerah dengan potensi kerawanan sedang pada dimensi ini berjumlah 66 daerah, di antaranya Kabupaten Kerinci (2,94). Sisanya, Kabupaten Merangin, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Manggarai Timur sama-sama meraih skor 2,88. Sebanyak 79 daerah lainnya yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 digolongkan sebagai daerah dengan potensi kerawanan rendah. Untuk memberikan gambaran utuh, di bawah ini disajikan Tabel IKP Pilkada 2018 untuk tingkat kabupaten/kota berbasis dimensi.

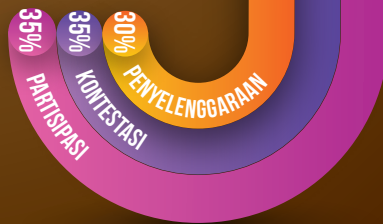
Tabel 2.9 IKP Pilkada 2018 Tingkat Kabupaten/Kota Berbasis Dimensi



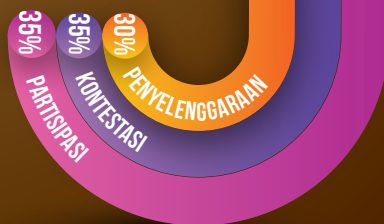
| PROVINSI | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| Kabupaten Tanggamus | 2.16 | 2.12 | 2.44 |
| Kabupaten Lampung Utara | 1.69 | 1.43 | 2.44 |
| Kota Pangkal Pinang | 1.27 | 1.87 | 1.67 |
| Kabupaten Bangka | 1.27 | 1.27 | 1.39 |
| Kabupaten Belitung | 1.13 | 1.52 | 1.39 |
| Kota Tanjung Pinang | 1.96 | 2.28 | 2.00 |
| Kota Bekasi | 1.96 | 1.20 | 1.56 |
| Kota Cirebon | 1.40 | 1.10 | 1.17 |
| Kota Sukabumi | 1.93 | 1.68 | 2.06 |
| Kota Bandung | 1.13 | 1.60 | 2.22 |
| Kota Banjar | 1.93 | 2.10 | 1.67 |
| Kota Bogor | 1.53 | 2.35 | 2.11 |
| Kabupaten Purwakarta | 1.93 | 1.53 | 2.00 |
| Kabupaten Bandung Barat | 1.13 | 1.70 | 1.67 |
| Kabupaten Sumedang | 1.27 | 1.37 | 1.33 |
| Kabupaten Kuningan | 1.13 | 2.50 | 1.61 |
| Kabupaten Majalengka | 1.27 | 1.10 | 1.00 |
| Kabupaten Subang | 1.62 | 1.95 | 1.78 |
| Kabupaten Bogor | 2.40 | 2.25 | 2.06 |
| Kabupaten Garut | 2.07 | 1.95 | 2.61 |
| Kabupaten Cirebon | 1.82 | 1.67 | 2.11 |
| Kabupaten Ciamis | 1.27 | 2.40 | 2.56 |
| Kota Tegal | 1.40 | 2.27 | 1.94 |
| Kabupaten Banyumas | 1.40 | 2.05 | 1.89 |
| Kabupaten Temanggung | 1.13 | 1.53 | 1.72 |
| Kabupaten Kudus | 1.40 | 2.05 | 2.28 |
| Kabupaten Karanganyar | 1.62 | 1.93 | 2.11 |
| Kabupaten Tegal | 1.76 | 2.60 | 1.94 |
| Kabupaten Magelang | 1.58 | 2.20 | 1.89 |
| Kota Malang | 1.13 | 1.43 | 1.72 |
| Kota Mojokerto | 1.89 | 1.43 | 1.78 |



| PROVINSI | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Kota Probolinggo | 1.36 | 1.67 | 1.67 |
| Kota Kediri | 1.49 | 2.13 | 1.00 |
| Kota Madiun | 2.04 | 1.57 | 1.17 |
| Kabupaten Probolinggo | 1.69 | 2.48 | 2.06 |
| Kabupaten Sampang | 1.93 | 1.75 | 1.67 |
| Kabupaten Bangkalan | 1.40 | 1.33 | 1.72 |
| Kabupaten Bojonegoro | 1.27 | 1.37 | 2.06 |
| Kabupaten Nganjuk | 1.13 | 1.50 | 1.00 |
| Kabupaten Pamekasan | 1.82 | 1.95 | 2.06 |
| Kabupaten Tulungagung | 1.98 | 1.75 | 1.78 |
| Kabupaten Pasuruan | 2.31 | 2.72 | 1.33 |
| Kabupaten Magetan | 1.60 | 1.42 | 1.22 |
| Kabupaten Madiun | 2.16 | 1.47 | 1.17 |
| Kabupaten Lumajang | 1.87 | 1.92 | 1.89 |
| Kabupaten Bondowoso | 2.18 | 1.27 | 2.22 |
| Kabupaten Jombang | 1.13 | 2.63 | 1.50 |
| Kota Serang | 1.87 | 3.03 | 2.33 |
| Kota Tangerang | 2.33 | 2.50 | 1.72 |
| Kabupaten Tangerang | 2.56 | 2.05 | 1.94 |
| Kabupaten Lebak | 2.33 | 2.98 | 2.67 |
| Kabupaten Gianyar | 1.62 | 2.17 | 1.39 |
| Kabupaten Klungkung | 1.27 | 1.00 | 1.33 |
| Kota Bima | 2.09 | 2.43 | 2.39 |
| Kabupaten Lombok Timur | 1.71 | 2.97 | 2.61 |
| Kabupaten Lombok Barat | 1.98 | 1.85 | 2.44 |
| Kabupaten Sikka | 1.27 | 2.17 | 2.00 |
| Kabupaten Sumba Tengah | 1.40 | 1.52 | 3.00 |
| Kabupaten Nagekeo | 2.58 | 2.42 | 2.89 |
| Kab Rote Ndao | 1.80 | 1.90 | 1.83 |
| Kabupaten Manggaraitimur | 1.53 | 1.43 | 2.89 |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.38 | 2.82 | 3.00 |

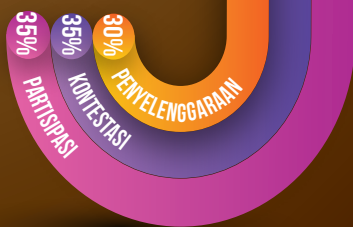


| PROVINSI | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Kabupaten Alor | 1.80 | 2.40 | 2.56 |
| Kabupaten Kupang | 2.13 | 2.02 | 2.22 |
| Kabupaten Ende | 2.36 | 1.77 | 2.00 |
| Kabupaten Sumba Barat Daya | 2.67 | 1.77 | 2.06 |
| Kota Pontianak | 1.13 | 1.88 | 2.11 |
| Kabupaten Kayong Utara | 1.71 | 2.20 | 1.22 |
| Kabupaten Sanggau | 1.71 | 1.60 | 2.56 |
| Kabupaten Kubu Raya | 1.82 | 2.43 | 2.06 |
| Kabupaten Mempawah | 1.60 | 1.43 | 2.06 |
| Kota Palangkaraya | 2.53 | 2.63 | 1.00 |
| Kabupaten Kapuas | 1.49 | 1.43 | 2.06 |
| Kabupaten Sukamara | 1.13 | 1.10 | 1.33 |
| Kabupaten Lamandau | 1.76 | 2.17 | 2.56 |
| Kabupaten Seruyan | 1.62 | 1.67 | 3.00 |
| Kabupaten Katingan | 2.33 | 1.90 | 2.67 |
| Kabupaten Pulangpisau | 1.27 | 3.03 | 2.06 |
| Kabupaten Murung Raya | 2.42 | 2.95 | 2.56 |
| Kabupaten Barito Timur | 2.69 | 2.12 | 2.33 |
| Kabupaten Barito Utara | 1.13 | 1.42 | 2.61 |
| Kabupaten Gunung Mas | 1.80 | 2.28 | 1.89 |
| Kabupaten Tapin | 2.16 | 1.97 | 2.44 |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.13 | 1.53 | 2.67 |
| Kabupaten Tanah Laut | 1.13 | 1.70 | 1.78 |
| Kabupaten Tabalong | 1.60 | 2.87 | 2.44 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | 1.71 | 2.25 | 2.83 |
| Kota Tarakan | 1.27 | 1.50 | 1.94 |
| Kota Kotamobagu | 1.82 | 2.03 | 1.56 |
| Kabupaten Minahasa | 1.71 | 2.53 | 2.17 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1.53 | 2.40 | 1.94 |
| Kabupaten Sitaro | 1.96 | 2.30 | 2.06 |
| Kabupaten Minahasa Tenggara | 2.33 | 2.07 | 2.06 |



PROVINSI

| | | | |
|---------------------------|------|------|------|
| Kabupaten Kep. Talaud | 2.78 | 2.53 | 2.33 |
| Kabupaten Morowali | 2.69 | 1.77 | 2.00 |
| Kabupaten ParigiMoutong | 2.91 | 1.60 | 1.44 |
| Kabupaten Donggala | 3.31 | 2.03 | 2.39 |
| Kota Palopo | 2.56 | 2.38 | 1.56 |
| Kota Parepare | 1.40 | 1.33 | 1.39 |
| Kota Makassar | 2.16 | 1.00 | 1.00 |
| Kabupaten Bone | 1.71 | 1.17 | 1.22 |
| Kabupaten Sinjai | 1.60 | 1.37 | 1.22 |
| Kabupaten Bantaeng | 1.49 | 1.92 | 1.17 |
| Kabupaten Enrekang | 1.58 | 1.67 | 1.67 |
| Kabupaten Siderengrappang | 1.80 | 1.27 | 1.72 |
| Kabupaten Jeneponto | 1.96 | 2.07 | 1.56 |
| Kabupaten Wajo | 1.13 | 1.27 | 1.89 |
| Kabupaten Luwu | 2.27 | 1.33 | 1.78 |
| Kabupaten Pinrang | 1.71 | 1.17 | 1.72 |
| Kota Bau-Bau | 1.40 | 2.53 | 2.11 |
| Kabupaten Konawe | 2.64 | 3.85 | 2.67 |
| Kabupaten Kolaka | 1.98 | 3.12 | 2.39 |
| Kota Gorontalo | 2.87 | 2.32 | 1.72 |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 1.71 | 1.85 | 1.56 |
| Kabupaten Mamasa | 1.13 | 2.60 | 1.67 |
| Kabupaten Polewalimandar | 1.47 | 1.83 | 1.89 |
| Kota Tual | 2.27 | 2.10 | 2.56 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 2.80 | 3.18 | 1.89 |
| Kabupaten Membramo Tengah | 3.18 | 2.65 | 3.11 |
| Kabupaten Paniai | 4.18 | 2.95 | 3.22 |
| Kabupaten Puncak | 3.02 | 3.22 | 3.56 |
| Kabupaten Deiyai | 2.58 | 2.83 | 2.89 |
| Kabupaten Jayawijaya | 3.71 | 3.10 | 3.44 |
| Kabupaten Biak Numfor | 2.22 | 1.62 | 2.22 |
| Kabupaten Mimika | 4.51 | 3.00 | 2.94 |



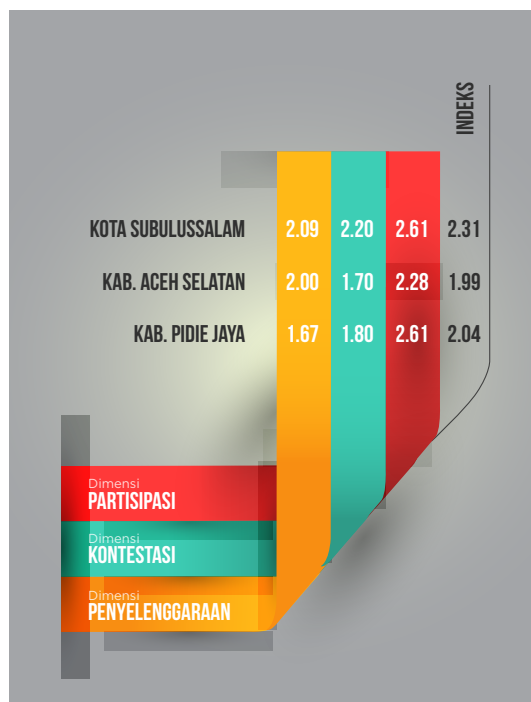
BAB 3

IKP PILKADA 2018 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

3.1 Provinsi Aceh

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2018 akan diselenggarakan di 3 (tiga) kabupaten/kota, yakni Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018, ketiga daerah itu masuk dalam kategori rawan sedang dan rendah. Secara berurutan, Kota Subulussalam masuk kategori rawan sedang dengan indeks 2,31, diikuti oleh Kabupaten Pidie Jaya dengan indeks 2,04 (kerawanan sedang), dan Kabupaten Aceh Selatan dengan indeks 1,99 (kerawanan rendah). Data tersebut lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di samping ini.

Tabel 3.1 IKP Pilkada 2018 Provinsi Aceh



Berdasarkan indeks kerawanan di atas, Kota Subulussalam menempati urutan pertama dengan tingkat kerawanan sedang (2,31). Kontribusi tertinggi dari kerawanan ini berasal dari dimensi partisipasi dengan indeks kerawanan 2,61. Kerawanan ini muncul akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada (3,50). Partisipasi lembaga pemantau pemilu, CSO, NGO, dan ormas yang peduli soal kepemiluan hanya muncul pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014, sedangkan pilkada sebelumnya tidak muncul.

Selain itu, pada dimensi kontestasi terdapat potensi kerawanan pada variabel kampanye (3,00) dan variabel kekerabatan (3,00). Dalam pemilihan sebelumnya, muncul upaya provokasi melalui isu kesukuan yang cenderung selalu digunakan. Selain itu juga terjadi pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye yang menunjukkan gejala akan digunakan kembali dalam Pilkada 2018. Sementara itu pada dimensi penyelenggaraan, terdapat variabel yang perlu menjadi perhatian, yakni profesionalitas penyelenggara (3,00). Hal ini terkait persoalan anggaran dan dukungan kesekretariatan. Kondisi ini muncul dalam pilkada sebelumnya, termasuk di antaranya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

Sementara itu untuk potensi kerawanan di Kabupaten Pidie Jaya berasal dari dimensi partisipasi (2,61), khususnya pada variabel pengawasan masyarakat (3,50). Kasus kekerasan terhadap pemilih yang terjadi lebih dari tiga kali pada pilkada sebelumnya yang pernah digelar di wilayah ini, diperkirakan berpotensi kembali terjadi pada Pilkada 2018. Di sisi lain, pada dimensi penyelenggaraan (1,67), variabel yang patut mendapat perhatian adalah profesionalitas penyelenggara. Hal ini perlu dipertimbangkan karena terkait ketersediaan anggaran dan dukungan kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya. Potensi rawan yang sama juga terekam pada dimensi kontestasi (1,80). Hal ini terlihat dari variabel pencalonan dan kampanye. Keterlibatan ASN dan penggunaan fasilitas negara yang pernah dilakukan pada pilkada sebelumnya, berpotensi kembali digunakan pada Pilkada 2018. Hal yang sama dengan kampanye bernuansa provokatif dari tokoh masyarakat yang sebelumnya marak digunakan, berpotensi kembali terjadi di Pilkada 2018.

Sementara bagi Kabupaten Aceh Selatan, meskipun masuk dalam kategori rawan rendah (1,99), ada beberapa dimensi yang masuk kategori kerawanan sedang, yakni dimensi penyelenggara (2,00). Pada dimensi ini, variabel profesionalitas penyelenggara perlu mendapat perhatian, khususnya persoalan anggaran pengawasan yang belum

dicairkan dan kurang optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap kesekretariatan Panwaslih Aceh Selatan. Sementara itu untuk dimensi partisipasi, variabel pengawasan masyarakat masuk kategori kerawanan sedang (2,50).

3.2 Provinsi Sumatera Utara

Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat sembilan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 2018, yakni satu pilkada tingkat provinsi dan 8 (delapan) kabupaten/kota. Dari 9 (sembilan) daerah itu, ada 2 (dua) daerah yang masuk dalam kategori kerawanan sedang, yakni Pilkada Provinsi Sumatera Utara dengan indeks kerawanan 2,86 dan Pilkada Kabupaten Dairi dengan indeks kerawanan 2,01. Indeks kerawanan pada seluruh daerah di Sumatera Utara itu bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sumatera Utara



Berdasarkan tabel di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara masuk kategori kerawanan sedang. Hanya saja, jika dilihat kembali, angkanya mendekati kerawanan tinggi. Kontribusi terbesar kerawanan itu berasal dari dimensi penyelenggaraan dengan indeks 3,24, di mana variabel integritas penyelenggara menjadi variabel paling rawan dengan skor 4,00. Dengan kata lain, persoalan integritas penyelenggara menjadi hal paling krusial yang perlu diantisipasi. Jika ditinjau lebih jauh, hal ini tidak lepas dari adanya enam pengaduan terkait penyelenggara (KPU) pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 di mana dua yang diajukan mendapatkan peringatan keras dari DKPP. Kasus serupa juga pernah muncul pada Pilkada 2013 di mana ada dua aduan pada tahapan pencalonan.

Selain soal integritas penyelenggara, dimensi kontestasi perlu diwaspadai karena masuk kategori kerawanan sedang, khususnya pada variabel kampanye dengan indeks kerawanan 5,00. Kerawanan ini muncul bersumber dari temuan materi kampanye yang berbau SARA. Belum lagi juga kasus politik uang serta pelibatan ASN dalam kampanye. Sementara itu untuk dimensi partisipasi, variabel yang perlu diantisipasi adalah terkait persoalan hak pilih (3,00) dan karakteristik lokal (3,00).

Selain di tingkat provinsi, angka kerawanan pada aspek dimensi hingga aspek variabel terekam juga di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Meskipun kerawanannya relatif sedang dan rendah, namun apabila ditelusur lebih dalam ke tingkatan variabel, terlihat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Misalnya ada kecenderungan yang cukup tinggi di variabel integritas penyelenggara. Di Kabupaten Deli Serdang, misalnya, terdapat indeks di angka 4,00 pada variabel integritas penyelenggara. Hal ini karena ada putusan DKPP terkait netralitas penyelenggara. Dari kasus ini tercatat Dua anggota KPU Kabupaten diberhentikan pada pilkada sebelumnya dan Tiga anggota KPU Kabupaten diberhentikan pada Pileg dan Pilpres 2014.

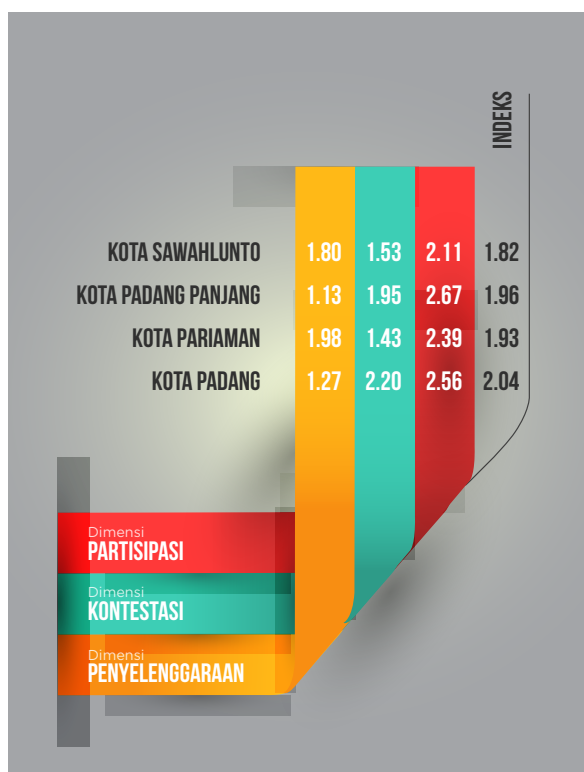
Persoalan integritas muncul dengan adanya kasus pidana yang mengakibatkan anggota panwas diberhentikan secara langsung. Di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mendapat skor (3,00), tercatat ada putusan DKPP yang memberhentikan secara tidak hormat kepada empat komisioner KPU Kabupaten di pilkada sebelumnya. Sementara pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 ditemukan ada anggota KPU Kabupaten yang menjanjikan sesuatu kepada calon legislatif. Di Kabupaten Batu Bara (3,00) juga terdapat hal yang serupa pada variabel integritas penyelenggara di pilkada sebelumnya (2013). Pada konteks

pilkada sebelumnya, DKPP menerbitkan satu keputusan pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Batu Bara, satu anggota KPU diberi peringatan keras, dan tiga anggota KPU lainnya direhabilitasi karena terjadi kelalaian tugas dalam tahapan kampanye.

3.3 Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat hanya akan menyelenggarakan pilkada di empat daerah. Keempat daerah itu hampir seluruhnya masuk dalam kategori kerawanan rendah, kecuali Kota Padang yang masuk kerawanan sedang dengan indeks kerawanan di angka 2,04 dan tiga daerah lainnya memiliki indeks di bawah angka 2. Berikut lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sumatera Barat



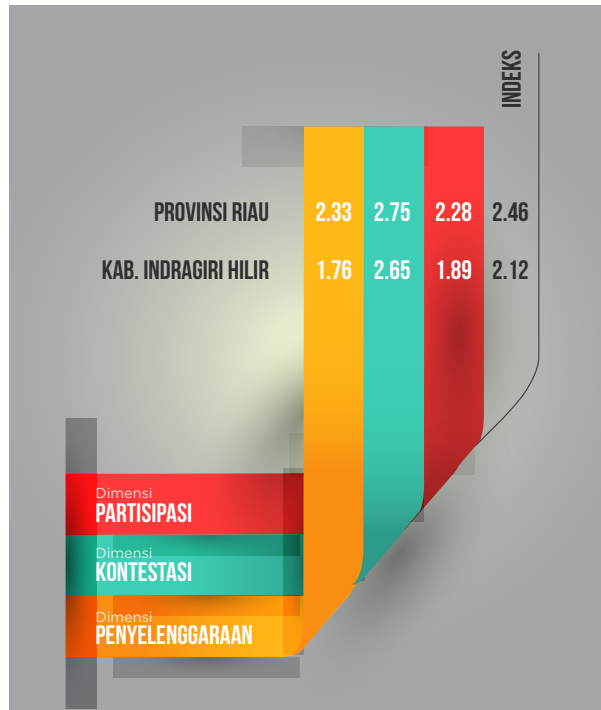
Merujuk tabel di atas, terlihat angka kerawanan di kabupaten/kota di Sumatera Barat hanya berada pada kategori kerawanan sedang dan rendah. Namun apabila diteliti lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang cukup tinggi pada dimensi partisipasi pada semua daerah, yaitu Kota Padang Panjang (2,67), Kota Padang (2,56), Kota Pariaman (2,39), dan Kota Sawahlunto (2,11). Walaupun tidak ada yang mencapai kategori kerawanan tinggi, hal ini tetap perlu mendapat perhatian.

Salah satu faktor utama kerawanan pada dimensi partisipasi adalah masih kurangnya lembaga pemantau/CSO/NGO/ormas yang ikut mengawal pemilu. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap tingginya skor pada variabel pengawasan/kontrol masyarakat. Di semua daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2018, tidak tercatat satupun lembaga pemantau pada pilkada sebelumnya, termasuk di Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Hal itu menjadikan tidak ditemukan adanya laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke lembaga pemantau kepada pengawas pemilu.

3.4 Provinsi Riau

Untuk Provinsi Riau, Pilkada 2018 akan digelar meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua daerah itu masuk dalam kategori kerawanan sedang. IKP pemilihan gubernur/wakil gubernur berada pada angka 2,46, sedangkan pemilihan bupati/wakil bupati Kabupaten Indragiri Hilir berada di indeks 2,12.

Tabel 3.4 IKP Pilkada 2018 Provinsi Riau



Berdasarkan hasil skor keseluruhan dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), Provinsi Riau memiliki skor indeks 2,46 (kerawanan sedang). Nilai dimensi penyelenggaraan 2,33, dimensi kontestasi 2,75, dan untuk dimensi partisipasi berada di angka 2,28. Sebagaimana dengan provinsi, indeks kerawanan di Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki nilai indeks 2,12 (kerawanan sedang). Untuk tiap dimensinya, penyelenggaraan tercatat 1,76, kontestasi 2,65, dan dimensi partisipasi 1,89. Dengan demikian wilayah Provinsi Riau merupakan daerah dengan tingkat kerawanan sedang dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dengan peringkat kerawanan ke-14 dibandingkan provinsi lainnya yang menggelar Pilkada 2018.

Dari data di atas, dimensi kontestasi menempati posisi tertinggi dibandingkan dua dimensi lainnya, khususnya di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir. Data tersebut menandakan kerawanan di dimensi kontestasi perlu diantisipasi dengan baik. Apalagi petahana diprediksi akan maju kembali sebagai calon, baik petahana gubernur maupun bupati. Pada aspek kampanye, misalnya, pada perhelatan pilkada sebelumnya, atau pada kontestasi pileg/pilpres, praktik politik uang jamak terjadi meskipun sulit dibuktikan. Kondisi ini semakin diperparah dengan upaya keterlibatan ASN dalam kampanye dukung mendukung pasangan calon. Hal itu terindikasi dengan adanya informasi bahwa salah satu kepala dinas tingkat provinsi telah mencetak spanduk di seluruh SLTA se-Riau dengan bertuliskan “lanjutkan” yang cenderung menguntungkan pasangan calon dari petahana.

Walaupun dimensi kontestasi berada di peringkat teratas dari sisi kerawanannya pada Pilkada Riau 2018, antisipasi terhadap kerawanan di dimensi penyelenggaraan juga harus diperhatikan. Berkaca dari pengalaman pilkada sebelumnya serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, tercatat ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari sisi integritas, profesionalitas, ataupun etik. Sebagai contoh, pada pilkada sebelumnya salah satu anggota Panwas Kabupaten Bengkalis dan anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu memperoleh sanksi dari DKPP berupa pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu

Sementara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 terdapat beberapa penyelenggara pemilu yang juga diberhentikan, yakni dua anggota Panwas Kota Pekanbaru, salah satu anggota KPU Kota Dumai, salah satu anggota PPK Kecamatan Sungai Mandau.

Terdapat pula misalnya kasus pleno rekapitulasi yang tidak sesuai jadwal yang disepakati di Kabupaten Indragiri Hulu. Antisipasi terhadap profesionalitas penyelenggara juga perlu diperhatikan mengingat pernah terjadi beberapa kali perubahan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan di perhelatan Pilkada 2015 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu juga tidak lepas dari berbagai ancaman atau intimidasi. Salah satunya dialami oleh PPL Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang diserang orang tidak dikenal pada saat Pilkada 2017. Beberapa penyelenggara pemilu juga memperoleh ancaman pembunuhan dari orang tidak dikenal dalam Pilkada 2015 dan Pemilu Legislatif 2014. Tidak sedikit juga terjadi pencurian dan perusakan di KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Rokan Hulu saat Pemilu Legislatif.

Potensi kerawanan Pilkada 2018 di Provinsi Riau terjadi juga dari sisi dukungan pemerintah daerah terhadap anggaran pelaksanaan pemilu dan/atau pengawasan pemilu. Pada pilkada sebelumnya tahun 2013, Bawaslu Provinsi Riau mengajukan anggaran Rp 79 miliar kepada Pemerintah Provinsi Riau, namun pemerintah daerah hanya menganggarkan Rp 5 miliar dalam APBD murni, serta Rp 20 miliar dalam APBD-Perubahan. Anggaran pengawasan pada Pilkada 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai di Panwaslu Kota Dumai hanya Rp 250 juta di APBD. Dari anggaran tersebut, pada 1 (satu) bulan menjelang pemungutan suara baru dicairkan Rp 2 miliar sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan maksimal. Di Kabupaten Kuantan Singingi, untuk Pilkada 2015 Pemerintah Kabupaten hanya menganggarkan Rp 2 miliar dari Rp 7 miliar yang diusulkan. Sementara itu di Pilkada 2015 Kabupaten Rokan Hulu, honor Panwascam dan PPL tidak dianggarkan selama 2 (dua) bulan dan baru dibayarkan pada Desember 2016. Kondisi tersebut tentu membuat kerja-kerja pengawasan menjadi tidak maksimal.

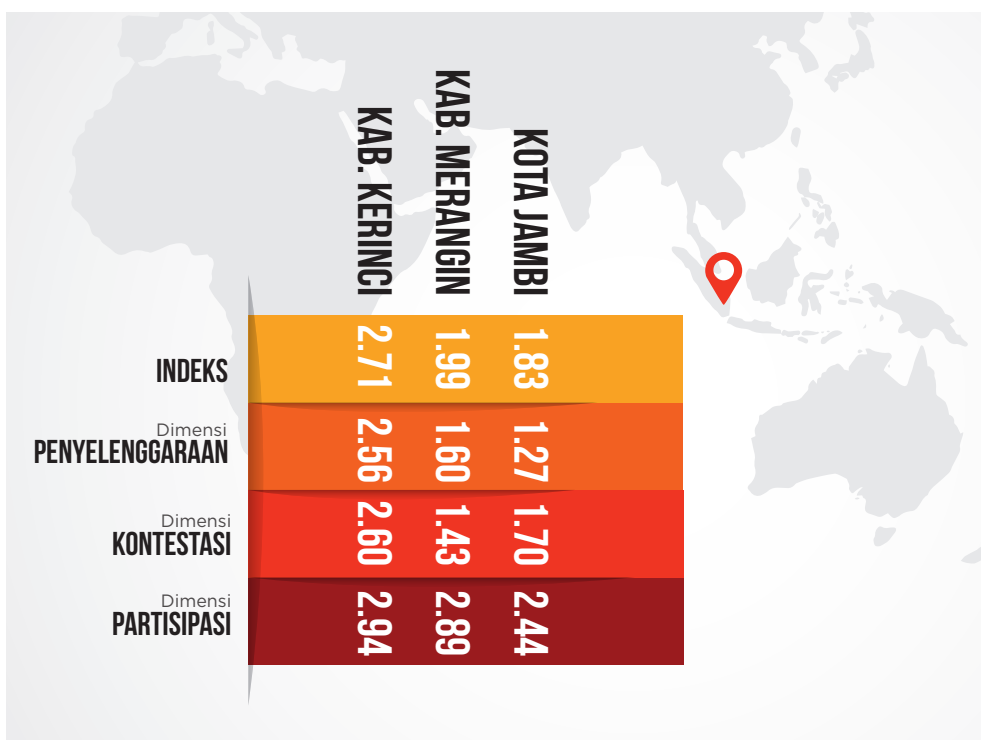
Terakhir yang perlu diperhatikan adalah soal kerawanan politik primordial atau politik yang menggunakan isu SARA yang menguat pada satu dasawarsa ini di Provinsi Riau. Isu yang muncul misalnya mengenai putra daerah dan non daerah. Isu ini berpotensi mencuat di Pilkada 2018 nanti. Selain itu, pencermatan juga perlu dilakukan terhadap hubungan kekerabatan dalam relasi politik lokal di Riau. Pada momentum Pilkada 2013 misalnya, adik Bupati Indragiri Hilir mencalonkan diri sebagai bakal kandidat Gubernur Riau. Pada Pilkada tahun 2015, keponakan bupati

petahana menjadi salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara pada Pilkada 2017, anak bupati petahana menjadi calon Bupati Kampar. Kekerabatan di jalur politik lokal juga terjadi antara kepala daerah dan penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah keponakan Bupati Rokan Hulu yang menjadi anggota KPU Rokan Hulu periode 2014-2019.

3.5 Provinsi Jambi

Provinsi Jambi akan menyelenggarakan pilkada di tiga daerah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Kabupaten yang berada pada kategori kerawanan sedang adalah Kabupaten Kerinci (2,71). Sedangkan Kota Jambil (1,83) dan Kabupaten Merangin (1,99) berada di tingkat kerawanan rendah. Lebih lanjut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5 IKP Pilkada 2018 Provinsi Jambi



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kerawanan untuk keseluruhan daerah di Provinsi Jambi tidak masuk dalam kerawanan tinggi. Akan tetapi, untuk Kabupaten Kerinci ketiga dimensinya memiliki skor yang mendekati kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan (2,56), dimensi kontestasi (2,60), dan dimensi partisipasi (2,94). Sementara untuk dimensi partisipasi, semua daerah memiliki kecenderungan yang sama di mana tingkat kerawanannya relatif tinggi, yakni Kabupaten Kerinci (2,94), Kabupaten Merangin (2,89), dan Kota Jambi (2,44).

Dimensi penyelenggaraan di Kabupaten Kerinci mendapat skor 2,56 di mana hal ini terkait variabel integritas dan profesionalitas penyelenggara. Pada pilkada sebelumnya, DKPP memberhentikan 5 (lima) anggota KPU Kerinci dan 2 (dua) anggota Panwas. Selanjutnya pada dimensi kontestasi variabel yang dominan adalah variabel pencalonan (3,40), kampanye (3,00), dan kontestan (3,00). Pada variabel pencalonan ditemukan adanya dukungan ganda pada pencalonan perseorangan, namun akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, ada juga diskualifikasi pasangan calon oleh KPU Kabupaten dan adanya bakal calon dari petahana pada pilkada sebelumnya. Kemudian pada variabel kampanye, di tengah-tengah masyarakat menjelang Pilkada 2018 muncul isu kesukuan. Pada variabel kontestasi tercatat tinggi karena pernah terjadi bentrok antar-tim sukses di pilkada sebelumnya hingga berujung tindakan anarkis pembakaran rumah warga.

Sementara itu untuk dimensi partisipasi, pola yang terlihat cukup seragam, yakni tingginya skor ketiga daerah ini. Hal ini dikarenakan besarnya kerawanan pada variabel pengawasan/kontrol masyarakat. Pada momentum elektoral sebelumnya, data yang masuk ke tim peneliti, sama sekali tidak ada lembaga pemantau/CSO/NGO/ormas yang ikut dalam pengawasan pemilu. Kondisi itu menjadi potret nihilnya laporan pengawasan yang diterima panwaslu kabupaten/kota dari lembaga pemantau terkait kegiatan pengawasan pemilu.

3.6 Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan pilkada di 10 daerah, yang terdiri atas satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, empat daerah memilih walikota dan wakil walikota, dan lima daerah menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dilihat dari indeks kerawanannya, tiga daerah masuk dalam kategori kerawanan sedang

dan selebihnya merupakan daerah dengan kerawanan rendah. Ketiga daerah yang masuk dalam kerawanan sedang antara lain pilkada tingkat provinsi (2,55), Pilkada Kabupaten Empat Lawang (2,23), dan Pilkada Kota Palembang (2,11). Secara lengkap skor kerawanan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sumatera Selatan

| | KAB. OGAN KOMERING ILIR | KAB. LAHAT | KAB. BANYUASIN | KAB. EMPAT LAWANG | KAB. MUARA ENIM | KOTA PALEMBANG | KOTA PRABUMULIH | KOTA PAGAR ALAM | KOTA LUBUK LINGGAU | PROVINSI SUMATERA SELATAN |
|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| INDEKS | 1.70 | 1.64 | 1.83 | 2.23 | 1.76 | 2.11 | 1.91 | 1.90 | 1.80 | 2.55 |
| Dimensi PENYELENGGARAAN | 1.13 | 1.49 | 1.62 | 2.42 | 1.49 | 2.04 | 1.13 | 1.80 | 1.27 | 2.22 |
| Dimensi KONTESTASI | 1.33 | 1.20 | 2.28 | 2.90 | 1.85 | 2.00 | 2.27 | 2.32 | 1.62 | 2.78 |
| Dimensi PARTISIPASI | 2.56 | 2.22 | 1.56 | 1.39 | 1.89 | 2.28 | 2.22 | 1.56 | 2.44 | 2.61 |

Indeks kerawanan untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan termasuk paling tinggi dibanding sembilan pilkada kabupaten/kota lainnya. Antisipasi kerawanan perlu diperhatikan pada dimensi kontestasi yang memperoleh indeks cukup tinggi, meskipun masih masuk dalam kategori kerawanan sedang (2,78). Pada dimensi kontestasi, variabel kampanye justru masuk kategori kerawanan tinggi (4,33) yang dikontribusikan dari praktik politik uang pada Pilkada 2013. Selain itu, juga ditemukan adanya pelibatan ASN dalam kegiatan salah

satu pasangan calon, termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas negara seperti penggunaan mobil dinas.

Selanjutnya pada dimensi partisipasi masuk kategori kerawanan sedang agak tinggi (2,61). Dimensi ini dikontribusikan dari variabel pengawasan/kontrol masyarakat dengan indeks kerawanan cukup tinggi (3,50). Faktor utama yang berkontribusi pada indeks kerawanan tinggi karena tidak adanya lembaga pemantau/CSO/NGO/ormas yang melakukan advokasi dan pengawasan, baik pada pelaksanaan pilkada sebelumnya maupun Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. Selain itu, partisipasi pemilih berkebutuhan khusus atau difabel yang menggunakan hak pilih juga rendah, yakni hanya sampai 30 persen dari total pemilih kelompok ini.

Pada dimensi penyelenggaraan, indeksnya masuk dalam kategori kerawanan sedang (2,22) yang disumbang dari variabel profesionalitas penyelenggara (3,00) yang masuk dalam kerawanan tinggi. Hal ini dikarenakan pada Pemilu 2014 terdapat aduan ke DKPP untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sementara di pilkada sebelumnya pada tahun 2013 terdapat kasus kelalaian oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam tahapan penetapan pasangan calon yang berimbas pada lahirnya teguran dari DKPP.

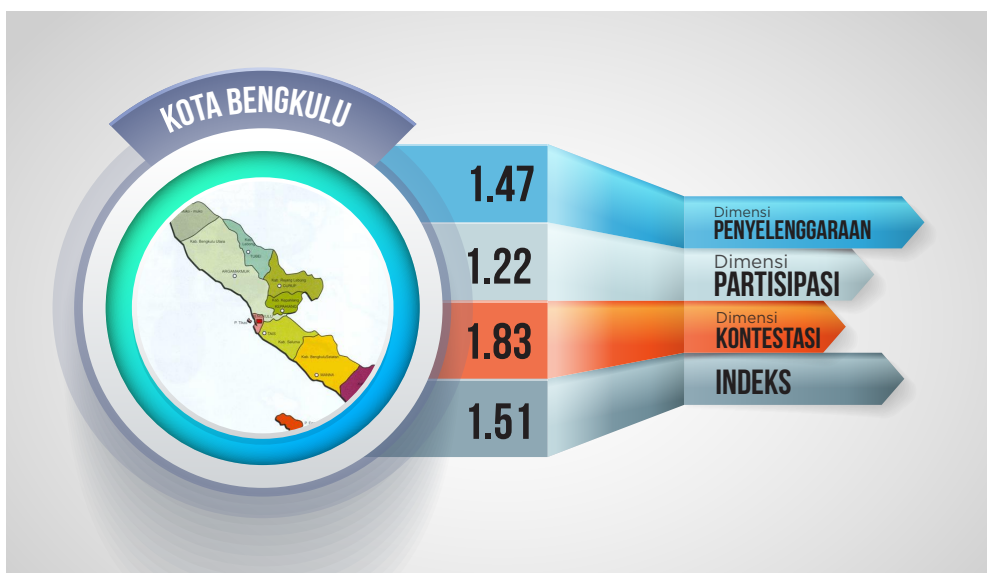
Selain pemilihan tingkat provinsi, kabupaten/kota di Sumatera Selatan perlu perhatian pada beberapa variabel. Selanjutnya untuk dimensi secara keseluruhan kabupaten/kota tidak terlalu tinggi atau masuk dalam kategori rawan sedang dan rendah. Variabel yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan yang cukup tinggi pada variabel kampanye dan pengawasan/kontrol masyarakat. Pada variabel kampanye, terdapat lima kabupaten/kota yang memiliki skor kerawanan tinggi, sedangkan di variabel pengawasan/kontrol masyarakat terdapat enam kabupaten/kota yang memiliki skor kerawanan tinggi.

Pola yang terlihat pada variabel kampanye cenderung sama. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ditemukan ASN yang terlibat pada kegiatan kampanye, bahkan sampai pada tingkat memfasilitasi pasangan calon. Penggunaan fasilitas negara pun tak terelakkan, seperti penggunaan mobil dinas dan gedung pemerintah daerah yang kerap kali disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Begitu juga yang terjadi di variabel pengawasan/kontrol masyarakat, polanya cenderung sama. Mayoritas kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga tidak memiliki lembaga pemantau/CSO/NGO/ormas yang ikut mengawal pemilu.

3.7 Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu hanya akan menyelenggarakan pilkada di Kota Bengkulu. Dilihat dari indeks kerawannya, Kota Bengkulu masuk kategori rawan rendah dengan indeks kerawanan 1,51. Rincian lebih lanjut bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 IKP Pilkada 2018 Provinsi Bengkulu



Indeks kerawanan di Kota Bengkulu tidak menunjukkan adanya dimensi dengan kerawanan rendah ataupun tinggi. Akan tetapi terlihat skor kerawanan di dimensi kontestasi menonjol dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini disebabkan adanya angka kerawanan tinggi (3,00) di variabel kampanye. Tercatat pada pilkada sebelumnya dan Pemilu 2014 terdapat selebaran yang beredar di jalanan yang isinya menyerang salah satu pasangan calon.

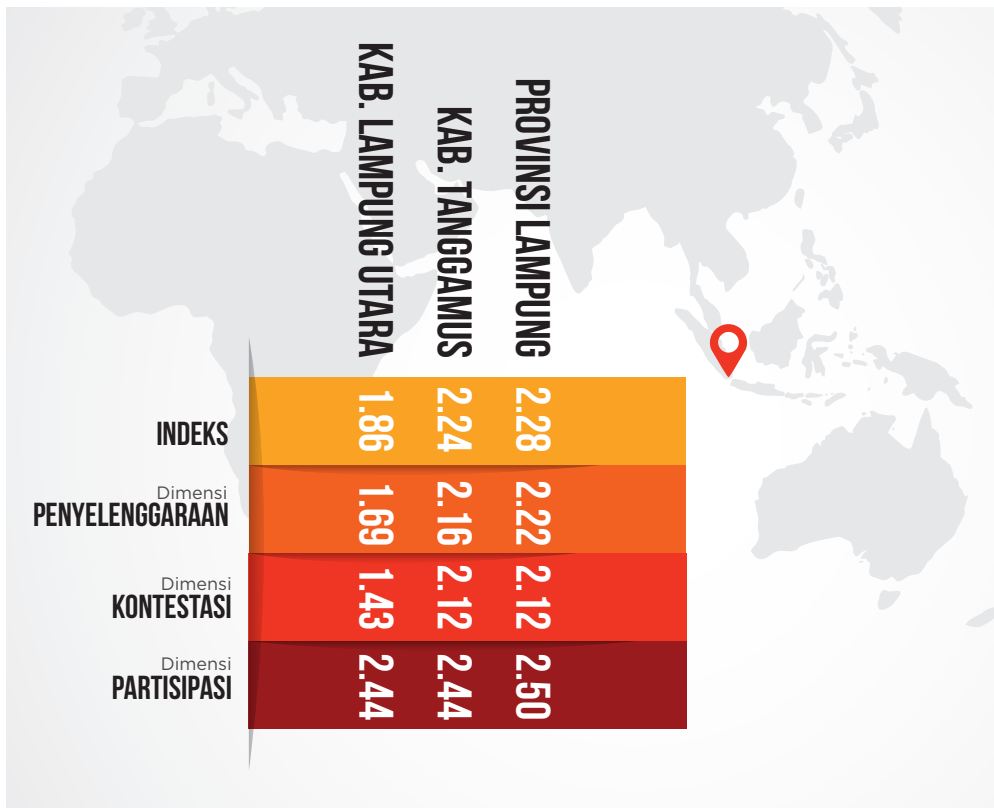
Data yang berhasil dihimpun peneliti, terdapat juga praktik politik uang meski sulit dalam pembuktiannya. Sementara terkait ASN, ada satu kasus di mana salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi aktif dalam kegiatan kampanye untuk salah satu pasangan calon. Hal ini sudah ditindaklanjuti ke instansi terkait. Selanjutnya untuk variabel integritas penyelenggara, terlihat juga angka yang cukup tinggi apabila

dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu (2,00). Hal ini bersumber dari adanya kasus pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait ketidaknetralan sebagai penyelenggara.

3.8 Provinsi Lampung

Di Provinsi Lampung akan digelar tiga pemilihan, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan dua pemilihan bupati dan wakil bupati. Indeks kerawanan untuk pemilihan tingkat provinsi masuk kategori rawan sedang (2,28). Hal yang sama juga tercatat pada dua kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Kabupaten Tanggamus masuk dalam kelompok daerah dengan kerawanan sedang (2,24) dan Kabupaten Lampung Utara kerawanan rendah (1,86). Lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 IKP Pilkada 2018 Provinsi Lampung



Potensi kerawanan tertinggi di Provinsi Lampung terdapat pada dimensi partisipasi (2,50) di mana variabel pengawasan masyarakat menunjukkan indeks cukup tinggi (3,50). Hal ini diikuti variabel hak pilih (3,00). Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya lembaga pemantau, NGO, ataupun CSO yang melakukan pemantauan dan memberikan laporan. Sementara itu pada dimensi penyelenggara (2,22), variabel integritas (2,00), dan profesionalitas penyelenggara (3,00) perlu diantisipasi potensi kerawannya. Putusan DKPP menyatakan Bawaslu Provinsi Lampung lalai dalam penindakan pelanggaran pembagian gula oleh salah satu pasangan calon Gubernur Lampung pada pilkada sebelumnya. Ditambah lagi, pada Pemilu Legislatif 2014 terdapat putusan DKPP yang menyatakan PPK dan Panwaslu di Tulang Bawang Barat diberhentikan sementara.

Pada dimensi kontestasi (2,12) perlu diantisipasi potensi rawan dalam variabel kampanye, yakni penggunaan materi kampanye yang mengandung isu SARA, fitnah (*hoax*), hasutan, dan adu domba. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, penyalahgunaan media sosial untuk kampanye jahat terjadi di Lampung. Penggunaan politik uang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya dengan modus pembagian bahan keperluan pokok berupa gula oleh calon gubernur dan calon anggota legislatif perlu diantisipasi agar tidak berulang pada Pilkada 2018. Untuk variabel kontestasi (2,00), kemungkinan pencalonan petahana juga perlu mendapat perhatian.

Sementara itu indeks kerawanan untuk Kabupaten Tanggamus perlu antisipasi pada dimensi penyelenggaraan (2,16), khususnya variabel integritas penyelenggara (3,00) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Hal ini dikarenakan pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 terdapat kasus pidana yang dilakukan PPK Kecamatan Semaka dan PPS Kecamatan Talang Padang. Pencairan anggaran pilkada yang dibagi menjadi tiga termin juga perlu diantisipasi kerawannya. Pada dimensi kontestasi (2,12), variabel kekerabatan berpotensi rawan. Petahana diperkirakan akan kembali mencalonkan diri dengan pasangan yang berbeda. Selanjutnya untuk dimensi partisipasi (2,44), tidak adanya advokasi dan laporan dari lembaga pemantau, NGO, ataupun CSO terkait pengawasan pemilu juga berpotensi menimbulkan kerawanan.

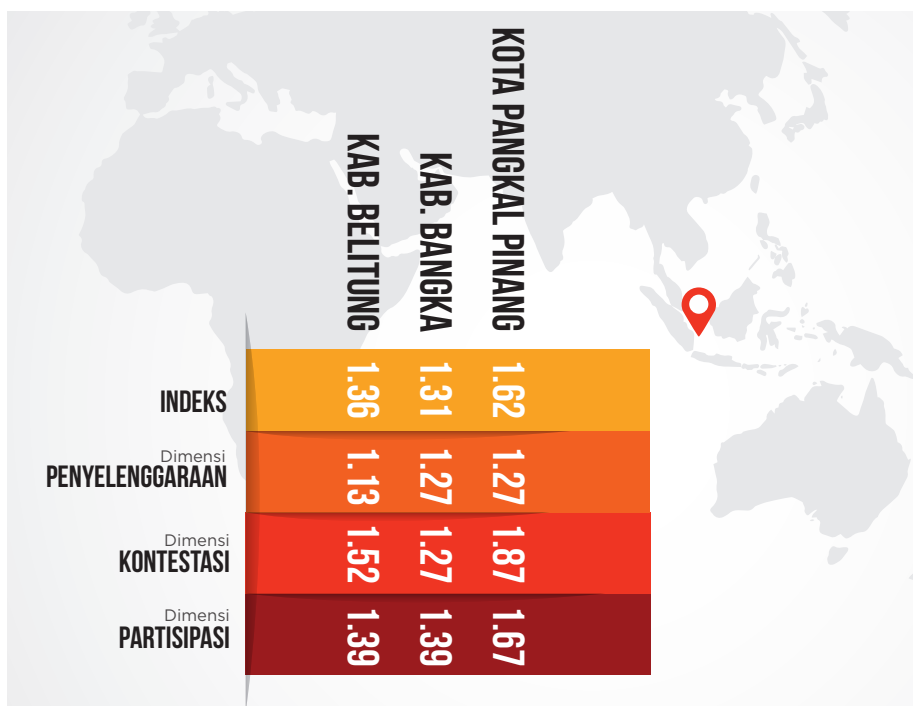
Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Lampung Utara. Secara keseluruhan kabupaten ini memang masuk kerawanan rendah, namun untuk dimensi partisipasi masuk kerawanan sedang (2,44). Hal ini karena indeks kerawanan pada variabel pengawasan masyarakat cukup

tinggi (3,00) dan dikontribusikan dengan tidak adanya laporan dari pemantau kepada pengawas pemilu. Lembaga pemantau memang berpartisipasi melakukan pemantauan, namun tidak melakukan advokasi untuk mendorong ditindaklanjutinya penanganan pelanggaran. Pada dimensi kontestasi, khususnya variabel kampanye, perlu mendapatkan perhatian karena kasus-kasus politik uang seperti terjadi pada pilkada sebelumnya. Sebut saja kasus pembagian bahan kebutuhan pokok oleh aparat sipil negara yang kemudian diproses secara hukum sampai pada putusan final di Pengadilan Negeri Lampung Utara. Sementara itu untuk dimensi penyelenggaraan, variabel kekerasan terhadap penyelenggara perlu dicermati. Pada pemilihan sebelumnya, intimidasi terhadap penyelenggara cenderung terjadi lebih dari tiga kali.

3.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Meskipun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menyelenggarakan pilkada, namun di provinsi ini terdapat tiga kabupaten/kota yang akan pilkada. Berdasarkan indeks kerawanan pilkada, ketiga daerah ini memiliki indeks kerawanan rendah. Data utuhnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 IKP Pilkada 2018 Provinsi Bangka Belitung



Dari ketiga daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, Kota Pangkal Pinang masuk dalam kategori kerawanan rendah, dengan variabel pencalonan di dimensi kontestasi perlu mendapat perhatian khusus. Catatan itu penting mengingat adanya kasus diskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pada pilkada sebelumnya. Tidak tertutup kemungkinan kasus serupa di variabel ini dapat terulang kembali pada Pilkada 2018. Kasus diskualifikasi ini muncul akibat kelalaian KPU Kota Pangkal Pinang yang meloloskan syarat administrasi pasangan calon tertentu. Padahal secara faktual pasangan calon tersebut tidak seharusnya lolos administrasi. Akhirnya pengawas merekomendasikan diskualifikasi pada pasangan calon tersebut. Peristiwa itu berlanjut secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun pasangan calon tersebut menggugat putusan diskualifikasi di PTUN, mereka tetap tidak bisa maju sebagai pasangan calon.

3.10 Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Kepulauan Riau hanya akan mengelat satu pilkada di tingkat kota, yaitu Pilkada Kota Tanjung Pinang. Indeks kerawanan yang diperoleh Kota Tanjung Pinang adalah kerawanan sedang (2,09). Dilihat dari dimensi kerawanannya, dimensi penyelenggaraan menempati posisi paling rendah (1,96), disusul dimensi partisipasi di tingkat sedang (2,00), dan posisi teratas ditempati oleh dimensi kontestasi dengan angka 2,28.

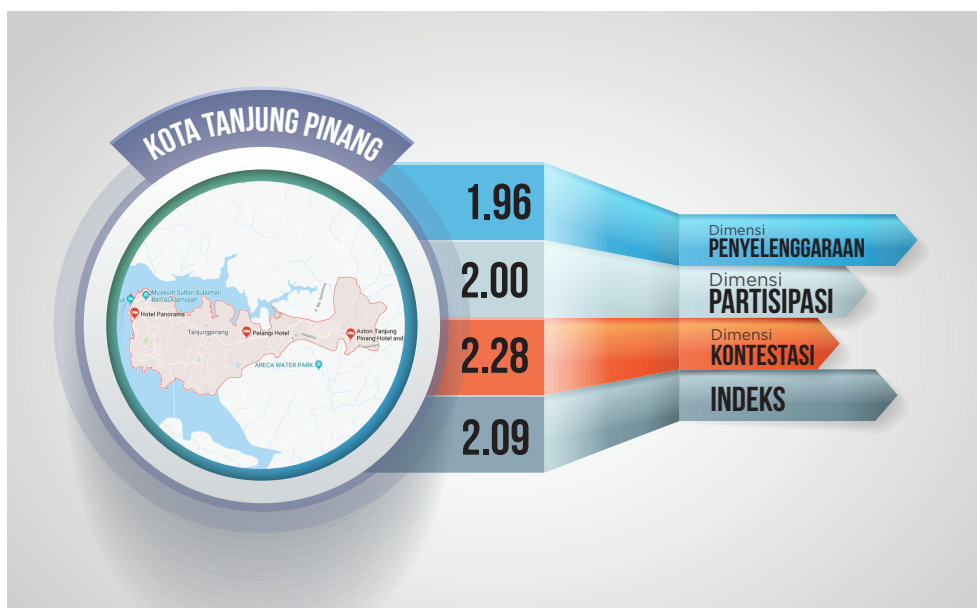
Tingginya kontribusi dimensi kontestasi yang menempatkan Kota Tanjung Pinang di kerawanan sedang, salah satunya dipengaruhi adanya prediksi petahana yang akan maju sendiri-sendiri atau pecah kongsi. Pertarungan di internal petahana tersebut akan berpotensi menciptakan kerawanan pada dimensi kontestasi. Apalagi jika dilihat dari pengalaman pilkada sebelumnya, ASN diduga ikut terlibat dalam praktik kampanye untuk memenangkan petahana. Sebagai misal, pada Pemilihan Gubernur tahun 2015, terdapat ASN yang mengundang salah satu calon untuk kampanye tatap muka dan ikut membagikan stiker calon tersebut. Jika dua petahana tersebut saling bersaing, ASN berpotensi untuk terlibat kembali dalam kegiatan dukung-mendukung pasangan calon.

Keberadaan dimensi kontestasi yang menempati posisi teratas di IKP Pilkada Kota Tanjung Pinang, tentu harus lebih diperhatikan terkait potensi kerawanannya, meskipun tetap harus memperhatikan dua dimensi lainnya, yakni partisipasi dan penyelenggaraan. Pada dimensi

partisipasi sebagai contoh, para pemangku kepentingan juga perlu melakukan antisipasi. Salah satu faktornya adalah tidak pernah ada advokasi dan laporan pemantauan secara resmi oleh lembaga pemantau atau dari kelompok masyarakat sipil lain yang peduli terhadap eksistensi pemilu di Tanjung Pinang.

Meskipun dimensi penyelenggaraan menempati posisi terendah, yakni di angka 1,96, terdapat catatan yang tidak bisa diabaikan. Pada pilkada sebelumnya, ada putusan DKPP yang memberhentikan tetap anggota panwas. Tentu putusan tersebut memberi peringatan bahwa terdapat persoalan integritas di dimensi penyelenggaraan. Patut ditambahkan pula, kasus kekerasan terhadap penyelenggara juga pernah terjadi 1-3 kali kejadian. Beberapa kejadian intimidasi juga pernah terjadi yang dialamatkan kepada penyelenggara pemilu. Terdapat pula analisis bahwa fenomena politik SARA di Pilkada DKI Jakarta akan berimbas di Pilkada Kota Tanjung Pinang. Dengan demikian, walaupun secara umum Pilkada Kota Tanjung Pinang berada di tingkat kerawanan sedang, namun potensi-potensi kerawanan dapat saja terjadi melebihi peringkat sedang. Berikut ini disajikan tabel indeks kerawanan pemilu di Pilkada Kota Tanjung Pinang tahun 2018.

Tabel 3.10 IKP Pilkada 2018 Provinsi Kepulauan Riau



3.11 Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Pilkada 2018 di tingkat provinsi dan 16 kabupaten/kota. Secara umum indeks kerawanan di provinsi ini masuk kategori kerawanan sedang dan rendah. Kerawanan sedang hanya di beberapa tempat, yakni pilkada provinsi (2,52), Kota Bogor (2,02), Kabupaten Bogor (2,23), Kabupaten Garut (2,22), dan Kabupaten Ciamis (2,11). Selebihnya, daerah di Jawa Barat masuk dalam kategori kerawanan rendah. Indeks kerawanan pemilu di Provinsi Jawa Barat bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 IKP Pilkada 2018 Provinsi Jawa Barat

| | KAB. CIAMIS | KAB. CIREBON | KAB. GARUT | KAB. BOGOR | KAB. SUBANG | KAB. MAJALENGKA | KAB. KUNINGAN | KAB. SUMEDANG | KAB. BANDUNG BARAT | KAB. PURWAKARTA | KOTA BANJAR | KOTA BANDUNG | KOTA SUKABUMI | KOTA CIREBON | KOTA BEKASI | PROVINSI JAWA BARAT |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------------|
| INDEKS | 2.11 | 1.87 | 2.22 | 2.23 | 1.79 | 1.12 | 1.78 | 1.33 | 1.52 | 1.82 | 1.90 | 1.68 | 1.89 | 1.21 | 1.55 | 2.52 |
| Dimensi PENYELENGGARAAN | 1.27 | 1.82 | 2.07 | 2.40 | 1.62 | 1.27 | 1.13 | 1.27 | 1.13 | 1.93 | 1.93 | 1.13 | 1.93 | 1.40 | 1.96 | 2.44 |
| Dimensi KONTESTASI | 2.40 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | 1.95 | 1.10 | 2.50 | 1.37 | 1.70 | 1.53 | 2.10 | 1.60 | 1.68 | 1.10 | 1.20 | 2.65 |
| Dimensi PARTISIPASI | 2.56 | 2.11 | 2.61 | 2.06 | 1.78 | 1.00 | 1.61 | 1.33 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 2.22 | 2.06 | 1.17 | 1.56 | 2.44 |

Pilkada Jawa Barat 2018 diprediksi akan menjadi pusat perhatian publik. Provinsi ini memiliki jumlah pemilih terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Jawa Barat juga menjadi ajang pertarungan dua kekuatan politik saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Meskipun secara umum indeks kerawanan di provinsi ini masuk kategori kerawanan sedang, bukan berarti tertutup kemungkinan potensi kerawanan yang lebih tinggi.

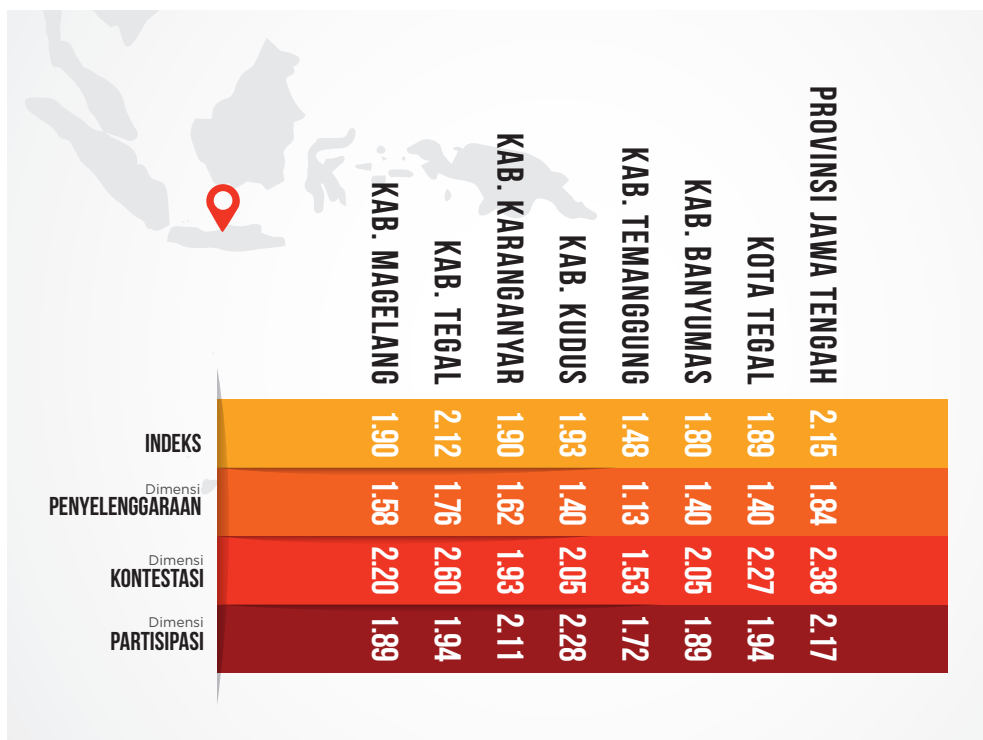
Jika dilihat dari angka indeksinya, di Provinsi Jawa Barat cukup merata di semua dimensi, baik di dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Pada dimensi penyelenggaraan, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut masuk dalam kerawanan sedang. Sementara dimensi kontestasi masuk dalam kerawanan sedang yang terdapat di beberapa daerah seperti Kota Banjar, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Ciamis. Kemudian dimensi partisipasi secara umum ada di tingkat kerawanan sedang yang terdapat di beberapa daerah seperti Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Ciamis. Selebihnya, seluruh dimensi di kabupaten/kota tersebut dalam kerawanan rendah.

Kerawanan sedang ini muncul dalam pilkada sebelumnya maupun di Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Ada beberapa kasus pelanggaran kode etik pada Pilkada 2013, baik terhadap anggota Panwasdam di Kota Banjar, anggota KPU di Kabupaten Garut, serta muncul juga kasus pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 terhadap KPU Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur. Kasus lainnya yang muncul adalah kekerasan fisik dan intimidasi pada Pilkada 2013 serta Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Persoalan kampanye SARA/fitnah juga muncul dalam Pilkada 2013.

3.12 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, satu pemilihan walikota/wakil walikota dan enam pemilihan bupati/wakil bupati. Dilihat dari indeks kerawanannya, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal masuk kategori rawan sedang dengan indeks 2,15 dan 2,12. Sementara daerah lainnya masuk kategori rawan rendah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 IKP Pilkada 2018 Provinsi Jawa Tengah



Provinsi Jawa Tengah dengan indeks kerawanan 2,15 masuk dalam kategori rawan sedang. Hal yang perlu diantisipasi adalah dimensi kontestasi (2,38) pada variabel kekerabatan (3,00). Data yang berhasil dihimpun, terdapat pencalonan istri petahana Bupati Klaten dan Pekalongan pada pilkada sebelumnya. Selain itu, variabel kampanye (2,33) juga perlu diperhatikan kerawanannya di mana pada pilkada sebelumnya terjadi pelibatan ASN dalam kampanye di Kabupaten Pemalang, Cilacap, dan Wonosobo.

Di Kabupaten Cilacap, petahana melakukan mutasi jabatan saat pilkada. Dilihat dari dimensi partisipasi (2,17) terhadap variabel hak pilih (3,00) perlu diantisipasi khususnya terkait tingkat partisipasi pemilih yang pada pilkada sebelumnya kurang dari 50 persen disertai dengan tingginya jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hingga 3 persen. Sementara itu untuk dimensi penyelenggaraan (1,84), perlu diantisipasi kerawanan pada variabel kekerasan terhadap penyelenggara (2,33). Kasus yang terjadi pada Pilkada Pekalongan tahun 2015, seorang panwas diserang saat melakukan penertiban alat peraga kampanye.

Sementara itu, Kota Tegal berada pada tingkat kerawanan 1,89, dengan dimensi kontestasi (2,27) perlu diantisipasi pada Pilkada 2018, khususnya terkait variabel kekerabatan (5,00). Pada pilkada sebelumnya, Wali Kota Tegal petahana merupakan adik Bupati Kabupaten Brebes dan calon Bupati Kabupaten Tegal. Untuk dimensi partisipasi (1,94), potensi kerawanan muncul pada variabel pengawasan masyarakat (2,50). Hal ini karena pada pilkada sebelumnya tidak ada laporan pelanggaran dari pemantau yang dilaporkan kepada pengawas pemilu. Selanjutnya untuk dimensi penyelenggaraan (1,40) perlu diantisipasi pada variabel profesionalitas penyelenggara (2,20) . Hal ini terkait penyediaan TPS akses bagi penyandang disabilitas.

Di Kabupaten Banyumas, dengan angka kerawanan 1,80 perlu diantisipasi potensi kerawanan pada dimensi kontestasi (2,05). Kerawanan tertinggi pada dimensi ini terdapat pada variabel kampanye (3,00) terkait kasus penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas pada pilkada sebelumnya. Sementara itu untuk dimensi partisipasi (1,89) perlu diantisipasi variabel pengawasan masyarakat (3,00) karena ketiadaan lembaga pemantau yang melakukan advokasi ataupun laporan pemantauan kepada Panwas. Selanjutnya dalam dimensi penyelenggaraan (1,40), potensi rawan muncul pada variabel profesionalitas penyelenggara (2,20).

Kemudian Kabupaten Temanggung, yang meskipun tergolong dalam kerawanan rendah (1,48), perlu diantisipasi potensi kerawanannya, khususnya pada dimensi partisipasi (1,72). Pada variabel pengawasan masyarakat (2,50) potensi kerawanan ditopang oleh tidak adanya laporan dan advokasi dari lembaga pemantau pemilu. Dalam dimensi kontestasi (1,53), perlu diantisipasi variabel kampanye (2,33) terkait penggunaan kendaraan dinas dan praktik politik uang pada pilkada sebelumnya. Sementara untuk dimensi penyelenggaraan (1,13), variabel profesionalitas penyelenggara (1,40) perlu diantisipasi, khususnya terkait ketidakpastian hukum akibat kebijakan penyelenggara yang berubah-ubah lebih dari dua kali.

Sementara itu di Kabupaten Kudus, angka kerawanan 1,93 masuk dalam kategori kerawanan rendah. Namun tetap perlu diantisipasi pada dimensi partisipasi (2,28) terhadap variabel pengawasan masyarakat (2,50) dimana tidak ada laporan dari pemantau pemilu. Untuk dimensi kontestasi (2,05) perlu diantisipasi pada variabel kampanye (3,00) atas kasus pembagian sembako dan penggunaan kendaraan dinas saat kampanye. Adapun pada dimensi penyelenggaraan (1,40),

variabel profesionalitas penyelenggara (2,20) perlu diantisipasi terkait penyediaan akses bagi penyandang disabilitas di TPS.

Pilkada Karanganyar 2018 tergolong pada tingkat kerawanan rendah (1,90). Potensi kerawanan di Kabupaten Karanganyar tetap perlu diantisipasi, khususnya pada dimensi partisipasi (2,11). Ketiadaan pemantau pemilu yang melakukan advokasi dan pelaporan kepada panwas berpotensi menimbulkan kerawanan. Untuk dimensi kontestasi (1,93) perlu diantisipasi pada variabel pencalonan (3,40) terkait dukungan ganda pencalonan perseorangan dan diskualifikasi calon pada pilkada sebelumnya. Sedangkan untuk dimensi penyelenggaraan (1,62), potensi rawan perlu diantisipasi pada variabel profesionalitas penyelenggara (2,20) karena keterlambatan penandatanganan NPHD antara Panwaslu Kabupaten dengan Bupati Karanganyar.


Kabupaten Tegal mendapatkan angka indeks 2,12, menjadikan Tegal masuk dalam kategori rawan sedang sehingga perlu diantisipasi dari dimensi kontestasi (2,60), khususnya pada variabel kekerabatan (5,00) dan kampanye (3,00). Di Kabupaten Tegal sangat banyak terjadi praktik politik uang meskipun pada proses pembuktian sampai ke persidangan dan mendapatkan vonis hanya satu kasus, yaitu yang terjadi di wilayah Kecamatan Balapulang. Dari unsur kekerabatan, pada pilkada sebelumnya terdapat pasangan memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Brebes, Wakil Bupati Pemalang dan Wali Kota Tegal. Untuk dimensi partisipasi (1,94) di Kabupaten Tegal, perlu diantisipasi pada variabel pengawasan masyarakat (2,50) karena tidak adanya laporan pengawasan dari lembaga pemantau pemilu. Sementara untuk dimensi penyelenggaraan (1,76), berpotensi rawan pada variabel profesionalitas penyelenggara (2,60) terkait penyediaan TPS akses bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya di Kabupaten Magelang, dengan angka kerawanan 1,90 perlu diantisipasi potensi kerawanan pada dimensi kontestasi (2,20), khususnya pada variabel kampanye (5,00). Hal ini terkait politik uang pada pilkada dan Pemilu Legislatif dan Presiden serta pemanfaatan fasilitas negara serta ASN sebagai tim sukses petahana pada pilkada sebelumnya. Sementara itu untuk dimensi partisipasi (1,89) potensi rawan muncul dari variabel pengawasan masyarakat (2,00) karena tidak adanya laporan pemantauan dari lembaga pemantau pemilu. Untuk dimensi penyelenggaraan (1,58) perlu diantisipasi variabel kekerasan terhadap penyelenggara (2,33). Hal ini penting karena pernah ada catatan pemukulan anggota panwas saat menertibkan alat peraga kampanye pada pilkada sebelumnya serta Pemilu Legislatif dan Presiden 2014.

3.13 Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pilkada di 19 daerah dan tercatat menjadi wilayah dengan jumlah penyelenggaraan pilkada terbanyak di Indonesia pada tahun 2018. Hajatan politiknya terdiri atas pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 13 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan lima pemilihan walikota dan wakil walikota. Indeks kerawanan di provinsi ini beragam, namun tidak satupun berada di kerawanan tinggi. Meskipun demikian, potensi konflik tetap saja tidak bisa dinafikan. Pengalaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2008 yang sampai diulang tiga kali di sejumlah kabupaten/kota di Madura menjadi catatan kerawanan tersendiri di wilayah ini. Apalagi, nama-nama kontestan di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak jauh berbeda dengan kontestasi di 2008 dan 2013. Catatan tadi menjadi perhatian meskipun secara umum indeks kerawanan Pilkada Provinsi Jawa Timur masuk kategori rawan sedang (2,68). Berikut ini data indeks dari seluruh wilayah di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada 2018.

Tabel 3.13 IKP Pilkada 2018 Provinsi Jawa Timur



| | KAB. JOMBANG | KAB. BONDOWOSO | KAB. LUMAJANG | KAB. MADJUN | KAB. MAGETAN | KAB. PASURUAN | KAB. TULUNG AGUNG | KAB. PAMEKASAN | KAB. NGANJUK | KAB. BOJONEGORO | KAB. BANGKALAN | KAB. SAMPIANG | KAB. PROBOLINGGO | KOTA MADJUN | KOTA KEDIRI | KOTA PROBOLINGGO | KOTA MOJOKERTO | KOTA MALANG | PROVINSI JAWA TIMUR |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|
| INDEKS | 1.79 | 1.87 | 1.89 | 1.57 | 1.40 | 2.11 | 1.83 | 1.95 | 1.22 | 1.58 | 1.49 | 1.78 | 2.10 | 1.57 | 1.54 | 1.57 | 1.69 | 1.44 | 2.68 |
| Dimensi PENYELENGGARAAN | 1.13 | 2.18 | 1.87 | 2.16 | 1.60 | 2.31 | 1.98 | 1.82 | 1.13 | 1.27 | 1.40 | 1.93 | 1.69 | 2.04 | 1.49 | 1.36 | 1.89 | 1.13 | 2.76 |
| Dimensi KONTESTASI | 2.63 | 1.27 | 1.92 | 1.47 | 1.42 | 2.72 | 1.75 | 1.95 | 1.50 | 1.37 | 1.33 | 1.75 | 2.48 | 1.57 | 2.13 | 1.67 | 1.43 | 1.43 | 2.92 |
| Dimensi PARTISIPASI | 1.50 | 2.22 | 1.89 | 1.17 | 1.22 | 1.33 | 1.78 | 2.06 | 1.00 | 2.06 | 1.72 | 1.67 | 2.06 | 1.17 | 1.00 | 1.67 | 1.78 | 1.72 | 2.39 |

Seperti disinggung di atas, secara umum indeks kerawanan untuk Provinsi Jawa Timur tergolong sedang. Begitu juga dengan indeks per dimensi, yakni dimensi penyelenggaraan (2,76), dimensi kontestasi (2,92), dan dimensi partisipasi (2,39). Pada dimensi penyelenggaraan, yang perlu menjadi titik rawan adalah variabel integritas penyelenggara pemilu. Berdasarkan data DKPP, pada penyelenggaraan Pilkada 2013 terdapat 3 (tiga) putusan DKPP terhadap Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan 1 (satu) putusan terhadap KPU Provinsi Jawa Timur. Keempat putusan tersebut dikarenakan perlakuan yang tidak adil terhadap peserta pemilu. Sementara pada penyelenggaraan Pemilu 2014, terdapat 1 (satu) putusan terhadap Bawaslu Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Pamekasan karena terlibat tindakan manipulasi suara. Rekam jejak penyelenggara seperti ini menjadui catatan yang harus diperhatikan. Apalagi sebagian besar penyelenggara untuk perhelatan Pilkada 2018 nantinya adalah orang-orang baru, bahkan ada 1 (satu) daerah yang rekam jejaknya tidak pernah berpengalaman di penyelenggaraan pemilu.

Pada dimensi kontestasi, ada tiga variabel yang perlu menjadi perhatian, yaitu variabel pencalonan dan variabel kekerabatan. Pada variabel pencalonan, ada beberapa temuan yang menjadikan nilai dari variabel tersebut tinggi, yaitu pada tahapan pencalonan Pilkada 2013. Di antara masalah yang mencuat adalah adanya dukungan ganda oleh dua partai politik. Selain itu juga muncul dukungan ganda bakal calon perseorangan dan adanya pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Namun keputusan ini dibatalkan oleh PTUN Surabaya.

Sementara untuk variabel kekerabatan, salah satu bakal calon yang akan maju dalam Pilkada Jawa Timur, memiliki kekerabatan dengan salah satu bakal calon bupati di Kabupaten. Meskipun tidak secara langsung berdampak pada kerawanan, namun pada Pilkada Kabupaten bisa saja terjadi konflik kepentingan. Hal ini karena ada dua kontestan yang merupakan saudara kandung, meskipun beda kompetisi: satunya calon gubernur dan satunya lagi calon bupati.

Bedasarkan hasil IKP Pilkada 2018 Bawaslu RI, dari 10 variabel yang terangkum dalam tiga dimensi, terdapat tujuh variabel yang perlu menjadi perhatian. Meskipun tujuh variabel itu tidak menunjukkan angka kerawanan tinggi, namun di beberapa kabupaten/kota terdapat tingkat kerawanan tinggi pada tujuh variabel tersebut. Ketujuh variabel tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, pada variabel integritas penyelenggara, tercatat tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Madiun

dengan nilai 3,0. Di Kabupaten Sampang pada penyelenggaraan Pemilu 2014, ada satu putusan pemberhentian tetap oleh DKPP kepada KPU Sampang. Sedangkan di Kabupaten Madiun pada penyelenggaraan Pilkada 2013 ada putusan pemberian peringatan oleh DKPP terhadap anggota KPU Kabupaten Madiun.

Kedua, variabel profesionalitas penyelenggara dengan tingkat kerawanan tinggi terdapat di Kota Mojokerto dengan nilai 3,0. Pada penyelenggaraan Pilkada 2013, pernah terjadi pemungutan suara ulang dikarenakan ada anggota PPS yang memperbolehkan satu orang mencoblos dua kali dengan alasan mewakili salah satu anggota keluarganya yang sakit. Selain itu dalam penyelenggaraan Pilkada 2013 dan Pemilu 2014, di hampir semua TPS tidak disediakan akses bagi para penderita difabel.

Ketiga, variabel pencalonan tingkat kerawanan tinggi terdapat di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lumajang dengan nilai 3,0. Pada Pilkada 2013 di Kabupaten Lumajang, terjadi dukungan ganda partai politik pada tahapan pencalonan dan diskualifikasi pada bakal calon yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan di Pilkada Tulungagung 2013, ada diskualifikasi pada bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan oleh KPU.

Keempat, pada variabel kampanye, tingkat kerawanan tinggi terdapat di Kabupaten Jombang dengan nilai 4,3 dan di Kabupaten Pamekasan dengan nilai 3,0. Pada Pilkada Jombang 2013, ada penyebaran isu yang dihembuskan pada saat kampanye, petahana yang menggunakan dana APBD untuk bagi-bagi bahan kebutuhan pokok dalam bentuk minyak goreng, dan pada waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 ada baliho yang bertuliskan Gardu Prabowo mendukung Jokowi, yang kemudian diprotes tim kampanye Prabowo Subianto. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, ada isu SARA yang terjadi dalam Pemilu 2014 yang dilakukan antarpeserta dan penggunaan fasilitas negara di kampanye calon anggota DPRD.

Kelima, pada variabel kontestan di mana tingkat kerawanan tinggi terdapat di Kabupaten Pasuruan dengan nilai 4,0. Ada potensi 2 (dua) petahana yang sedang menjabat akan maju saling berhadapan. Pada penyelenggaraan Pilkada 2013 di Kabupaten Pasuruan ada kepengurusan ganda partai politik di salah satu Partai Politik di Kabupaten Pasuruan, (hingga sekarang masih berpolemik). Kemudian pada Pilkada 2013 pernah terjadi konflik antar tim sukses pasangan calon antar partai politik.

Keenam, pada variabel kekerabatan tingkat kerawanan tinggi terdapat di tujuh daerah dengan nilai 3,0, yaitu Kota Probolinggo,

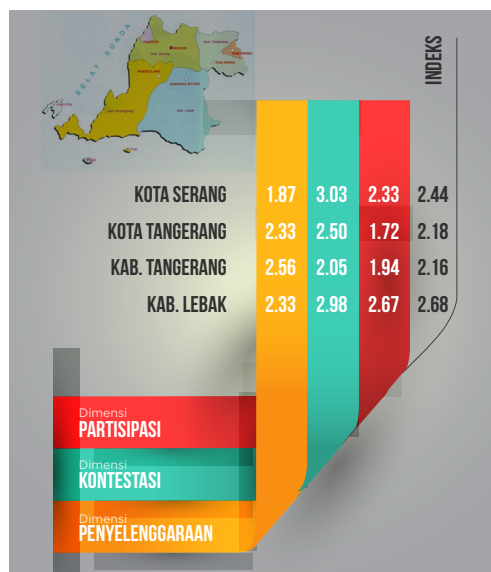
Kota Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Hal ini sekaligus menjadi variabel dengan jumlah sebaran terbanyak. Seperti halnya di Pilkada 2013, istri Wali Kota Probolinggo maju menjadi calon walikota dan terpilih menjadi Wali Kota Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada 2013. Istri Bupati Probolinggo mencalonkan diri dan terpilih menjadi bupati hingga sekarang. Di kelima daerah lainnya, hal yang sama berpotensi terjadi karena adanya hubungan kekerabatan dengan petahana yang sekarang sedang menjabat.

Ketujuh, pada variabel kontrol masyarakat tingkat kerawanan tinggi terdapat di empat daerah, yaitu Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pamekasan dengan nilai 3,5 serta Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso. Di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pamekasan, pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya dan pada penyelenggaraan Pemilu 2014 tidak ada advokasi yang dilakukan oleh NGO/CSO dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Nihilnya laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh NGO/CSO ini tentu berdampak pada kualitas pemantauan terhadap proses pilkada. Apalagi ada sejumlah daerah yang dari pemilu ke pemilu, tidak pernah ada lembaga pemantau yang tergerak melakukan pemantauan, yakni di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang.

3.14 Provinsi Banten

Empat daerah di Provinsi Banten akan menggelar pilkada di 2018. Dari empat daerah tersebut dua digelar di kota dan dua lainnya di kabupaten. Secara keseluruhan, empat daerah di Banten tersebut masuk kategori rawan sedang. Indeks kerawanan paling tinggi terdapat di Kabupaten Lebak dengan indeks 2,68. Kemudian mengikuti di belakangnya Kota Serang (2,44), Kota Tangerang (2,18), dan Kabupaten Tangerang (2,16). lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di samping ini.

Tabel 3. 14. IKP Pilkada 2018
Provinsi Banten



Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Lebak masuk dalam kategori kerawanan sedang. Namun untuk dimensi kontestasi cenderung mengarah tinggi (2,98). Sementara itu untuk dimensi penyelenggaraan dan partisipasi, keduanya masuk kategori sedang yakni dengan indeks (2,33) dan (2,67).

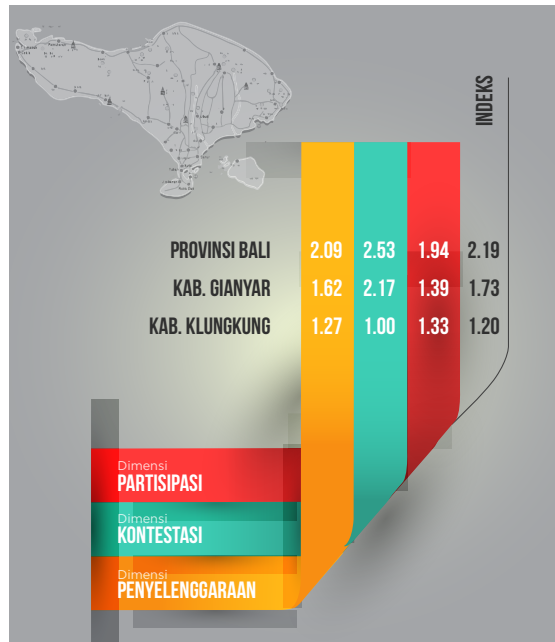
Hal yang sama juga terekam di Kota Serang. Meskipun secara keseluruhan indeks di wilayah ini masuk kategori sedang, namun dimensi kontestasi justru masuk kategori kerawanan tinggi dengan indeks (3,03). Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh variabel kekerabatan dengan indeks (5,00) atau kategori rawan tinggi, mengingat calon yang akan maju memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan gubernur dan beberapa bupati/walikota di Provinsi Banten. Untuk dimensi partisipasi, Kota Serang masuk kategori sedang (2,33) dan dimensi penyelenggaraan rawan rendah (1,87).

Sementara itu di wilayah Tangerang, tidak jauh berbeda dengan dua daerah lainnya. Kota Tangerang, misalnya, memiliki nilai indeks 2,18 dengan nilai dimensi penyelenggaraan 2,33, dimensi kontestasi 2,50 dan dimensi partisipasi 1,72. Sementara Kabupaten Tangerang nilai indeksnya 2,16 dengan dimensi penyelenggaraan 2,56, dimensi kontestasi 2,05 dan dimensi partisipasi 1,94.

3.15 Provinsi Bali

Provinsi Bali akan menyelenggarakan tiga pilkada, yakni pilkada untuk tingkat provinsi dan pilkada di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung. Tingkat kerawanan pilkada Provinsi Bali dalam kategori kerawanan sedang dengan indeks 2,19. Sedangkan dua kabupaten lainnya dalam kerawanan rendah. Lebih lanjut dapat dilihat dengan data berikut

Tabel 3.15 IKP Pilkada 2018 Provinsi Bali

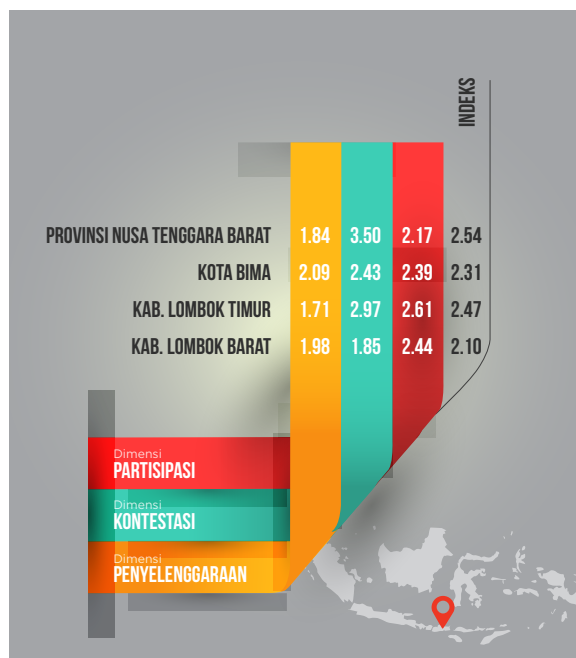


Kerawanan untuk pilkada tingkat provinsi di Bali yang perlu diantisipasi adalah terkait dimensi penyelenggaraan dan kontestasi. Keduanya masuk dalam kerawanan sedang, yakni dengan skor 2,09, dan 2,53. Kerawanan sedang dalam dimensi penyelenggaraan ini disebabkan adanya kasus pemberhentian jajaran Panwaslu Kabupaten Karangasem di Pilkada 2015. Kasus serupa juga muncul pada Pemilu 2014. Sementara itu untuk Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung masih dalam kerawanan rendah, namun khusus untuk dimensi kontestasi di Kabupaten Gianyar perlu menjadi perhatian karena indeksinya berada di kerawanan sedang. Hal ini muncul karena kasus intimidasi terhadap penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014.

3.16 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat selain menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terdiri atas Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat. Secara

umum indeks kerawanan di Nusa Tenggara Barat masuk kategori kerawanan sedang. Pemilihan Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat skor (2,54), Kabupaten Lombok Timur (2,47), Kota Bima (2,31), dan Kabupaten Lombok Barat (2,10). Lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di samping ini.



Tabel 3.16 IKP Pilkada 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks kerawanan di pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada dimensi penyelenggaraan masuk kategori rendah (1,84), sedangkan pada dimensi kontestasi skor kerawanan sangat tinggi (3,50). Kemudian untuk

dimensi partisipasi termasuk kategori kerawanan sedang (2,17). Tingginya tingkat kerawanan pada dimensi kontestasi disumbang oleh semua variabel. Variabel pencalonan mendapatkan skor (3,00), kampanye (5,00), kontestan (3,00), dan kekerasan (3,00). Tingginya angka indeks variabel kampanye (5,00) disebabkan adanya temuan tentang materi kampanye SARA pada pilkada sebelumnya.

Sentimen SARA ini terekam dari beberapa kasus seperti adanya pasangan calon berlatar belakang etnis Cina, yang kemudian diikuti dengan perilaku pembunuhan karakter dengan menyebarkan selebaran yang menjelek-jelekkan salah satu calon di Lombok Tengah. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Bima terkait isu haram memilih perempuan sebagai pemimpin. Kasus serupa juga ditemukan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 terkait lontaran isu SARA terutama soal latar belakang Suku Sasak dan Tionghoa.

Pada variabel pencalonan juga terlihat angka yang cukup tinggi (3,00). Hal ini disebabkan adanya 13.457 dukungan yang terindikasi ganda pada pencalonan perseorangan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa. Hal yang sama juga terjadi di Sumbawa Barat di mana terdapat 1.749 dukungan ganda yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian terkait pengusungan ganda oleh partai politik, tercatat saat pasangan calon mengklaim sudah mendapat dukungan dari partai politik dilengkapi surat rekomendasi DPP partai bersangkutan. Namun pengurus parpol tingkat DPD Sumbawa tidak bersedia mengikuti rekomendasi dari pengurus pusat.

Pada variabel kontestasi terdapat angka tinggi (3,00). Hal ini dikarenakan adanya indikasi dualisme salah satu partai politik menjelang Pilkada 2018, serta pernah terjadi perkelahian antara dua kubu pendukung calon bupati yang kebetulan berpapasan pada saat kampanye pilkada sebelumnya.

Selanjutnya tingkat kerawanan di seluruh kabupaten/kota memiliki nilai indeks cukup berimbang antara yang termasuk kategori kerawanan sedang dan kerawanan tinggi. Dari indeks tersebut, pola yang menonjol terlihat pada dimensi kontestasi. Hampir semua daerah memiliki angka tinggi untuk variabel kampanye, kontestan, dan kekerabatan. Misalnya saja di Kabupaten Lombok Timur, angka pada variabel kampanye sangat tinggi, yaitu 3,67.

Diketahui salah satu calon bupati pada pilkada sebelumnya membagikan uang di sebuah pondok pesantren. Selain itu juga ada

indikasi adanya mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Pada pilkada sebelumnya, di Kabupaten Lombok Barat terjadi praktik politik uang oleh petahana dan sudah mendapat surat penghentian penyidikan perkara (SP3), terdapat juga penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. Pada variabel kekerabatan juga terdapat angka yang tinggi di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima, yaitu 3,00. Pada pilkada sebelumnya di Lombok Timur diketahui adanya hubungan kekerabatan antara calon bupati dan calon gubernur dan menjelang Pilkada 2018 diketahui ada pasangan calon yang memiliki kekerabatan dengan kepala daerah di tempat lain.

3.17 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, terdapat 10 kabupaten yang juga melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dari keseluruhan perhelatan pilkada di Nusa Tenggara Timur tahun 2018, hanya Kabupaten Timor Tengah Selatan yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi dengan nilai indeks (3,05). Sementara daerah lainnya masuk dalam kategori kerawanan sedang, seperti pilkada provinsi (2,70) atau bahkan dalam kategori kerawanan rendah seperti Kabupaten Sikka (1,84) dan Kabupaten Manggarai Timur (1,97). Lebih lanjut data IKP Pilkada 2018 di Nusa Tenggara Timur bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.17 Indeks IKP Pilkada 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur

| | KAB. SUMBA BARAT DAYA | KAB. ENDE | KAB. KUPANG | KAB. ALOR | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | KAB. MANGGARAI TIMUR | KAB. ROTE NDAO | KAB. NAGEKEO | KAB. SUMBA TENGAH | KAB. SIKKA | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------|------------|------------------------------|
| INDEKS | 2.14 | 2.03 | 2.12 | 2.27 | 3.05 | 1.97 | 1.85 | 2.63 | 2.00 | 1.84 | 2.70 |
| Dimensi PENYELENGGARAAN | 2.67 | 2.36 | 2.13 | 1.80 | 3.38 | 1.53 | 1.80 | 2.58 | 1.40 | 1.27 | 2.44 |
| Dimensi KONTESTASI | 1.77 | 1.77 | 2.02 | 2.40 | 2.82 | 1.43 | 1.90 | 2.42 | 1.52 | 2.17 | 2.68 |
| Dimensi PARTISIPASI | 2.06 | 2.00 | 2.22 | 2.56 | 3.00 | 2.89 | 1.83 | 2.89 | 3.00 | 2.00 | 2.94 |

Tingginya kerawanan di Kabupaten Timur Tengah Selatan menyebar secara merata untuk seluruh dimensi, baik penyelenggaraan (3,38), partisipasi (3,00), dan kontestasi (2,82). Tingginya dimensi penyelenggaraan dipengaruhi oleh variabel integritas penyelenggara (4,00) dan profesionalitas penyelenggara (3,80). Pada pilkada sebelumnya, DKPP memutuskan memberhentikan tetap dua komisioner KPU dan pemberhentian sementara satu komisioner KPU. DKPP juga memberi peringatan pada KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan pada Pemilu Legislatif 2014 karena tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Pada pilkada sebelumnya juga terdapat pelanggaran hukum (pidana umum) yang dilakukan penyelenggara, yakni Kepala Sekretariat KPU dan Bendahara beserta satu staf kesekretariatan KPU. Kerawanan tinggi juga terlihat pada dimensi partisipasi (3,00) terhadap variabel hak pilih (3,00) dan pengawasan masyarakat (4,00). Jumlah pemilih tambahan pada pilkada sebelumnya serta Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) melebihi tiga persen.

Potensi lainnya, tidak adanya advokasi dari lembaga pemantau, NGO, dan CSO dalam melakukan pemantauan pemilu. Adapun untuk dimensi kontestasi (2,82), kerawanan tertinggi terdapat pada variabel pencalonan (4,60) dan kampanye (3,67). Pada pilkada sebelumnya terdapat dukungan ganda untuk calon perseorangan, dukungan ganda partai politik, diskualifikasi pencalonan oleh KPU, hingga sengketa pencalonan. Pada variabel kampanye, terdapat empat kasus yang memenuhi unsur keterlibatan ASN dalam kampanye. Konflik antarpeserta juga terjadi pada pilkada sebelumnya, khususnya antara petahana dan pasangan calon penantang.

Secara umum Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam kerawanan sedang, namun cenderung tinggi (2,70). Kerawanan yang perlu diantisipasi pada dimensi partisipasi (2,94) di mana kerawanan itu muncul pada variabel karakteristik lokal (3,00) dan pengawasan masyarakat (3,50). Hal ini terkait dengan kondisi geografis wilayah Nusa Tenggara Timur yang berpulau-pulau dan sebagian pemilih berdomisili di desa-desa yang masih terisolir sehingga menyulitkan ke TPS. Selain itu tidak aktifnya lembaga pemantau dalam memberikan laporan pemantauan juga perlu diantisipasi. Untuk dimensi kontestasi (2,68), kerawanan terhadap variabel pencalonan (3,40) dan kekerabatan (3,00) patut diantisipasi. Informasi yang beredar di masyarakat bahwa

istri Gubernur Nusa Tenggara Timur akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur dan istri Bupati Rote Ndao juga akan mencalonkan diri sebagai Bupati Rote Ndao.

Sementara itu, untuk dimensi penyelenggaraan (2,44), variabel profesionalitas (3,00), dan kekerasan terhadap penyelenggara (2,33) perlu diantisipasi. Pada pemilihan sebelumnya terjadi penganiayaan pada anggota Panwaslu di Kabupaten Ende oleh tim sukses salah satu pasangan calon. Pembakaran kotak suara juga pernah terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Menyangkut profesionalitas, persoalan anggaran juga berpotensi menimbulkan kerawanan. Anggaran yang disetujui di Kabupaten Rote Ndao hanya separuh dari yang diajukan sebelumnya. Sementara terkait putusan DKPP, ada satu putusan peringatan pada pilkada sebelumnya atas kasus kelalaian pada proses pemilu.

Indeks Kabupaten Alor termasuk dalam kategori rawan sedang dengan skor 2,27. Kerawanan tertinggi terdapat pada dimensi partisipasi (2,56) di mana variabel pengawasan masyarakat (4,00) perlu diantisipasi. Sama dengan daerah sebelumnya, tidak adanya lembaga pemantau yang melaporkan hasil pengawasan dan melakukan advokasi, berpotensi menimbulkan kerawanan. Dalam dimensi kontestasi (2,40), perlu diantisipasi kerawanan pada variabel kampanye (3,00) dan kekerabatan (3,00). Kerawanan tersebut terkait materi kampanye berupa hasutan, adu domba antarsuku dan golongan serta hubungan kekerabatan calon anggota legislatif dengan anggota Panwaslu dan KPU Kabupaten.

Adapun pada dimensi penyelenggaraan (1,80), kerawanan berpotensi muncul pada variabel kekerasan terhadap penyelenggara (3,00). Pada pilkada sebelumnya terjadi pemukulan terhadap anggota KKPS dan PPS di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan pemukulan anggota Panwascam Wewaria Kabupaten Ende oleh calon anggota legislatif yang merupakan anak dari tokoh adat setempat.

Kabupaten Rote Ndao dengan kerawanan rendah (1,85) perlu diantisipasi pada dimensi penyelenggara (1,80) di mana pada variabel profesionalitas penyelenggara (3,40) terdapat kasus terbatasnya dukungan dana kepada Panwaslu Kabupaten Rote Ndao sehingga cukup menyulitkan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Pada dimensi kontestasi (1,90) potensi rawan muncul pada variabel kampanye (3,00) melalui modus penghinaan antar-pasangan calon kepala daerah serta praktik politik uang. Sementara itu untuk

dimensi partisipasi (1,83), perlu diantisipasi variabel pengawasan masyarakat. Kerawanan berpotensi muncul karena ketiadaan lembaga pemantau dalam melakukan advokasi dan melaporkan hasil temuan serta pengawasan.

Meskipun indeks Kabupaten Sikka masuk dalam kategori kerawanan rendah (1,84), perlu diantisipasi pada dimensi kontestasi (2,17), khususnya variabel kekerabatan (3,00) di mana terdapat hubungan kekerabatan antara pasangan calon dengan petahana. Lalu pada dimensi partisipasi (2,00) terhadap variabel pengawasan masyarakat (4,00) perlu diantisipasi karena ketiadaan lembaga pemantau, CSO, dan NGO yang melakukan pemantauan pengawasan dan melakukan advokasi. Selanjutnya untuk dimensi penyelenggaraan (1,27), variabel profesionalitas penyelenggara perlu diperhatikan, khususnya terkait ketersediaan anggaran dan dukungan sekretariat.

Kerawanan pada Kabupaten Ende masuk dalam kategori sedang dengan indeks 2,03. Perlu diantisipasi kerawanan pada dimensi penyelenggaraan (2,36) khususnya pada variabel kekerasan terhadap penyelenggara (3,67) dengan kasus pada Pileg 2014 terkait pemukulan anggota panwas oleh calon anggota legislatif yang juga berstatus sebagai anak tokoh adat di Ende. Dalam dimensi partisipasi (2,00) potensi kerawanan ada pada variabel pengawasan masyarakat (3,00) yang ditandai dengan tidak adanya laporan pemantauan pengawasan oleh lembaga pemantau. Sementara itu untuk dimensi kontestasi (1,77), perlu diantisipasi variabel kekerabatan (3,00). Pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang lalu, terdapat calon anggota legislatif yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota KPU Kabupaten dan anggota Panwaslu.

Dengan skor kerawanan 1,97, Kabupaten Manggarai Timur masuk dalam kategori kerawanan rendah. Namun perlu diantisipasi kerawanan pada dimensi partisipasi (2,89) terhadap variabel pengawasan masyarakat (5,00). Di Manggarai Timur tidak ada lembaga pemantau, CSO, atau NGO yang melakukan pemantauan, advokasi, dan pelaporan kepada Panwaslu. Untuk dimensi penyelenggaraan (1,53) perlu diantisipasi pada variabel profesionalitas penyelenggara (2,60) terkait kepastian hukum dan ketersediaan anggaran. Sementara pada dimensi kontestasi (1,43) potensi rawan perlu diantisipasi pada variabel kampanye (2,33) menyangkut penggunaan isu SARA pada kampanye dan pelibatan ASN.

Selanjutnya Kabupaten Nagekeo termasuk dalam kategori kerawanan sedang dengan indeks 2,63. Pilkada 2018 di wilayah ini perlu

mengantisipasi potensi rawan dari dimensi partisipasi (2,89), khususnya pada variabel pengawasan masyarakat (5,00). Potensi rawan tersebut terkait tidak adanya lembaga pemantau yang melakukan pemantauan, memberikan advokasi dan melaporkan temuan ke Panwaslu. Adapun kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan (2,58) terdapat pada variabel profesionalitas penyelenggara (3,40) di mana terdapat putusan DKPP yang memberhentikan dengan tetap lima komisioner KPU Kabupaten Nagekeo pada pilkada sebelumnya. Kasus tersebut semakin meneguhkan profesionalitas penyelenggara berpotensi rawan karena hambatan anggaran Pilkada 2018.

Sementara untuk dimensi kontestasi (2,42) potensi rawan perlu diantisipasi pada variabel pencalonan (3,00) dan kampanye (3,67). Potensi rawan ini terkait dukungan ganda, sengketa pencalonan hingga diskualifikasi pencalonan. Selain itu juga terdapat materi kampanye bernada SARA pada pilkada sebelumnya dan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014.

Kabupaten Sumba Barat Daya dengan kerawanan 2,14, perlu diantisipasi pada dimensi penyelenggaraan (2,67) terhadap variabel integritas penyelenggara (4,00) dan profesionalitas penyelenggara (3,00). Pada pilkada sebelumnya terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga pada sidang putusan Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan vonis kepada Ketua KPU Sumba Barat Daya 13 bulan penjara. Selain kasus hukum pidana, DKPP juga memberhentikan tetap komisioner KPU Kabupaten karena kasus netralitas dan keberpihakan.

Sementara pada dimensi partisipasi (2,06) perlu diantisipasi kerawanan pada variabel pengawasan masyarakat (3,50) di mana tidak ada lembaga pemantau yang melakukan advokasi dan melaporkan hasil temuan secara resmi ke Panwaslu. Untuk dimensi kontestasi (1,77) perlu diantisipasi variabel kampanye melalui politik uang dan pelibatan ASN serta penggunaan fasilitas negara.

Kabupaten Kupang dengan nilai kerawanan 2,12 masuk ke dalam kategori rawan sedang sehingga perlu diantisipasi potensi kerawanan dari dimensi partisipasi (2,22), khususnya terkait variabel pengawasan masyarakat (4,00). Ketiadaan lembaga pemantau dalam melakukan pemantauan, advokasi dan memberikan laporan resmi kepada panwas berpotensi rawan pada Pilkada 2018. Sementara itu untuk dimensi penyelenggaraan (2,13), variabel profesionalitas penyelenggara (3,40) perlu diantisipasi atas adanya kasus penggelembungan suara oleh PPK

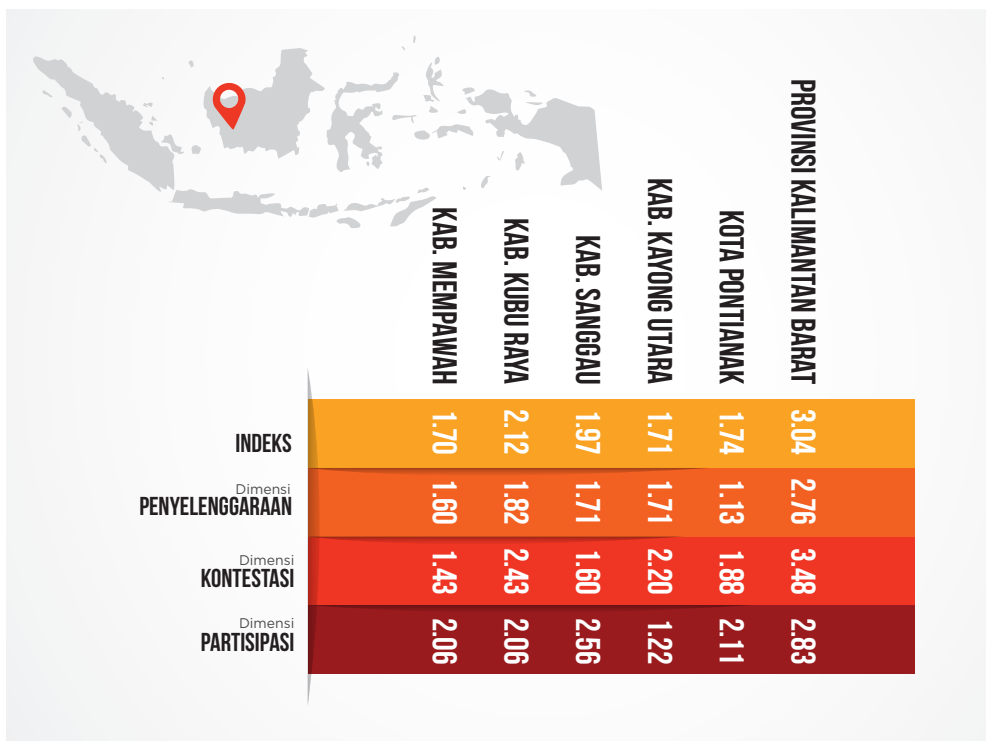
dan persoalan ketersediaan anggaran untuk Pilkada 2018. Adapun untuk dimensi kontestasi (2,02) perlu diantisipasi kerawanan variabel kampanye (3,67), yakni materi kampanye SARA dan adu domba antarsuku serta praktik politik uang.

Kabupaten Sumba Tengah dengan indeks 2,00 berada pada kategori kerawanan sedang sehingga perlu diantisipasi potensi rawan pada dimensi partisipasi (3,00) khususnya variabel hak pilih (5,00) dan pengawasan masyarakat (3,00). Terkait hak pilih, tingkat partisipasi pada pilkada sebelumnya terbilang rendah karena pemilih yang tidak menggunakan hak pilih hingga 59 persen, meskipun pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 meningkat menjadi 50 persen. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi geografis yang menyebabkan akses masyarakat ke TPS terhambat. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb pada pilkada dan pemilu legislatif terbilang tinggi, yakni lebih dari tiga persen. Selain itu, ketiadaan lembaga pemantau juga perlu diantisipasi kerawannya. Untuk dimensi kontestasi (1,52), perlu diperhatikan variabel kontestan terkait konflik antarcalon. Sementara untuk dimensi penyelenggaraan (1,40), potensi rawan dari variabel profesionalitas penyelenggara terkait ketersediaan anggaran dan dukungan sekretariat.

3.18 Provinsi Kalimantan Barat

Pada Pilkada 2018, Provinsi Kalimantan Barat akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota. Tingkat kerawanan di provinsi ini cukup beragam dan cukup terjadi kesenjangan antara satu daerah dengan lainnya. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menunjukkan tingkat kerawanan tinggi (3,04). Sementara penilaian untuk Kabupaten Kubu Raya masuk kategori sedang (2,12) dan empat daerah lainnya masuk kategori kerawanan rendah. Rincian lebih lanjut bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Barat



Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Barat pada IKP Pilkada 2018 ini berada di peringkat ke-3 tertinggi dengan skor 3,04. Dengan demikian Pilkada 2018 di Kalimantan Barat termasuk dalam kategori kerawanan tinggi. Kontribusi kerawanan tinggi di provinsi ini ditopang utamanya oleh dimensi kontestasi (3,48). Semua variabel dalam dimensi kontestasi terbilang tinggi, khususnya pada variabel kampanye (4,33) dan variabel kontestan (4,00).

Selanjutnya pada dimensi penyelenggaraan, skor di Provinsi Kalimantan Barat adalah 2,76. Angka ini termasuk dalam kategori kerawanan sedang. Meskipun dimensi penyelenggaraan ada di kerawanan sedang, variabel kekerasan terhadap penyelenggara berada di kerawanan tinggi (3,67). Pada dimensi partisipasi pun angkanya cukup signifikan, mendekati kerawanan tinggi (2,83). Pada dimensi partisipasi tingginya angka kerawanan tersebut ditopang oleh variabel hak pilih dan karakteristik lokal.

Sementara itu skor 4,33 di variabel kampanye dan 4,00 di variabel kontestan akibat adanya kampanye bermuatan SARA, *hoax*, fitnah, dan

adu domba pada pemilu sebelumnya. Di Kabupaten Kubu Raya tercatat ada materi kampanye bermuatan SARA di pilkada sebelumnya dan pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Begitu juga mobilisasi ASN dan politik uang, meskipun sekali lagi kasus itu sulit untuk dibuktikan. Kondisi itu diperparah oleh maraknya politik uang, meskipun jamak disadari banyaknya kasus yang ditemukan namun sulit untuk membuktikannya. Hal ini akibat kurangnya alat bukti dan tiadanya saksi yang bersedia memberi keterangan. Pelibatan ASN dan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon juga ditemukan di Kota Singkawang oleh salah satu pasangan calon.

Variabel kekerasan terhadap penyelenggara juga mendapatkan skor tinggi, yakni 3,67. Angka ini cukup tinggi karena adanya kasus pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Kasus tersebut adalah perusakan kantor KPU Kabupaten Kubu Raya oleh massa pendukung salah satu pasangan calon. Kekerasan fisik juga dilakukan terhadap anggota Panwascam Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang di Pilkada 2015. Tidak itu saja, menjelang Pilkada 2018 ini telah terjadi perusakan terhadap fasilitas KPU Kota Singkawang oleh pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan.

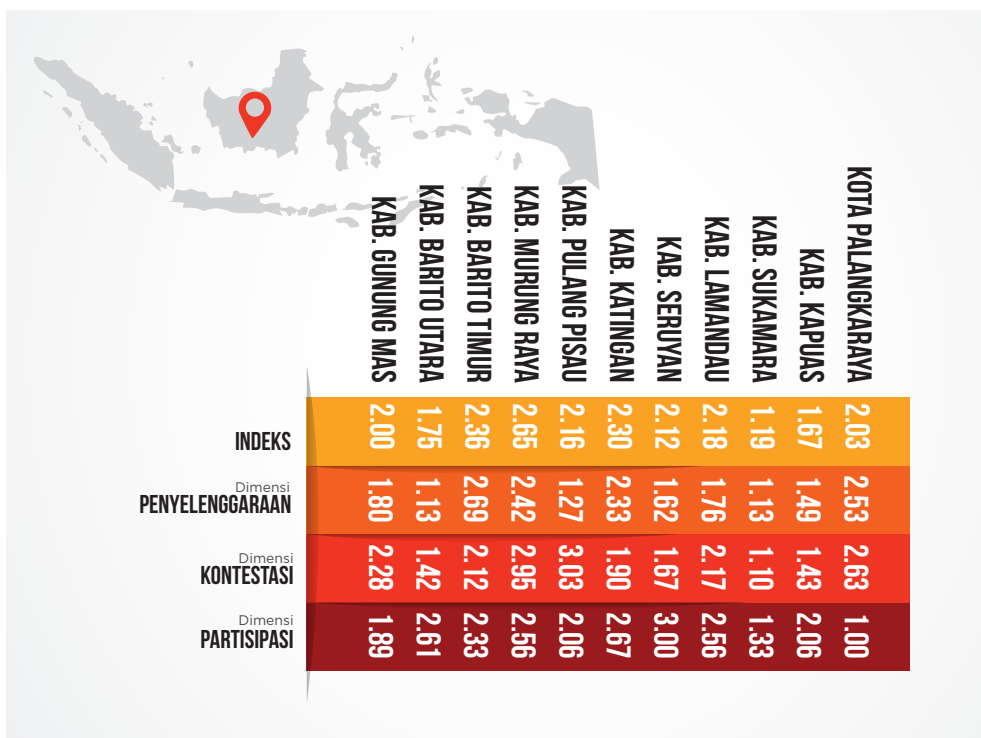
Dari data pada tabel di atas, angka kerawanan pada tingkatan dimensi di kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 di Kalimantan Barat berada di tingkat kerawanan sedang dan rendah. Namun, jika ditelisik lebih dalam ke tingkatan variabel, terlihat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya pada dimensi partisipasi, khususnya di variabel pengawasan/kontrol masyarakat. Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak, misalnya, keduanya memiliki angka kerawanan tinggi (3,00). Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah sama-sama memiliki skor 2,50 pada variabel yang sama.

Hampir bisa dikatakan pola yang terjadi sebagian besar sama. Di Kabupaten Sanggau, misalnya, keberadaan lembaga pemantau teridentifikasi ada, namun menurut Panwaslu kurang ada koordinasi, sehingga pengawasan menjadi kurang tepat dan kurang efektif. Di Kabupaten Kubu Raya, lembaga pemantau ada namun tidak melakukan advokasi dan tidak ada laporan dari lembaga pemantau yang masuk ke panwas. Kondisi nyata soal lembaga pemantau di Kabupaten Kubu Raya terjadi juga di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kayong Utara.

3.19 Provinsi Kalimantan Tengah

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 11 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada. Secara umum provinsi ini masuk kategori rawan sedang dan rendah. Kerawanan rendah tercatat ada di Kabupaten Kapuas (1,67), Sukamara (1,19), dan Barito Utara (1,75). Sementara daerah lainnya masuk kategori rawan sedang. Lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Tengah



Jika merujuk data di atas, terlihat Kota Palangkaraya dengan kerawanan 2,03 perlu diantisipasi dari dimensi kontestasi (2,63), khususnya pada variabel kampanye karena adanya penggunaan materi SARA dan adu domba saat kampanye pilkada sebelumnya dan diperkirakan kembali digunakan pada Pilkada 2018. Selain itu, penggunaan gedung Dharma Wanita untuk kampanye yang merupakan fasilitas negara juga berpotensi kembali terjadi pada pilkada nanti.

Untuk dimensi penyelenggaraan (2,53) perlu diantisipasi integritas penyelenggaranya karena sebelumnya ada kasus pemberhentian tetap terhadap penyelenggara pemilu Kota Palangkaraya oleh DKPP. Selain kasus etik, juga terjadi kasus pidana di mana tiga komisioner Panwaslu Kota Palangkaraya dan satu orang staf sekretariat pada Pilwakot 2013 terlibat korupsi senilai Rp 200 juta yang berakhir vonis penjara 1 tahun. Ketersediaan anggaran Pilkada 2018 juga perlu diantisipasi karena terjadi hambatan dalam pencairan akibat dari kesalahan komunikasi antara panwas dan pemda. Sementara itu ketiadaan lembaga pemantau, CSO, dan NGO kepemiluan yang melakukan advokasi dan laporan pengawasan juga berpotensi menimbulkan kerawanan pada dimensi partisipasi.

Kerawanan di Kabupaten Kapuas (1,67) tergolong rendah, namun tetap perlu diantisipasi dari dimensi penyelenggaraan terkait data pemilih di mana masih banyak kasus pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara juga perlu diantisipasi karena pada pilkada sebelumnya terjadi ancaman ke kantor panwaslu oleh tim pasangan calon. Untuk dimensi kontestasi, materi kampanye bernada SARA juga perlu diantisipasi karena pada pilkada sebelumnya marak digunakan. Begitu juga dengan praktik politik uang dan penggunaan kendaraan dinas untuk operasional kampanye. Lalu untuk dimensi partisipasi perlu diantisipasi terkait kondisi geografis yang menghambat pemilih ke TPS karena jarak tempuh pemilih di lima kecamatan (Mandau Telawang, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, dan Timpah) menuju TPS terlalu jauh.

Selanjutnya tingkat kerawanan di Kabupaten Sukamara berada pada kategori rendah dengan angka 1,19. Namun tetap harus diantisipasi terkait profesionalitas penyelenggara untuk kepastian hukum atas kebijakan penyelenggara yang kerap berubah. Jarak pemilih ke TPS di beberapa desa yang cukup jauh juga perlu diantisipasi kerawannya. Pada variabel pengawasan masyarakat, tidak ada lembaga pemantau yang melakukan pengawasan dan advokasi yang disinyalir berpotensi menimbulkan kerawanan.

Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Lamandau masuk dalam kategori rawan sedang (2,18). Pemangku kepentingan pemilu di Kabupaten Lamandau perlu mengantisipasi potensi rawan pada dimensi penyelenggaraan, khususnya terkait profesionalitas penyelenggara. Proses penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan pencairannya berjalan lambat sehingga menghambat pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan tahapan pilkada

yang telah berjalan. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara juga perlu diantisipasi karena pada pilkada sebelumnya terjadi pemaksaan dan ancaman oleh tim pasangan calon kepada panwas.

Untuk dimensi kontestasi, variabel kampanye perlu diantisipasi. Di Lamandau, materi kampanye masih bermuatan isu SARA seperti sentimen warga lokal dan warga pendatang, agama, dan etnis. Terkait variabel pencalonan, potensi rawan muncul karena kemungkinan kandidat calon memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Kotawaringin Barat. Kandidat calon juga memiliki hubungan kerabat dengan Bupati Seruyan dan kandidat calon Bupati Sukamara. Tidak adanya lembaga pemantau yang melakukan advokasi dan memberikan laporan pemantauan kepada panwaslu juga perlu diantisipasi kerawanannya.

Kabupaten Seruyan berada dalam kategori rawan sedang dengan angka 2,12. Pada Pilkada 2018 mendatang yang perlu diantisipasi kerawanannya dari dimensi penyelenggaraan, khususnya profesionalitas penyelenggara atas keterlambatan penandatanganan NPHD dan pencairannya. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara juga perlu diantisipasi lantaran pada pilkada sebelumnya terjadi ancaman dan intimidasi hingga salah seorang komisioner dibawa ke suatu tempat oleh tim pasangan calon. Pada dimensi kontestasi, penggunaan fasilitas negara seperti Gedung Serba Guna untuk kampanye dan rotasi jabatan perlu diwaspadai karena sebelumnya pernah dilakukan oleh petahana.

Sementara itu untuk variabel kekerabatan perlu juga diantisipasi karena petahana berpotensi maju kembali dalam pencalonan. Hal yang sama juga harus diperhatikan potensi rawan akibat kondisi geografis yang menyulitkan untuk datang ke TPS. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak dan segera diantisipasi karena beberapa perusahaan sawit melarang didirikannya TPS di wilayah mereka. Padahal banyak pemilih yang bekerja dan berdomisili di sekitar perusahaan sawit tersebut.

Selanjutnya Kabupaten Katingan masuk dalam kategori rawan sedang (2,30). Satu hal yang perlu diantisipasi adalah dimensi penyelenggaraan, khususnya integritas penyelenggara karena pada pilkada sebelumnya DKPP mengeluarkan putusan peringatan untuk lima komisioner KPU Kabupaten. Hal lainnya dari sisi variabel profesionalitas penyelenggara, keterlambatan pencairan anggaran dapat menghambat penyelenggaraan pilkada. Sementara itu dalam dimensi kontestasi perlu diantisipasi penggunaan isu agama dan suku saat kampanye dan praktik politik uang.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mobilisasi birokrasi. Di wilayah ini pernah ada kasus ASN tertangkap tangan membawa uang Rp 25 juta yang akan diserahkan kepada tim sukses pasangan calon. Panwas juga menemukan aksi pembagian sarung oleh tim pasangan calon. Kasus-kasus serupa akan rawan terjadi di setiap kontestasi. Variabel kekerabatan juga harus diantisipasi karena salah satu kandidat kuat calon bupati merupakan paman dari Gubernur Kalimantan Tengah. Pada dimensi partisipasi, potensi rawan akibat kondisi geografis yang menyebabkan jarak TPS dengan pemilih cukup jauh.

Kabupaten Pulang Pisau berada dalam kategori rawan sedang (2,16). Salah satu dimensi yang paling harus diantisipasi karena berpotensi rawan adalah dimensi penyelenggaraan. Hal ini khususnya terkait pengawasan daftar pemilih seperti pemutakhiran pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pada dimensi kontestasi, praktik politik uang dan keterlibatan ASN dalam kampanye juga tidak boleh luput dari pengawasan. Sedangkan untuk dimensi partisipasi, variabel hak pilih terlihat dengan adanya kesulitan pemilih menuju TPS karena letak geografis yang sangat jauh. Selain itu, tidak adanya lembaga pemantau pemilu yang melakukan pemantauan dan advokasi juga perlu menjadi catatan.

Sementara itu di Kabupaten Murung Raya masuk dalam kategori kerawanan sedang (2,65). Pada dimensi penyelenggaraan, terjadi keterlambatan dalam pencairan tahap pertama anggaran pengawasan di daerah ini. Pada dimensi kontestasi yang paling perlu diantisipasi adalah praktik politik uang dan konflik antarpeserta atau pendukungnya. Pada pilkada sebelumnya terjadi perusakan terhadap fasilitas publik dalam konteks penyelenggaraan pilkada, seperti pembakaran dua mobil anggota DPRD, pembakaran kantor Dinas Pekerjaan Umum dan pelemparan bom molotov di kantor bupati. Tidak itu saja, bahkan terjadi juga pembunuhan terhadap korban yang diduga sebagai tim sukses pasangan calon.

Berbeda dengan Kabupaten Murung Raya di mana variabel kekerabatan perlu diantisipasi karena petahana dan kakak kandungnya diperkirakan akan maju dalam pencalonan. Sementara itu untuk dimensi partisipasi potensi rawannya terlihat dari variabel hak pilih terkait adanya hambatan pemilih menuju TPS karena kondisi geografis di wilayah ini. Absennya lembaga pemantau semakin menambah daftar kerawanan di dimensi partisipasi.

Kabupaten Barito Timur masuk dalam kerawanan sedang dengan angka 2,36. Kerawanan terjadi di dimensi penyelenggaraan terkait profesionalitas penyelenggara. Hal ini terekam soal ketersediaan anggaran pengawasan. Hal lainnya yang perlu diawasi adalah variabel kekerasan terhadap penyelenggara yang perlu diantisipasi karena pada pemilihan sebelumnya terjadi pemukulan dan intimidasi terhadap Panwaslu oleh tim sukses pasangan calon. Pada dimensi kontestasi, yang sangat perlu diantisipasi adalah praktik politik uang dan sengketa pencalonan. Selanjutnya pada dimensi partisipasi, potensi rawan muncul dari ketiadaan lembaga pemantau yang melakukan pemantauan dan advokasi.

Kabupaten Barito Utara berada dalam kategori rendah (1,75). Meskipun demikian, dimensi partisipasi di wilayah ini justru berada di tingkat kerawanan sedang (2,61). Sementara itu indeks kerawanan partisipasinya potensial tinggi karena terkait akses hak pilih, terutama soal akses pemilih ke TPS yang masih menghadapi kendala. Masalah utama adalah kendala geografis yang terdapat di Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah di mana pemilih harus menyeberangi Sungai Riam untuk menuju ke TPS. Selain itu, meski ada di kerawanan rendah, dimensi penyelenggaraan (1,13) terkait penyediaan TPS akses bagi penyandang disabilitas patut menjadi perhatian. Selanjutnya di dimensi kontestasi (1,42) potensi rawan dari variabel kampanye terkait penggunaan fasilitas negara juga perlu diantisipasi.

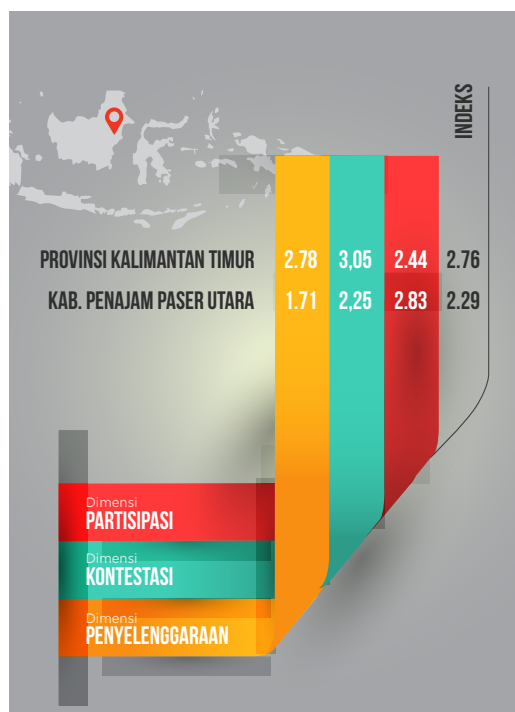
Sementara Kabupaten Gunung Mas berada di tingkat kerawanan sedang (2,00). Salah satu kontributor tertinggi ada di dimensi kontestasi. Variabel pencalonan dan kekerabatan menjadi penyumbang dimensi kontestasi karena petahana memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua KPU Kabupaten. Berikutnya dimensi partisipasi (1,89) penyumbang kedua di kerawanan sedang di Kabupaten Gunung Mas. Variabel pengawasan masyarakat di dimensi partisipasi perlu diantisipasi juga, khususnya terkait ketiadaan lembaga pemantau yang melakukan pemantauan dan advokasi pengawasan pemilu. Sementara itu untuk dimensi penyelenggaraan (1,80) terkait dengan variabel kekerasan terhadap penyelenggara juga menjadi perhatian. Dalam catatan IKP Pilkada 2018, pernah terjadi lebih dari tiga kali ancaman fisik dan intimidasi terhadap anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Gunung Mas pada pilkada sebelumnya.

3.20 Provinsi Kalimantan Timur

Pada Pilkada 2018, Provinsi Kalimantan Timur akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di tingkat kabupaten/kota, di wilayah ini juga akan digelar Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data indeks kerawanan, keduanya masuk dalam kategori kerawanan sedang, di mana Provinsi Kalimantan Timur berada di skor 2,76 dan Kabupaten Panajam Paser Utara pada skor 2,29. Lebih lanjut indeks kerawanan Pilkada 2018 di Kalimantan Timur bisa dilihat dari tabel di samping ini.

Berdasarkan hasil skor keseluruhan dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), Provinsi Kalimantan Timur memiliki skor nilai indeks 2,76. Nilai dimensi penyelenggaraan 2,78, dimensi kontestasi 3,05, dan pada dimensi partisipasi 2,44. Nilai dimensi kontestasi di Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi ditopang oleh variabel kampanye (3,00), kontestasi (4,00), dan kekerabatan (3,00). Sementara di Kabupaten Panajam Paser Utara memiliki nilai indeks 2,29. Dengan nilai dimensi penyelenggaraan 1,71, dimensi kontestasi 2,25 dan dimensi partisipasi 2,83.

Tabel 3.20 IKP Pilkada 2018
Provinsi Kalimantan Timur

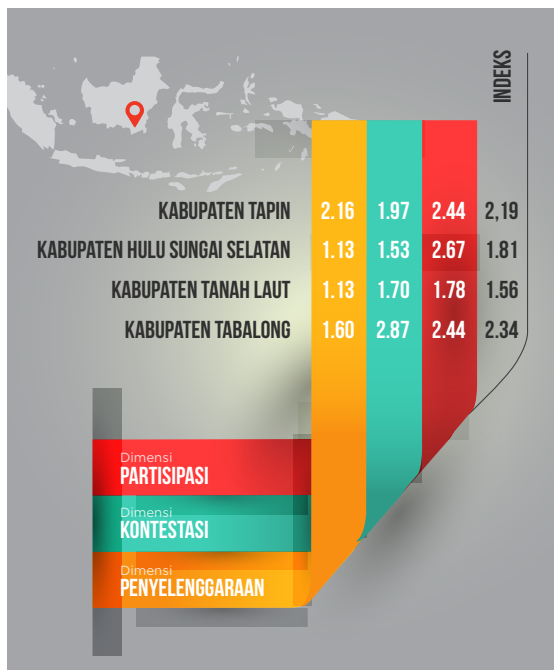


3.21 Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan akan menyelenggarakan pilkada di empat kabupaten/kota. Keempat daerah ini dilihat dari indeks kerawanannya masuk dalam kategori rawan sedang dan rendah. Kabupaten yang masuk dalam kategori kerawanan sedang adalah Kabupaten Tapin (2,19), dan Kabupaten Tabalong (2,34). Sementara kabupaten yang masuk dalam kerawanan rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1,81), dan Kabupaten Tanah Laut (1,56). Lebih lanjut bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Jika merujuk tabel di atas, tidak ada satupun daerah yang masuk dalam indeks kerawanan tinggi, baik pada indeks komulatif kabupaten, ataupun dari indeks dimensi. Dilihat dari indeks dimensi, skor tertinggi terdapat di dimensi kontestasi di Kabupaten Tabalong. Skor tertinggi kedua diperoleh oleh dimensi partisipasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara indeks kerawanan berbasis dimensi pada kategori terendah ada di dimensi penyelenggaraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 32. IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Selatan



Kabupaten Tapin berada di indeks kerawanan sedang (2,19). Namun skor dimensi partisipasi (2,44) justru melebihi dari indeks IKP Kabupaten Tapin sendiri. Temuan tim peneliti IKP Pilkada 2018, beberapa fakta mengakibatkan indeks kerawanan dimensi partisipasi di Tapin lebih tinggi dari dimensi lainnya. Di antara fakta tersebut adalah tidak adanya lembaga pemantau pemilu, CSO, NGO dan ormas yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, meskipun kehadiran pemilih secara umum mencapai 70%, namun ada fakta di mana pemilih difabel hanya menggunakan hak pilihnya di bawah 30%.

Kondisi tersebut semakin meneguhkan pentingnya memusatkan perhatian pada aspek partisipasi pemilih atau masyarakat dalam kontek kepemiluan. Hal ini dikarenakan adanya fakta geografis yang memungkinkan peserta kesulitan menjangkau TPS. Informasi yang berhasil dikumpulkan, Kabupaten Tapin memiliki wilayah pegunungan yang ada di Kecamatan Piani. Sementara untuk daerah Hatungun dan Salam Babaris, jika terjadi hujan maka jalanan yang masih belum beraspal akan sangat licin. Selain topografi yang berbentuk pegunungan, dan banyak jalan yang belum beraspal, Kabupaten Tapin juga memiliki wilayah sungai yaitu Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras

Selatan. Jamak diketahui publik jika arus sungai deras maka pemilih yang memang menggunakan perahu untuk mencapai TPS, berisiko tenggelam mengingat derasnya arus sungai.

Selain dimensi partisipasi, dimensi penyelenggaraan juga patut diperhatikan oleh masyarakat luas. Pada pilkada sebelumnya, terdapat putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu. Meskipun telah ditandatanganinya NPHD, persoalan anggaran pengawasan Pilkada 2018 harus melalui perdebatan yang alot dengan pemerintah daerah karena kondisi APBD Kabupaten Tapin yang defisit. Beberapa catatan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu oleh kontestan pemilu atau pendukung kontestan juga kerap terjadi.

Sama dengan Kabupaten Tapin, kerawanan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terjadi di dimensi partisipasi. Beberapa keadaan yang mendukung kerawanan di dimensi partisipasi adalah tidak adanya laporan pengawasan pemilu oleh publik. Tiadanya laporan tersebut karena memang tidak ada lembaga sipil semacam LSM/ NGO ke pemiluan atau organisasi massa yang melakukan pemantauan dan advokasi dalam agenda kepemiluan. Akibatnya kontrol publik menjadi rendah untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Kondisi itu semakin diperkuat oleh data pemilih yang menggunakan hak pilih pada pilkada Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang hanya berkisar 68%, dan kaum difabel yang hanya menggunakan hak pilihnya 30% saja. Persentasi pemilih meningkat pada pemilihan legislatif 2014 terakhir (76%). Namun potret pemilih di momentum pilpres ternyata juga rendah (65%). Bersyukur kondisi geografis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif dapat dijangkau oleh pemilih. Sehingga tidak ada kesulitan akses untuk menggunakan hak pilihnya.

Kondisi kerawanan pilkada di Kabupaten Tanah Laut setali tiga uang dengan dua kabupaten di atas. Di kabupaten ini, dimensi partisipasi juga berada di tingkat kerawanan teratas meskipun skornya lebih rendah dari dua kabupaten yang telah dijelaskan di atas (lihat tabel). Tingkat kerawanan teratas kedua ada di dimensi kontestasi, dan disusul dimensi penyelenggara. Secara umum masalah yang mencuat mirip dengan apa yang terjadi di daerah lain. Salah satunya adalah tidak adanya lembaga sosial publik yang konsentrasi pada isu kepemiluan. Tidak adanya masyarakat sipil yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap praktik berdemokrasi di tingkat lokal, membuat kualitas demokrasi mengalami persoalan. Meskipun partisipasi pemilih ke TPS mencapai 70 %, baik di pilkada sebelumnya maupun di Pileg/Pilpres 2014, namun

kehadiran kaum difabel masih di bawah angka 30 %.

Selain itu, titik kerawanan dimensi partisipasi di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari indikator jumlah persentasi daftar pemilih tambahan yang mencapai lebih dari 3 % di pilkada sebelumnya. Kondisi ini tentu menciptakan peluang pelanggaran yang patut untuk diantisipasi oleh berbagai pemangku kepentingan pemilu. Selain dimensi partisipasi, karena skor antara dimensi partisipasi dan kontestasi hanya terpaut sedikit saja (lihat tabel di atas), maka patut diperhatikan juga kerawanan di dimensi kontestasi. Beberapa kejadian sebelumnya dapat menjadi cermin untuk menghadapi Pilkada 2018. Seperti data yang telah dihimpun, terdapat hubungan kekerabatan pada salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Tanah Laut dengan kepala daerah sebelumnya. Ditambahkan juga di sini, peluang petahana untuk maju kembali masih terbuka luas. Satu hal lagi yang perlu dicermati adalah pada pilkada sebelumnya terdapat sengketa pilkada yang melibatkan pendukung, di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Indeks kerawanan teratas di Pilkada 2018 di Kalimantan Selatan justru tertingi di Kabupaten Tabalong (lihat tabel). Dari tiga dimensi yang menjadi alat ukur, dimensi kontestasi menempati posisi tertinggi di Pilkada Kabupaten Tabalong. Berikutnya diikuti oleh dimensi partisipasi dan penyelenggara. Salah satu indikator yang mencuat di dimensi kontestasi adalah adanya praktik politik uang. Politik uang ini jamak dilakukan oleh tiap kandidat, bahkan pemilih memperoleh banyak amplop serangan fajar, dan ada pula bukti ditangkapnya salah satu yang diduga tim sukses yang sedang membagikan uang. Namun seperti terjadi di banyak daerah, selalu sulit bagi penyelenggara untuk mengungkap pelaku politik uang. Selain itu, kampanye SARA juga mencuat di pengalaman perhelatan pilkada sebelumnya. Isu putra daerah dan bukan putra daerah adalah satu di antara jenis isu SARA yang seringkali muncul di saat tahapan kampanye.

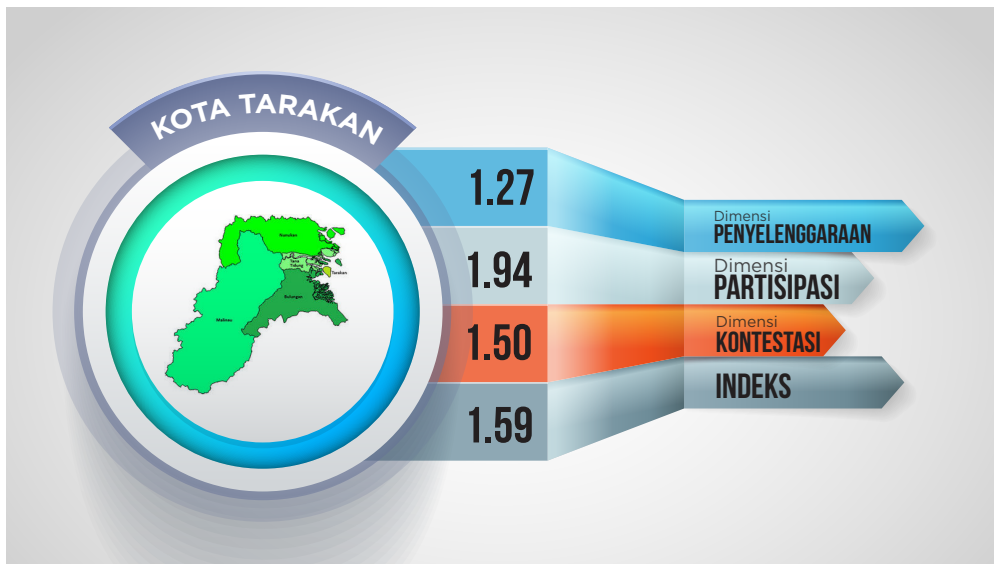
Kerawanan di dimensi kontestasi juga ditopang oleh adanya persaingan di antara petahana bupati dan wakil bupati di mana di antara mereka berpotensi untuk menjadi calon kepala daerah. Selain itu, dari data yang diperoleh, terdapat juga kekerabatan antara pasangan calon pada pilkada 2013 dengan petahana. Ada kekerabatan dengan mantan kepala daerah sebelumnya dengan salah satu pasangan calon di provinsi yang sama. Manuver politik oleh petahana tentu akan sangat berimplikasi terhadap aparatur sipil negara di daerahnya. Tidak hanya itu, bahkan pada pilkada sebelumnya, rotasi jabatan pernah terjadi

pada enam bulan sebelum pilkada. Kabar baik dari Kabupaten Tabalong adalah adanya lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi pada agenda pemilihan. Namun, meskipun lembaganya ada, mereka tidak melapor secara resmi atas adanya pelanggaran pemilu dari agenda pemantauan yang mereka lakukan. Artinya kapasitas lembaga swadaya masyarakat di konteks pemilihan tentu perlu ditingkatkan.

3.22 Provinsi Kalimantan Utara

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara hanya akan diselenggarakan di Kota Tarakan. Indeks kerawanan di kota ini masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil skor keseluruhan dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), Kota Tarakan memiliki skor nilai indeks 1,59. Nilai dimensi penyelenggaraan 1,27, dimensi kontestasi 1,50, dan dimensi partisipasi 1,94. Di bawah ini adalah data utuh indeks kerawanan Pilkada 2018 di Kalimantan Utara.

Tabel 3.22 IKP Pilkada 2018 Provinsi Kalimantan Utara



3.23 Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar pilkada di enam kabupaten/kota pada tahun 2018. Berdasarkan penilaian indeks kerawanan, tercatat ada empat daerah yang masuk kategori rawan sedang, yakni Kabupaten Minahasa (2,16), Kabupaten Sitaro (2,11), Kabupaten Minahasa Tenggara (2,14), dan Kabupaten Kepulauan Talaud (2,54). Sementara 2 (dua) daerah lainnya masuk kelompok kerawanan rendah, yaitu Kota Kotamobagu (1,80) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (1,98). Selengkapnya indeks kerawanan dari enam daerah tersebut bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 3.23 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Utara

| | KOTA KOTAMOBAGU | KAB. MINAHASA | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KAB. SITARO | KAB. MINAHASA TENGGARA | KAB. KEP. TALAUD |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| INDEKS | 1.80 | 2.16 | 1.98 | 2.11 | 2.14 | 2.54 |
| Dimensi PENYELENGGARAAN | 1.82 | 1.71 | 1.53 | 1.96 | 2.33 | 2.78 |
| Dimensi KONTESTASI | 2.03 | 2.53 | 2.40 | 2.30 | 2.07 | 2.53 |
| Dimensi PARTISIPASI | 1.56 | 2.17 | 1.94 | 2.06 | 2.06 | 2.33 |

Jika dilihat dari data di atas, Kota Kotamobagu berada dalam kategori kerawanan rendah (1,80). Meskipun ada di kerawanan rendah, daerah ini memiliki potensi kerawanan paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini terutama terlihat pada dimensi kontestasi (2,03). Variabel kekerabatan mendapatkan skor (3,00) terkait dengan kasus pasangan calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana pada pilkada sebelumnya.

Sementara untuk dimensi penyelenggaraan (1,82), pada variabel integritas penyelenggara ada di angka 2,00. Posisi skor ini disebabkan adanya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pengawasan. Sementara itu untuk dimensi partisipasi (1,56), meski di tingkat kerawanan paling rendah, tidak adanya laporan dari pemantau pemilu dan tidak adanya advokasi dari masyarakat sipil tentang berbagai pelanggaran pemilu, membuat dimensi partisipasi tetap harus diantisipasi kerawanannya pada Pilkada 2018.

Kabupaten Minahasa memiliki indeks 2,16, menjadikannya masuk dalam kategori rawan sedang dalam IKP Pilkada 2018. Untuk dimensi kontestasi (2,53) lebih rawan dibanding dua dimensi lainnya. Salah satu variabel di dimensi kontestasi, yaitu variabel kampanye (4,33), berada di angka kerawanan tinggi. Potensi rawan tersebut muncul dari kasus pilkada sebelumnya, terutama terkait materi kampanye hitam tentang dominasi gereja dan isu etnis yang marak digunakan. Diperkirakan isu serupa akan kembali digunakan pada Pilkada 2018. Praktik politik uang dan pelibatan ASN serta penggunaan fasilitas negara juga terjadi pada kampanye pilkada sebelumnya. Untuk dimensi penyelenggaraan secara umum memang berada di tingkat kerawanan rendah (1,71). Namun pada variabel kekerasan terhadap penyelenggara, angka indeksnya ada di posisi kerawanan sedang (2,33). Fakta yang mendukung kerawanan di variabel kekerasan tersebut adalah terjadinya intimidasi terhadap anggota KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten Minahasa pada pilkada sebelumnya. Sementara itu, dimensi partisipasi (2,17) perlu diantisipasi pada variabel pengawasan masyarakat, yakni terkait tidak adanya laporan dari pemantau kepada pengawas pemilu.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki indeks kerawanan pada Pilkada 2018 yang termasuk dalam kategori rawan rendah dengan nilai indeks 1,98. Pada dimensi penyelenggaraan (1,53), muncul potensi rawan dari variabel profesionalitas penyelenggara. Hal ini terkait penganggaran pilkada. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung lebih responsif kepada anggaran penyelenggaraan KPU Kabupaten dibanding untuk anggaran pengawasan. Untuk dimensi kontestasi (2,40), perlu diantisipasi variabel kampanye (3,00) dan kekerabatan (3,00). Meski tahapan pencalonan belum dimulai, perang pernyataan melalui media massa sudah terjadi antar-bakal calon. Pada pilkada sebelumnya terdapat hubungan kekerabatan antara petahana dan pasangan calon. Sementara dalam dimensi partisipasi (1,94), variabel masyarakat (2,50) harus diantisipasi karena minimnya lembaga pemantau yang melaporkan hasil pemantauan.

Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Sitaro. Daerah ini termasuk ke dalam kategori rawan sedang (2,11) dengan kerawanan tertinggi pada dimensi kontestasi (2,30). Potensi kerawanan terlihat pada variabel kampanye (3,00) dan kontestan (3,00). Materi kampanye yang mengandung isu SARA, fitnah (*hoax*), hasutan, adu domba marak digunakan pada pilkada sebelumnya dan diperkirakan akan digunakan kembali pada Pilkada 2018. Begitu pula halnya dengan praktik politik uang dan keterlibatan ASN dalam tahapan kampanye. Dimensi kontestasi (2,30), dilihat dari variabel kontestan diperkirakan petahana Wakil Bupati akan maju menjadi bakal calon bupati dari jalur perseorangan. Sementara jika dilihat dari dimensi penyelenggaraan (1,96), potensi rawan muncul dari variabel profesionalitas penyelenggara (2,20). Hal ini terutama terkait pencairan anggaran pilkada.

Sementara itu di Kabupaten Minahasa Tenggara dimensi yang memberi kontribusi utama dalam indeks kerawanan sedang (2,14) adalah dimensi penyelenggaraan (2,33) yang dapat dilihat dari beberapa variabel seperti variabel profesionalitas penyelenggara (3,00) dan variabel kekerasan terhadap penyelenggara (3,00). Kerawanan pada dimensi penyelenggaraan tersebut dapat dilihat dari adanya problem pencairan anggaran pengawasan yang tidak sesuai dengan nilai yang telah disepakati antara Panwaslu dan Pemerintah Kabupaten yang berdampak pada kinerja pengawasan pemilu. Sementara di aspek kekerasan terhadap penyelenggara, pada pemilihan sebelumnya terjadi penyerangan kantor KPU Kabupaten dan Panwaslu oleh massa yang kalah dalam pilkada saat proses rekapitulasi suara berlangsung.

Selanjutnya untuk dimensi kontestasi (2,07), variabel pencalonan (2,60) berpotensi rawan karena pada pilkada sebelumnya KPU Kabupaten pernah mendiskualifikasi pasangan calon dalam keadaan kontestasi diikuti oleh kedua pasangan calon petahana. Pasangan calon juga memiliki hubungan kekerabatan di mana suami dari calon Bupati Minahasa Tenggara (petahana) adalah Bupati Kepulauan Talaud. Pada dimensi partisipasi (2,06), tingginya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) pada pilkada sebelumnya berpotensi menimbulkan kerawanan pada pilkada 2018. Selain itu, ketiadaan lembaga pemantau pemilu, apalagi tindakan advokasi dan laporan kepada panwaslu, membuat dimensi partisipasi perlu diantisipasi kerawanannya.

Lalu untuk Kabupaten Kepulauan Talaud, indeks kerawanan pemilu Pilkada 2018 berada dalam kategori rawan sedang (2,54). Kontributor

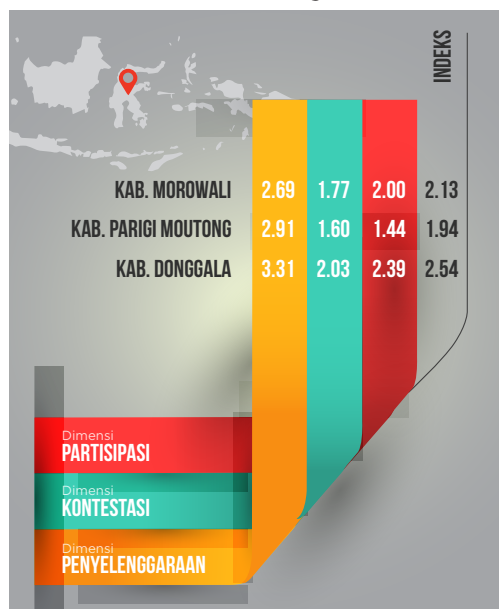
kerawanan sedang tertinggi dari dimensi penyelenggaraan (2,78) di mana sumbangan variabel integritas ada di angka 3,00, dan variabel netralitas penyelenggara dengan skor 3,00. Dalam catatan riset ini terdapat pemberhentian tetap terhadap komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2013 terkait perlakuan tidak adil dan putusan peringatan pada Pemilu Legislatif 2014 atas kasus manipulasi suara. Sementara itu untuk dimensi kontestasi menyumbang indeks di angka 2,53. Dimensi kontestasi ditopang di antaranya oleh variabel pencalonan (3,80) dan variabel kontestan (3,00). Dua variabel itu justru berada di posisi kerawanan tinggi sehingga perlu diantisipasi dengan baik.

Berdasarkan data yang terdokumentasi, pada dimensi kontestasi terdapat dukungan ganda calon perseorangan pada pilkada sebelumnya. Kemudian kasus diskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan terdapatnya sengketa pencalonan. Konflik yang pernah terjadi di salah satu pasangan calon yang berlokasi di Desa Riung dan Riung Utara pada Pilkada 2013 juga perlu diantisipasi agar tidak terulang kembali. Pada dimensi partisipasi tingkat kerawanannya berada di angka 2,33. Potensi rawan yang diperkirakan akan muncul ada di variabel pengawasan masyarakat (4,00) yang ditopang oleh ketiadaan lembaga pemantau, NGO, dan CSO dalam melakukan pemantauan pengawasan pemilu hingga melakukan advokasi dan melaporkan temuan pemantauan kepada pengawas pemilu.

3.24 Provinsi Sulawesi Tengah

Pilkada 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah akan diselenggarakan di tiga kabupaten, yakni Morowali, Parigi Moutong, dan Donggala. Dalam perhelatan pilkada tersebut, dua daerah masuk dalam kategori kerawanan sedang, yakni Kabupaten Morowali (2,13) dan Kabupaten Donggala (2,54). Sementara Kabupaten Parigi Moutong masuk dalam kategori rawan rendah (1,94). Berikut data lengkap indeks kerawanan dari tiga daerah tersebut.

Tabel 3.24 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Tengah



Berdasarkan data di atas, tampak indeks kerawanan di Kabupaten Donggala termasuk ke dalam kategori rawan sedang dengan indeks 2,54. Kerawanan tertinggi terdapat pada dimensi penyelenggaraan (3,31) yang ditopang di antaranya oleh variabel integritas penyelenggara. Sanksi etik terkait netralitas penyelenggara pada pilkada sebelumnya pernah diberikan. Disusul fakta tentang korupsi dana pilkada oleh ketua dan bendahara KPU Kabupaten. Sementara itu dari dimensi kontestasi (2,03), variabel pencalonan (3,80) dan variabel kampanye (2,33) berpotensi rawan. Pada tahap pencalonan pilkada sebelumnya terjadi diskualifikasi calon karena tidak memenuhi syarat dan juga terdapat sengketa pencalonan. Pada tahapan kampanye terjadi praktik politik uang yang dilakukan salah satu tim pemenangan pasangan calon yang kemudian diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara 4 (empat) bulan.

Sementara itu pada dimensi partisipasi (2,39), variabel karakteristik lokal (3,00) perlu diantisipasi. Hal ini terkait kondisi di Kecamatan Pimembani yang masih berlangsung pemilihan seperti sistem noken di Papua. Pilihan warga ditentukan oleh kepala adat dan proses pencoblosan juga diwakilkan sehingga pada pelaksanaan pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mencapai 100 persen dengan pilihan yang seragam.

Kabupaten Morowali berada pada tingkat kerawanan sedang (2,13). Dimensi penyelenggaraan menyumbang tingkat kerawanan di angka indeks 2,69. Dimensi penyelenggaraan tersebut ditopang oleh variabel integritas penyelenggara (3,00) dan profesionalitas penyelenggara (3,40). Dari data yang berhasil dikumpulkan terdapat putusan DKPP berupa pemberhentian tetap terhadap anggota KPU Kabupaten pada pilkada sebelumnya akibat kelalaian mereka yang menyebabkan diselenggarakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS.

Sementara pada dimensi kontestasi (1,77), potensi kerawanan ada pada variabel kekerabatan (3,00). Dari informasi yang telah dihimpun, adik kandung bupati yang saat ini menjabat diperkirakan sebagai kandidat kuat calon bupati pada Pilkada 2018. Sedangkan pada dimensi partisipasi (2,00), kerawanan diperkirakan terkait adanya data 12 ribu pemilih yang berstatus sebagai tenaga kerja di perusahaan yang pada pilkada sebelumnya tidak bisa memilih karena tidak mendapatkan izin dari perusahaan. Sekali lagi ketiadaan lembaga pemantau dalam pemantauan pengawasan pemilu juga menyumbang potensi kerawanan.

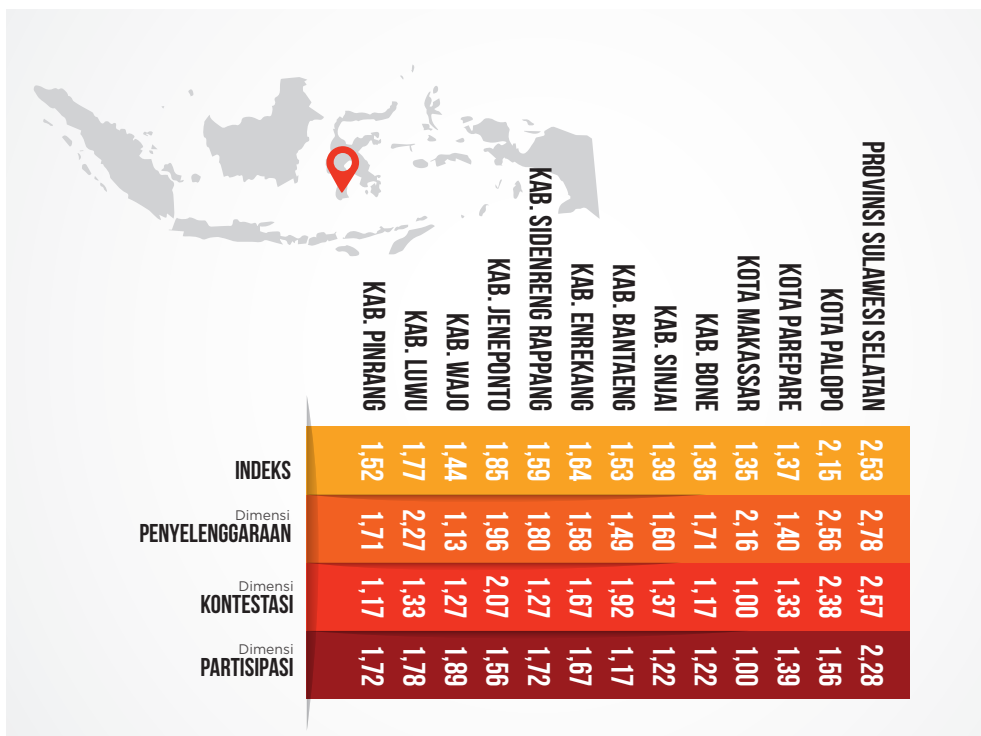
Untuk Kabupaten Parigi Moutong, indeks mencatat daerah ini berada dalam kategori rawan rendah (1,94). Dari tiga dimensi yang berkontribusi, kerawanan tertinggi terdapat pada dimensi penyelenggaraan (2,91). Salah satu variabel yang menyumbang kerawanan pada dimensi penyelenggaraan adalah variabel integritas penyelenggara (3,00). Tim riset mencatat ada putusan pemberhentian sementara oleh DKPP untuk penyelenggara pemilu karena persoalan surat suara. Selain itu, pada aspek profesionalitas penyelenggara terdapat fakta sebelumnya berupa terhambatnya kesepakatan penganggaran pengawasan yang berpotensi rawan pada variabel profesionalitas penyelenggara (3,40).

Selanjutnya untuk dimensi kontestasi (1,60), kemungkinan kembali majunya petahana pada Pilkada 2018 berpotensi melahirkan kerawanan. Hal ini terjadi jika tidak diberikan perhatian pada aspek pengawasan pilkada yang baik. Potensi kerawanan itu misalnya terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara pada tahapan kampanye. Terakhir, dalam dimensi partisipasi (1,44), potensi kerawanan terjadi pada variabel hak pilih (2,33). Ada sekitar 60 ribu pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP. Ditambah pula tidak adanya laporan pemantauan dan advokasi dari lembaga pemantau yang turut menyumbang potensi kerawanan pada Pilkada 2018.

3.25 Provinsi Sulawesi Selatan

Selain pemilihan gubernur, Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota di 12 daerah. Dilihat dari pengukuran indeks kerawanannya, hampir keseluruhan masuk dalam kategori kerawanan rendah, kecuali untuk provinsi yang masuk kerawanan sedang (2,53) dan Kota Palopo (2,15). Lebih lanjut tingkat kerawanan itu dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 3.25 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Selatan



Berdasarkan tabel di atas, kerawanan tingkat provinsi muncul karena kontribusi dimensi penyelenggaraan yang hampir masuk dalam kategori kerawanan tinggi, yakni 2,78. Terkait penyelenggaraan ini, ada satu kasus pidana yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Sedangkan untuk dimensi kontestasi dan partisipasi, masing-masing memperoleh indeks 2,57 dan 2,28. Beberapa persoalan yang mengemuka berkontribusi dalam penilaian indeks seperti keterlibatan ASN pada pilkada sebelumnya yang dilakukan oleh keluarga petahana, isu kekerabatan pada pilkada sebelumnya, serta kasus kekerasan pada pemilih namun tidak melaporkannya secara resmi.

Sementara itu Kota Palopo masuk dalam kerawanan sedang yang dikontribusikan dari dimensi penyelenggaraan (2,56) dan kontestasi (2,38). Hal ini dikarenakan beberapa kasus antara lain adanya putusan pemberhentian tetap terkait netralitas dan satu putusan DKPP berupa peringatan pada pilkada sebelumnya. Pilkada sebelumnya juga ditemukan kasus pembakaran kantor Panwas Palopo. Selain itu juga tercatat kasus

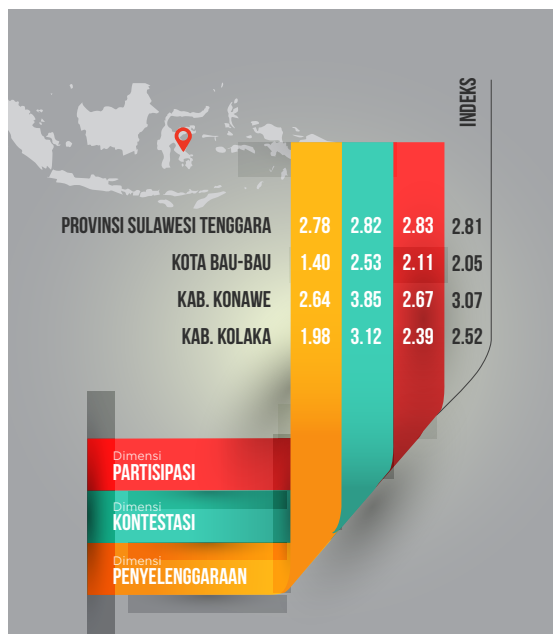
intimidasi terhadap penyelenggara, bahkan kasusnya lebih dari tiga kali. Selain itu kasus politik uang juga dirasakan terjadi meskipun buktinya masih susah terkuak.

Daerah lainnya indeks kerawanannya cukup rendah. Akan tetapi beberapa daerah menunjukkan adanya kerawanan sedang pada dimensinya. Kota Makassar pada dimensi penyelenggaraan berada di kerawanan sedang (2,16). Salah satu yang memberi kontribusi pada dimensi penyelenggaraan adalah adanya kasus pemberhentian tetap penyelenggara pemilu. Sedangkan Kabupaten Jeneponto memiliki kerawanan sedang pada dimensi kontestasi (2,07) dan Kabupaten Luwu pada dimensi penyelenggaraan (2,27). Kasus yang muncul di Jeneponto terkait potensi munculnya politik kekerabatan antara bakal calon dengan sekretaris daerah. Selain itu ada juga kasus intimidasi oleh petahana kepada penyelenggara pada pilkada sebelumnya serta diskualifikasi calon dan sengketa pencalonan. Sementara Kabupaten Luwu terkait putusan DKPP yang memberhentikan penyelenggara dan satu kasus peringatan atas kasus kelalaian pada proses pemilu.

3.26 Provinsi Sulawesi Tenggara

Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan satu pemilihan walikota dan wakil walikota, serta dua pemilihan bupati dan wakil bupati. Kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada tersebut adalah Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada IKP Pilkada 2018 berada di peringkat ke-5 tertinggi di antara provinsi di Indonesia. Provinsi ini mendapat skor 2,81 dan termasuk dalam kategori kerawanan sedang namun masih mendekati kerawanan tinggi. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota hanya terdapat satu kabupaten yang termasuk dalam kategori kerawanan tinggi, yakni Kabupaten Konawe (3,07). Sisanya adalah daerah yang termasuk dalam kerawanan sedang. Secara berturut-turut IKP Pilkada 2018 di kabupaten/kota dari yang tertinggi adalah Kabupaten Kolaka (2,52) dan Kota Bau-Bau (2,05). Lebih lanjut bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.26 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara



Skor IKP Pilkada 2018 di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori kerawanan sedang mendekati tinggi (2,81). Meskipun demikian, beberapa variabel dalam dimensi cukup tinggi seperti dimensi penyelenggaraan di mana variabel integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara mendapatkan angka yang tinggi (3,00). Beberapa faktor yang menjadikan dimensi penyelenggaraan berada di kerawanan tinggi adalah pada pilkada sebelumnya ada dua putusan DKPP yang memberhentikan lima anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka dinilai melanggar asas mandiri, jujur, adil, dan proporsional.

Pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, DKPP memberhentikan satu anggota Panwaslu dan satu anggota diberikan peringatan keras di Kota Kendari. DKPP juga memberhentikan satu orang anggota PPK dan memberikan peringatan keras kepada empat orang KPU Kota Kendari. Di sisi lain, terkait data pemilih, pada pilkada sebelumnya serta Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 masih banyak ditemukan daftar pemilih yang bermasalah, seperti data pemilih ganda, fiktif, meninggal dunia, belum cukup umur, dan TNI/Polri aktif. Dari sisi penyediaan akses pun hanya sekadar penyediaan kertas braille bagi penyandang tuna netra.

Kekerasan kepada penyelenggara pemilu juga terjadi dalam bentuk perusakan sekretariat dan mobil anggota KPU Kabupaten pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014.

Kemudian pada dimensi kontestasi terdapat juga angka kerawanan yang cukup tinggi, yaitu 2,82, di mana angka yang tinggi pada variabel kampanye (3,67) dan kekerabatan (3,00). Tercatat isu SARA yang beredar di masyarakat pada saat kampanye. Isu yang marak didengungkan adalah seputar putra daerah dan non-putra daerah. Hal ini terjadi pada pilkada sebelumnya dan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Kondisi politik SARA itu diprediksi masih akan muncul pada Pilkada 2018. Terkait variabel kekerabatan, menjelang Pilkada 2018 teridentifikasi adanya bakal calon yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan petahana.

Sementara itu pada dimensi partisipasi, angka yang muncul juga cenderung tinggi, walau masih termasuk dalam kategori kerawanan sedang, yaitu 2,83. Variabel yang berkontribusi atas tingginya skor pada dimensi ini adalah variabel hak pilih 3,00 dan karakteristik lokal (3,00). Pada variabel partisipasi pemilih, pada pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih kurang dari 40 persen. Sementara soal karakteristik lokal, permasalahan yang muncul adalah kondisi geografis daerah terkait kondisi permukaan geografis Sulawesi Tenggara yang terdiri atas daerah pegunungan, lembah, dan laut lepas. Masih terdapat daerah-daerah yang sulit untuk diakses, apalagi bila terjadi cuaca buruk seperti hujan yang menjadikan kondisinya semakin tidak kondusif.

Secara garis besar pada tingkatan dimensi di pilkada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara cenderung tinggi pada dimensi kontestasi dan partisipasi. Pada dimensi kontestasi, kerawanan cukup tinggi pada variabel kampanye. Sedangkan di dimensi partisipasi kecenderungan kerawanan tinggi terlihat pada variabel pengawasan/kontrol masyarakat.

Kabupaten Konawe mendapat peringkat ke-5 sebagai kabupaten dengan kerawanan tertinggi. Wilayah ini mendapat skor total IKP 3,07. Angka yang mencolok ada di variabel kampanye dan kekerabatan, yaitu 5,00 (kerawanan tinggi), variabel integritas penyelenggara (3,00), variabel pencalonan (3,40), hak pilih (3,00), dan variabel pengawasan/kontrol masyarakat (3,00). Pada variabel kampanye, peristiwa yang menguat adalah adanya praktik isu SARA, hasutan, dan fitnah pada tahapan kampanye. Selain itu, politik uang juga ditemukan dengan modus memberikan bantuan sosial. ASN juga ditemukan terlibat secara

langsung pada kegiatan kampanye salah satu pasangan calon. Temuan langsung Panwaslu menunjukkan adanya pasangan calon yang ikut serta dalam kegiatan penyerahan bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, termasuk penggunaan mobil dinas untuk kampanye.

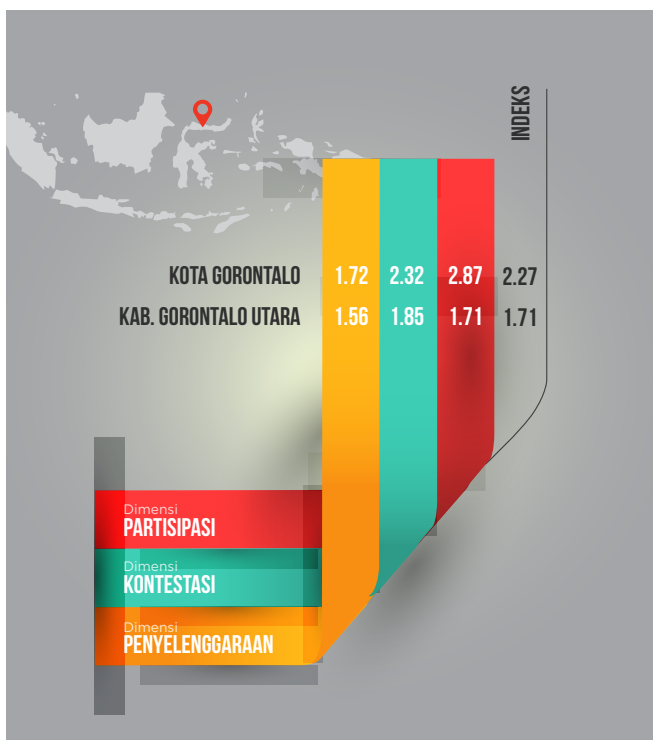
Selanjutnya untuk variabel kekerabatan juga potensial rawan. Menjelang Pilkada 2018, petahana kembali mencalonkan sebagai calon bupati. Pada Pilkada sebelumnya ditemukan adanya hubungan kekerabatan pasangan calon dengan kepala daerah di tempat lain, bahkan ditemukan juga kekerabatan antara penyelenggara dengan pasangan calon. Pada variabel integritas penyelenggara pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, terdapat putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten karena mengeluarkan keputusan meloloskan salah satu caleg yang belum melampirkan semua form yang dibutuhkan. Terkait variabel profesionalitas penyelenggara, pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 terdapat juga putusan DKPP yang memberhentikan ketua KPU Kabupaten terkait sengketa calon dan juga kurangnya akses bagi penyandang disabilitas di TPS-TPS.

Semua daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan Pilkada 2018 memiliki indeks kerawanan yang tinggi pada variabel kekerabatan. Di Kabupaten Kolaka misalnya, tercatat adanya hubungan kekerabatan antara pasangan calon pada pilkada sebelumnya. Skor relatif tinggi juga terlihat pada variabel pengawasan/kontrol masyarakat. Satu lagi di Kota Bau-Bau, lembaga pemantau teridentifikasi ada namun tidak ada tindakan advokasi dan laporan yang diberikan ke Panwaslu. Hal ini menjadi potret rendahnya partisipasi publik dalam memantau proses politik di pilkada.

3.27 Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo tidak menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Akan tetapi ada dua kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil Bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota, yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Indeks kerawanan Kota Gorontalo masuk dalam kerawanan sedang dengan indeks 2,27, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara berada di kerawanan rendah (1,71). Data lebih jelas terlihat di bawah ini.

Tabel 3.27 IKP Pilkada 2018 Provinsi Gorontalo



Berdasarkan tabel di atas, kerawanan pada tingkat dimensi di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo semuanya berada pada kategori kerawanan sedang dan rendah. Namun terdapat variabel integritas penyelenggara di Kota Gorontalo yang berada di kerawanan tinggi (3,00). Hal ini disebabkan adanya putusan DKPP terkait netralitas penyelenggara. Pada pilkada sebelumnya, ada tindakan keberpihakan yang dilakukan KPU kota dan berujung peringatan. Sedangkan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, ada lima komisioner KPU kota diberhentikan walau baru tiga bulan menjabat.

Selain variabel integritas penyelenggaraan, terdapat juga kerawanan tinggi di variabel kekerasan terhadap penyelenggara dengan skor 3,00. Hal ini dikarenakan kejadian kekerasan kepada Panwaslu Kota Gorontalo pada pilkada sebelumnya. Kejadian kekerasan tersebut berupa ancaman akan dihancurkannya rumah anggota Panwaslu, termasuk juga adanya kejadian pelemparan rumah Panwaslu sehingga kaca-kaca rumah pecah, ditambah lagi ada pemukulan terhadap pengawas TPS oleh salah

satu pasangan calon. Hal ini terjadi karena pasangan calon bersangkutan didiskualifikasi tiga hari sebelum pencoblosan. Juga dilaporkan sempat ada pengepungan dan ancaman terhadap Sekretariat KPU Daerah.

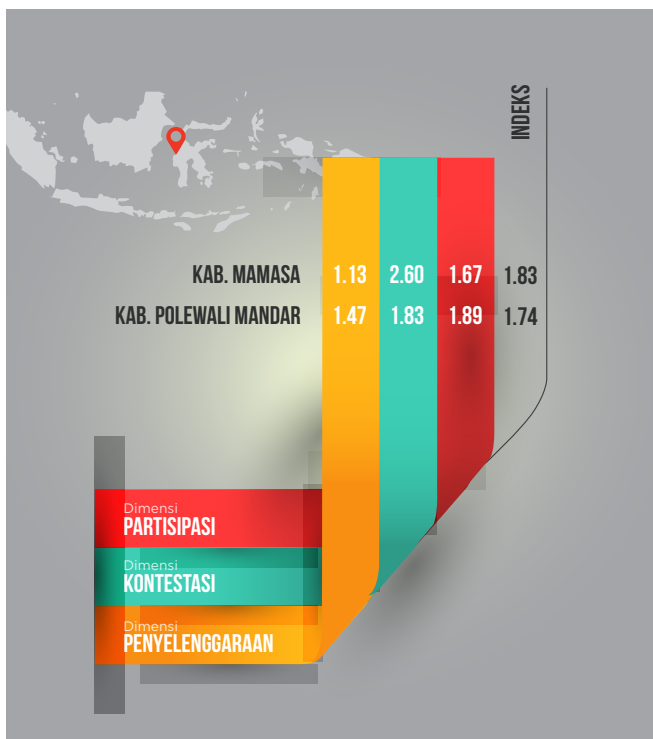
Skor cukup tinggi di kedua daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 tersebut untuk variabel kampanye di dimensi kontestasi, yaitu Kota Gorontalo (3,67) dan Kabupaten Gorontalo Utara (3,00). Tingginya indeks di dimensi kontestasi tersebut ditopang oleh kejadian kampanye hitam di Kota Gorontalo. Ada kasus penghinaan keluarga yang dilakukan secara personal. Selain itu, ditemukan juga praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon sendiri di salah satu kecamatan. Tim peneliti juga mencatat dan menemukan informasi terkait keterlibatan ASN dalam dukung mendukung pasangan calon dengan melakukan mobilisasi PNS untuk mengikuti kampanye.

Terakhir di Kabupaten Gorontalo Utara pada Pilkada 2013, ada calon yang diduga melakukan tindakan asusila, termasuk juga kasus politik uang yang ditemukan dengan berkedok pengedaran bibit tanaman. Sama dengan daerah lain, di Kabupaten Gorontalo Utara mobilisasi ASN juga terjadi dengan modus bupati petahana membagi-bagi ASN perwilayah untuk melakukan kegiatan kampanye.

3.28 Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat akan menyelenggarakan pilkada di dua daerah, yakni Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Pilkada di kedua daerah ini masuk dalam kategori kerawanan rendah. Data nilai indeks IKP Pilkada 2018 di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.28 IKP Pilkada 2018 Provinsi Sulawesi Barat



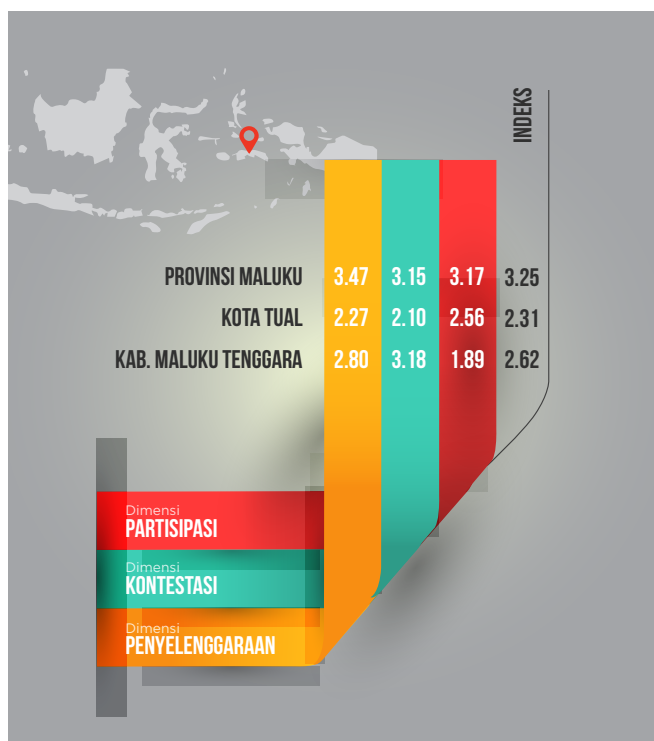
Berdasarkan hasil skor keseluruhan dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), Kabupaten Mamasa memiliki skor nilai indeks 1,83. Nilai dimensi kontestasi memiliki nilai 2,60, lebih tinggi dibandingkan pada dimensi penyelenggaraan (1,13) dan pada dimensi partisipasi (1,67). Nilai dimensi kontestasi di Kabupaten Mamasa lebih tinggi karena pada variabel kampanye, kontestasi, dan kekerabatan memiliki nilai masing-masing 3,00.

Sementara Kabupaten Polewali Mandar memiliki nilai indeks 1,74. Dengan nilai dimensi penyelenggaraan 1,47, dimensi kontestasi 1,83, dan dimensi partisipasi 1,89; secara umum karakteristik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kategori rendah. Namun patut digarisbawahi bahwa meski skor total suatu kabupaten/kota tergolong tidak tinggi, tetapi ada variabel dan indikator yang memiliki skor kerawanan tinggi di daerah tersebut yang memerlukan perhatian khusus.

3.29 Provinsi Maluku

Provinsi Maluku akan menyelenggarakan pilkada untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Indeks kerawanan untuk perhelatan pilkada tingkat provinsi masuk dalam kategori kerawanan tinggi (3,25). Sedangkan Pilkada 2018 di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara masuk kategori rawan sedang dengan angka indeks masing-masing 2,31 dan 2,62. Lebih lanjut detail indeks kerawanan Pilkada 2018 di Provinsi Maluku dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.29 IKP Pilkada 2018 Provinsi Maluku



Kerawanan tinggi untuk Pilkada 2018 Provinsi Maluku dikontribusikan oleh semua dimensi, baik penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi yang seluruhnya masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan (3,47), muncul karena adanya tiga putusan DKPP yang menyatakan penyelenggara melanggar kode etik tentang netralitas terkait asas mandiri, jujur, adil, dan

profesionalitas pada Pilkada Tahun 2017. Sementara itu pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 terdapat sembilan putusan DKPP.

Kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi (3,15) dan dimensi partisipasi juga masuk kategori kerawanan tinggi (3,17). Beberapa persoalan yang pernah muncul, misalnya kasus perusakan terhadap fasilitas penyelenggara, baik KPU Kabupaten maupun Panwaslu. Perusakan tersebut misalnya pembakaran gedung kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah dan kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Tidak itu saja, bahkan sasaran kekerasan tersebut tidak saja ditujukan pada bangunan/gedung, melainkan juga kekerasan fisik terhadap penyelenggara, baik KPU Kabupaten maupun Panwaslu. Kejadian kekerasan fisik selalu diiringi dengan intimidasi terhadap penyelenggara, baik KPU Kabupaten maupun Panwaslu yang terjadi lebih dari tiga kali.

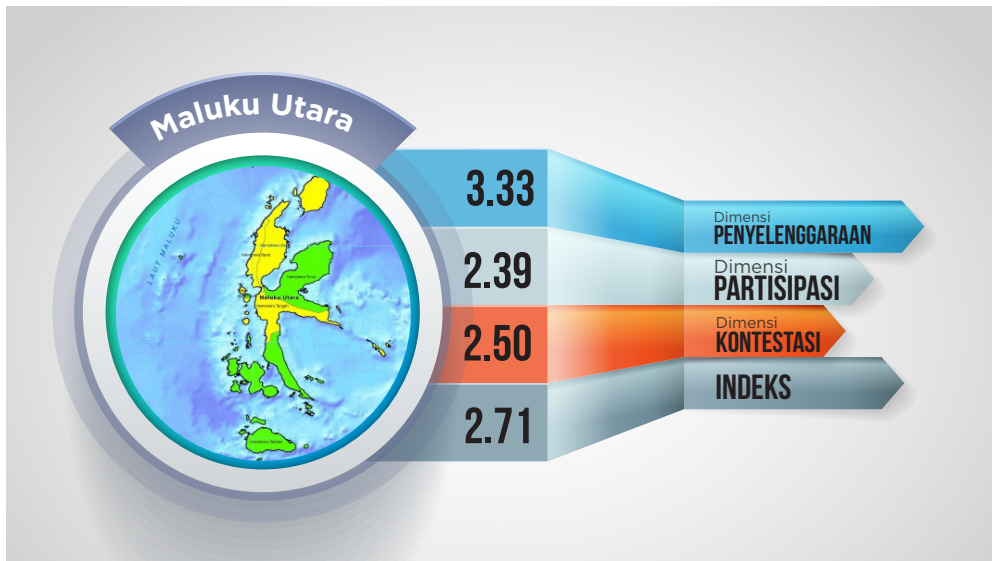
Indeks kerawanan pada pemilihan Wali Kota Tual secara umum pada setiap dimensi dalam kategori kerawanan sedang (2,31), seperti dimensi penyelenggaraan (2,27), dimensi kontestasi (2,10), dan dimensi partisipasi (2,56). Kejadian kekerasan fisik terhadap anggota Panwaslu pada Pilkada 2013 kerap terjadi yang membuat keamanan penyelenggara menjadi persoalan serius.

Sedangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, meskipun indeksnya di kerawanan sedang (2,62), namun angkanya lebih tinggi dari indeks kerawanan di Kota Tual. Dimensi yang perlu mendapatkan perhatian adalah dimensi kontestasi karena menempati posisi di kerawanan tinggi (3,18). Hal ini dikarenakan kasus intimidasi terhadap penyelenggara untuk melakukan penundaan Pilkada 2013. Sedangkan dimensi lainnya masih dalam kategori rawan sedang dan rendah.

3.30 Provinsi Maluku Utara

Pilkada 2018 di Provinsi Maluku Utara hanya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak ada pilkada tingkat kabupaten/kota Tahun 2018. Dilihat dari indeks kerawanannya, Provinsi Maluku Utara masuk dalam kerawanan sedang dengan indeks 2,71. Meskipun dalam kerawanan sedang, beberapa dimensinya menunjukkan kerawanan tinggi. Dimensi penyelenggaraan masuk dalam kategori tinggi dengan indeks 3,33. Sedangkan untuk dimensi lainnya masih dalam kategori kerawanan sedang. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.30 IKP Pilkada 2018 Provinsi Maluku Utara



Tingginya angka kerawanan di dimensi penyelenggaraan ditopang oleh adanya putusan DKPP berupa peringatan kepada tiga komisioner KPU Provinsi atas kasus manipulasi suara. Ada juga kejadian di mana anggota KPU Provinsi dipenjarakan karena kasus pengadaan mobil di Halmahera Selatan pada pilkada sebelumnya. Kasus korupsi juga pernah terjadi berupa penggelapan dana Pemilu Legislatif 2014, meski masih mangkrak di kejaksaan. Selain itu, dari aspek profesionalitas, pencairan anggaran pengawasan terlambat (pilkada sebelumnya dan Pilgub 2018).

Beberapa persoalan lain, seperti adanya temuan terkait daftar pemilih lebih dari satu temuan terkait pemilih ganda, menambah potensi kerawanan. Pada dimensi kontestasi, pada pilkada sebelumnya terjadi perusakan fasilitas penyelenggara, yaitu di Halmahera Selatan, perusakan kantor KPU Kabupaten, dan perusakan kantor camat di Halmahera Tengah karena aparaturnya dianggap tidak netral. Selain itu, terjadi pemukulan Panwascam di Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, serta intimidasi terhadap penyelenggara pada pilkada sebelumnya. Kejadian pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 ini membuat indikasi kerawanan semakin kuat menjelang Pilkada 2018. Hal paling mutakhir, intimidasi terkait rekrutmen Panwascam di Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur telah terjadi.

Titik kerawanan semakin meluas ketika pada pilkada sebelumnya hampir di semua kabupaten/kota petahana maju lagi. Sengketa pencalonan terkait dugaan ijazah palsu terjadi juga di Maluku Utara. Sementara itu, pada tahapan kampanye digunakan isu menyangkut suku, yakni dengan menyebar isu bagi suku tertentu untuk tidak memilih calon dari luar provinsi atau kabupaten. Di sisi lain, yang harus dipilih adalah pasangan calon yang mereka sebut sebagai “putera daerah”. Tidak hanya itu, bahkan pada pilkada sebelumnya modus kampanye dengan menyerang karakter personal serta keluarga juga terjadi.

Kekhawatiran lain yang perlu diantisipasi adalah soal politik uang. Kasus temuan politik uang terjadi pada saat Pilkada Kepulauan Morotai 2017. Praktik politik uang dilakukan oleh camat. Nilai uang yang disebarakan berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 3.000.000 per orang. Selain politik uang, kerawanan juga ditentukan oleh keterlibatan ASN dalam mendukung kandidat. Terdapat lima kasus di Pulau Morotai yang melibatkan PNS dan kepala desa sebagai terlapor. Tiga kepala desa yang dilaporkan terlibat dalam kampanye pasangan calon, sementara dua PNS terlibat pemasangan baliho dan foto bersama kandidat. Sedangkan di Halmahera Tengah terdapat satu kasus PNS yang juga anggota PPS mengikuti konvoi pasangan calon tertentu. Tokoh yang paling banyak terlibat adalah kepala desa dalam kampanye dengan memobilisasi warga.

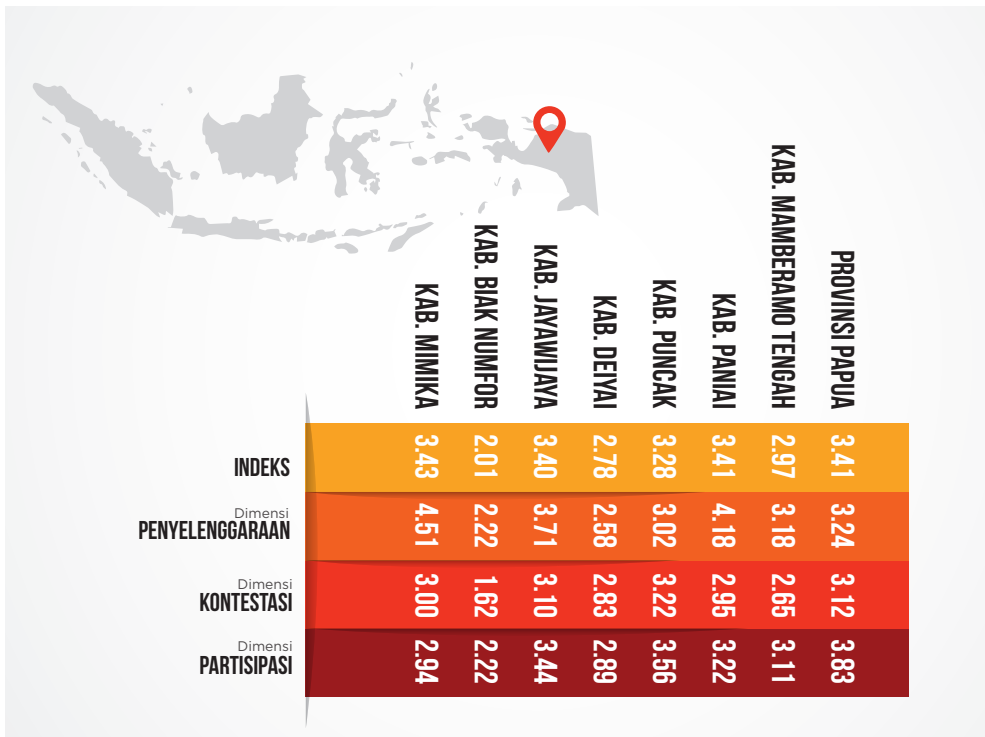
Kerawanan lain yang ada di Maluku Utara adalah penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik, seperti mobil dinas. Hal yang perlu diperhatikan dari proses elektoral sebelumnya adalah kasus di mana terjadi rotasi jabatan pada rentang satu sampai tiga bulan sebelum pelaksanaan pilkada. Rotasi kepala desa yang dianggap tidak dapat mengamankan kepentingan partai politik atau calon juga kerap terjadi. Hubungan kekerabatan juga satu hal yang patut diperhatikan di Maluku Utara. Pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah, salah satu pasangan calon mempunyai hubungan kekerabatan (suami-istri) dengan petahana. Di Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat dua bakal calon keluarga gubernur pada yang akan mencalonkan.

3.31 Provinsi Papua

Provinsi Papua akan menyelenggarakan pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten lainnya. Dilihat dari indeks kerawanan, hampir seluruhnya masuk kategori kerawanan tinggi; IKP Pilkada 2018 di Papua adalah Pilkada

Provinsi Papua (3,41), Pilkada Kabupaten Paniai (3,41), Pilkada Kabupaten Puncak (3,28), Pilkada Kabupaten Jayawijaya (3,40), dan Pilkada Kabupaten Mimika (3,43). Beberapa daerah masuk kategori kerawanan sedang namun cenderung tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Tengah (2,97), Kabupaten Deiyai (2,78), dan Kabupaten Biak Numfor (2,01). Data detailnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.31 Tabel IKP Pilkada 2018 Provinsi Papua



Angka Indeks kerawanan 3,41 yang dimiliki Provinsi Papua, menjadikannya masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Potensi rawan perlu diantisipasi dari dimensi penyelenggara terkait variabel integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara. Pada pilkada sebelumnya, ketua dan anggota Bawaslu Papua tersangkut korupsi dana pilgub yang berakhir pada putusan kasasi. Kasus korupsi juga menimpa anggota KPU Papua, sehingga DKPP mengeluarkan putusan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Profesionalitas terkait pengawasan daftar pemilih juga perlu diantisipasi karena pada pilkada

sebelumnya Panwas menemukan pemutakhiran dilakukan tidak benar dan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) melebihi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2). Pemutakhiran daftar pemilih yang tidak benar juga berdampak pada penyediaan akses bagi penyandang disabilitas di TPS karena banyak pemilih penyandang disabilitas tidak terdata dengan benar. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara perlu diperhatikan lantaran pada pemilihan sebelumnya terjadi kasus perusakan fasilitas penyelenggara yang terjadi di Kabupaten Yapen, Mimika, Biak, dan Paniai. Intimidasi terhadap penyelenggara juga pernah terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 dengan kasus adanya ancaman terhadap KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua oleh calon legislatif.

Pada dimensi kontestasi, potensi rawan muncul dari variabel pencalonan terkait dukungan ganda pada pencalonan dan diskualifikasi pasangan calon. Variabel kampanye perlu diantisipasi karena pada pemilihan sebelumnya materi kampanye bermuatan adu domba dan penghinaan. Kampanye juga banyak melibatkan ASN yang aktif mendukung calon tertentu dan menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas. Praktik politik uang juga terjadi seperti kasus di Wamena, di mana uang dibagikan di lapangan terbuka.

Untuk dimensi partisipasi, perlu diantisipasi potensi rawan dari variabel hak pilih. Kondisi geografis Papua menyebabkan di beberapa daerah membuat pemilih sulit menuju ke TPS, seperti terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah, Asmat, dan enam wilayah pegunungan lainnya. Variabel karakteristik lokal dalam hal ini penggunaan pemilihan sistem noken di Papua perlu diantisipasi kerawannya. Selain itu, kasus kekerasan terhadap pemilih perlu diantisipasi. Pada pilkada sebelumnya terjadi kekerasan terhadap pemilih di TPS yang menimbulkan korban jiwa.

Di Kabupaten Mamberamo Tengah, tingkat kerawanan 2,97 berada dalam kategori sedang yang hampir tinggi. Dimensi yang perlu diantisipasi adalah dimensi penyelenggaraan terkait variabel integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara karena pada pilkada sebelumnya. DKPP pernah mengeluarkan putusan pemberhentian tetap dan peringatan kepada penyelenggara di Kabupaten Mamberamo Tengah atas kasus manipulasi suara dan kelalaian pada proses pemilu. Ketersediaan anggaran pengawasan yang tidak sesuai dengan nilai yang dilakukan panwas ke Pemda juga berpotensi menimbulkan kerawanan. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara perlu diantisipasi karena pada pilkada sebelumnya terjadi lebih dari tiga kali perusakan fasilitas penyelenggara pemilu, berupa pembakaran kantor KPU Kabupaten

dan Panwaslu oleh pendukung pasangan calon karena terlambatnya penetapan pasangan calon terpilih.

Untuk dimensi kontestasi, karena kemungkinan petahana kembali mencalonkan diri maka variabel kampanye menggunakan fasilitas negara dan pelibatan ASN perlu diantisipasi. Konflik antarpeserta pemilu juga perlu diantisipasi seperti pernah terjadi pada pilkada sebelumnya berupa perusakan kotak suara di Kampung Asbol, Pagale, dan Wenelek. Pada dimensi partisipasi, minimnya lembaga pemantau yang melakukan pemantauan dan advokasi perlu diantisipasi.

Sama halnya dengan Provinsi Papua, Kabupaten Paniai berada dalam kategori sangat rawan dengan angka 3,41. Potensi rawan dari dimensi penyelenggaraan yang perlu diantisipasi adalah terkait integritas penyelenggara karena pada pilkada sebelumnya DKPP memberhentikan satu penyelenggara atas kasus konflik kepentingan. Selain kasus etik juga terjadi kasus pidana terkait penyalahgunaan anggaran pilkada. Variabel profesionalitas penyelenggara juga perlu diantisipasi menyangkut ketersediaan anggaran pilkada dan tidak tersedianya TPS akses bagi penyandang disabilitas. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara harus diwaspadai karena pada pilkada sebelumnya terjadi pembakaran kantor KPU kabupaten dan lebih dari tiga kali intimidasi serta upaya kekerasan terhadap anggota Panwaslu dan KPU kabupaten.

Pada dimensi kontestasi, variabel pencalonan perlu diperhatikan karena pada pilkada sebelumnya terdapat dukungan ganda pasangan calon serta diskualifikasi calon dan sengketa pencalonan hingga PTUN. Kembali majunya petahana namun dari paket yang berbeda juga perlu diantisipasi kerawanannya. Pada variabel kampanye, materi kampanye berisi hasutan tentang isu pemekaran juga perlu menjadi perhatian. Mobilisasi ASN oleh petahana, penggunaan mobil dinas untuk operasional kampanye, dan praktik politik uang harus diantisipasi kerawanannya.

Untuk dimensi partisipasi, perlu diantisipasi kondisi geografis di sembilan distrik yang menghambat akses pemilih ke TPS. Pada sembilan distrik tersebut juga berpotensi terjadi ancaman kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Meskipun terdapat beberapa lembaga pemantau, tetapi mereka tidak melakukan advokasi dan pelaporan kepada Panwaslu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan.

Kabupaten Puncak dengan angka kerawanan tinggi (3,28) perlu diantisipasi pada dimensi penyelenggaraan, khususnya pada variabel profesionalitas penyelenggara karena tidak tersedianya TPS akses.

Penggunaan sistem noken dengan pencoblosan diwakilkan kepada kepala suku sehingga pemilih disabilitas tidak datang ke TPS. Pada variabel kekerasan terhadap penyelenggara perlu diantisipasi perusakan kantor KPU kabupaten dan Panwaslu oleh pendukung pasangan calon seperti terjadi pada pilkada sebelumnya. Selain itu intimidasi dan kekerasan terhadap penyelenggara juga berpotensi kembali terjadi pada Pilkada 2018.

Pada dimensi kontestasi potensi muncul dari variabel pencalonan terkait diskualifikasi pasangan calon dan kembali majunya petahana meskipun pecah kongsi. Potensi rawan dari variabel kampanye berkaitan dengan praktik politik uang dan pelibatan ASN serta penggunaan fasilitas negara oleh petahana. Untuk variabel kekerabatan terdapat hubungan kekerabatan antara peserta dengan penyelenggara di mana ketua KPU kabupaten merupakan kerabat dari bupati yang saat ini menjabat yang juga akan kembali maju dalam pencalonan.

Untuk dimensi partisipasi, kondisi geografis pada variabel hak pilih sangat berpotensi menimbulkan kerawanan. Hampir semua TPS sulit dijangkau di semua distrik. Kerawanan lainnya adalah ketiadaan lembaga pemantau, CSO, dan NGO yang melakukan pemantauan pemilu dan melakukan advokasi kepada pemilih.

Sementara itu Kabupaten Deiyai memiliki angka kerawanan 2,78 yang perlu diantisipasi pada dimensi penyelenggaraan. Hal ini terkait variabel integritas penyelenggara di mana pada pilkada sebelumnya DKPP memberhentikan tetap lima komisioner KPU kabupaten karena kasus netralitas. Variabel profesionalitas penyelenggara juga perlu diantisipasi terkait tidak tersedianya TPS akses bagi penyandang disabilitas. Untuk variabel kekerasan terhadap penyelenggara perlu juga diantisipasi karena pada pilkada sebelumnya terjadi intimidasi dan ancaman kepada penyelenggara.

Untuk dimensi kontestasi di Kabupaten Deiyai, potensi rawan pada variabel pencalonan terkait diskualifikasi, sengketa pencalonan, dan kembali majunya petahana. Pada variabel kampanye, praktik politik uang seperti pilkada sebelumnya dengan modus membagikan uang secara terbuka kepada masyarakat kembali terulang. Konflik antarpeserta juga berpotensi rawan karena pada sebelumnya terjadi di Distrik Tigi Barat yang berujung pemungutan suara ulang. Kerawanan pada dimensi partisipasi yang perlu diantisipasi adalah akses pemilih ke TPS. Terdapat distrik yang bisa dijangkau hanya dengan menggunakan pesawat, yaitu Distrik Bouwobado dan Kapiroya. Letak rumah penduduk dengan TPS

sangat jauh dan sulit dijangkau. Ketidakhadiran lembaga pemantau yang melakukan pemantauan dan advokasi di Kabupaten Deiyai juga menjadi salah satu potensi kerawanan yang perlu diantisipasi.

Hal serupa juga ditemukan pada Kabupaten Jaya Wijaya. Kabupaten ini berada dalam kerawanan tinggi dengan indeks 3,40. Dimensi yang perlu diantisipasi adalah dimensi penyelenggaraan terkait profesionalitas dan integritas penyelenggara dimana pada pilkada sebelumnya penyelenggara diberhentikan DKPP atas kasus kelalaian pada proses pemilu. Persoalan ketersediaan anggaran juga perlu diantisipasi karena terjadi keterlambatan penandatanganan dan pencairan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Profesionalitas penyelenggara juga sangat rawan karena tidak ada satupun TPS yang memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara perlu diantisipasi karena pada pilkada sebelumnya terjadi lebih dari tiga kali perusakan terhadap fasilitas penyelenggara dan intimidasi serta kekerasan fisik terhadap penyelenggara.

Untuk dimensi kontestasi, variabel pencalonan perlu diantisipasi khususnya terkait kemungkinan majunya calon petahana. Pada variabel kampanye, penggunaan isu kesukuan dalam kampanye juga berpotensi rawan. Praktik politik uang dan mobilisasi ASN juga berpotensi terjadi pada Pilkada 2018. Variabel kekerabatan pernah terjadi pada pilkada sebelumnya dan bisa kembali terjadi pada Pilkada 2018. Pada dimensi partisipasi, kondisi geografis pada satu distrik yang hanya bisa dijangkau moda transportasi helikopter tentu berpotensi rawan terkait akses pemilih ke TPS. Variabel karakteristik lokal perlu diperhatikan karena tokoh adat cenderung memaksa anggota sukunya untuk mengikuti pilihannya dalam pilkada. Tidak adanya lembaga pemantau juga berpotensi menimbulkan kerawanan.

Sementara itu Kabupaten Biak Numfor masuk dalam kerawanan sedang dengan angka 2,01. Hal yang perlu diantisipasi adalah kerawanan dari dimensi penyelenggaraan terkait integritas dan profesionalitas penyelenggara karena di pilkada sebelumnya, DKPP memberhentikan penyelenggara karena perlakuan tidak adil. Terlambatnya penandatanganan dan pencairan anggaran pengawasan perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat aktivitas pengawasan. Ketiadaan TPS akses bagi penyandang disabilitas juga perlu diantisipasi pada Pilkada 2018.

Dalam dimensi kontestasi, potensi pada variabel pencalonan terkait dukungan ganda, diskualifikasi, dan sengketa pencalonan perlu diantisipasi. Kemungkinan petahana kembali mencalonkan diri juga

perlu diantisipasi terkait mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitas negara karena sudah mulai dilakukan oleh beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan mengeluarkan himbauan agar petahana dipilih kembali.

Lalu indeks kerawanan Pilkada 2018 di Kabupaten Mimika berada di 3,43. Tentu indeks itu ada di kerawanan tinggi. Dimensi penyelenggaraan perlu diantisipasi utamanya pada variabel integritas dan profesionalitas penyelenggara. Pada pilkada sebelumnya dan Pemilu Legislatif 2014, DKPP mengeluarkan dua putusan pemberhentian atas kasus netralitas dan manipulasi suara oleh penyelenggara. Selain kasus etik, penyelenggara juga terlibat kasus pidana, yakni dugaan penyalahgunaan anggaran pilkada oleh Panwas. Terkait ketersediaan anggaran juga berpotensi rawan untuk Pilkada 2018 karena pemerintah daerah belum mengalokasikan APBD bagi KPU Kabupaten Mimika. Pada variabel kekerasan terhadap penyelenggara, potensi rawan muncul karena pada pilkada sebelumnya terjadi lebih dari tiga kali perusakan kantor KPU kabupaten dan Panwaslu serta pembakaran mobil penyelenggara. Tidak hanya itu, anggota Panwas dan KPU juga menerima ancaman dan intimidasi dari tim sukses calon.

Pada dimensi kontestasi perlu diantisipasi kerawanan terkait variabel pencalonan. Dukungan ganda, diskualifikasi, dan potensi kembali majunya calon petahana perlu diantisipasi. Untuk variabel kampanye, pada pilkada sebelumnya tim sukses pasangan calon membagikan uang di Distrik Mimika Baru sebelum pemungutan suara berlangsung. Kemungkinan kembali majunya petahana perlu diantisipasi karena saat ini upaya mobilisasi sudah dilakukan seperti ajakan dari petahana kepada semua kepala dinas ke Batam untuk menghadiri acara ulang tahun. Variabel kekerabatan juga menimbulkan potensi rawan karena hubungan kekerabatan ketua KPU kabupaten dengan salah satu bakal calon pada Pilkada 2018. Untuk dimensi partisipasi, variabel hak pilih terkait akses pemilih menuju TPS perlu diantisipasi. Kondisi geografis sulit dijangkau karena sangat bergantung pada kondisi pasang surut air. Kondisi seperti ini terjadi di tujuh dari 18 distrik di Mimika. Selain itu, tidak adanya laporan dan advokasi dari lembaga pemantau juga berpotensi menimbulkan kerawanan.

BAB 4

ASPEK KERAWANAN DALAM IKP PILKADA 2018

Pada bab ini disajikan sejumlah temuan dan isu-isu yang selama ini mewarnai sebuah kontestasi politik, terutama pada ajang pemilihan kepala daerah. Penentuan isu yang mencuat berdasarkan bacaan terhadap data lapangan yang berhasil dihimpun oleh tim peneliti. Dari banyak aspek atau sektor yang mewarnai proses politik dalam pilkada, peneliti mengambil sejumlah aspek yang memiliki derajat tertinggi atau potensial terjadi di banyak daerah. Selain itu isu-isu lain yang mutakhir juga menjadi kajian tim peneliti. Tentunya penentuan isu kontemporer tersebut tetap berbasiskan data temuan riset yang disajikan dalam laporan ini.

4.1 Aspek Kerawanan Tinggi

Berdasarkan hasil pemetaan IKP Pilkada 2018, ditemukan setidaknya 5 (lima) aspek kerawanan tinggi. Setiap aspek kerawanan terdiri atas satu atau beberapa indikator IKP yang mendapatkan skor kerawanan tinggi (skor 5). Kelima aspek kerawanan tersebut adalah integritas dan profesionalitas penyelenggara, partisipasi, kontestasi, netralitas aparatur sipil negara (ASN), politik uang, dan keamanan.

4.1.1 Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara

Integritas dan profesionalitas penyelenggara menjadi aspek dengan tingkat kerawanan tertinggi karena besaran skor pada tingkat kerawanan di tiga indikator, yaitu netralitas penyelenggara,

penyalahgunaan wewenang penyelenggara, dan kualitas daftar pemilih tetap (DPT). Indikator kualitas DPT merupakan indikator dengan tingkat kerawanan paling tinggi, di mana pada 10 provinsi indikator ini mendapatkan skor 5. Hal ini disebabkan banyaknya laporan yang masuk, baik pada pengawasan atau pemantauan terkait data pemilih (pemutakhiran data pemilih dan pengumuman).

Penyalahgunaan wewenang penyelenggara menjadi indikator dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya. Indikator ini mendapatkan skor tertinggi (5,00) di lima provinsi. Indikator terakhir yang menunjukkan adanya tingkat kerawanan tinggi pada integritas dan profesionalitas penyelenggara adalah netralitas penyelenggara, di mana indikator ini juga mendapatkan skor 5,00 di empat provinsi.

Banyaknya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencerminkan bahwa terdapat persoalan serius dalam tubuh penyelenggara pemilu, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Putusan DKPP yang jamak ditemukan adalah putusan pemberhentian tetap secara tidak hormat dan putusan peringatan keras. Dikeluarkannya putusan DKPP tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dan netralitas penyelenggara, seperti adanya keberpihakan penyelenggara pemilu kepada kandidat tertentu. Modus yang sering terjadi di antaranya penyelenggara pemilu menjanjikan sesuatu kepada calon kepala daerah atau calon legislatif. Selain itu penyelenggara pemilu juga memperlakukan peserta pemilu dengan tidak adil, terlibat dalam tindakan manipulasi suara, adanya kesalahan mengambil keputusan, sampai kelalaian penyelenggara.

4.1.2 Kontestasi

Aspek kerawanan pada kontestasi ini disebabkan tingginya tingkat kerawanan pada tiga indikator. Pertama, dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan. Kedua, pada pilkada sebelumnya penyelenggara pemilu pernah mendiskualifikasi pasangan calon (bakal paslon). Ketiga, identifikasi pasangan calon petahana.

Sebanyak delapan provinsi menilai indikator identifikasi petahana yang mencalonkan diri ini dengan kerawanan tinggi (skor 5,00). Dari seluruh indikator pada IKP 2018, indikator ini menempati tingkat kerawanan tinggi terbanyak kedua setelah kualitas daftar pemilih. Adanya calon petahana membuat kontestasi menjadi rawan. Hal ini berpotensi besar terhadap terjadinya penggunaan fasilitas negara,

seperti penggunaan mobil dinas dan penggunaan gedung pemerintah oleh calon petahana. Selain itu, petahana juga rentan melakukan pelibatan ASN untuk memobilisasi dukungan.

4.1.3 Partisipasi

Partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori rawan yang sangat tinggi (skor 5,00) berdasarkan pada empat indikator berikut.

Pertama, berkaitan dengan pemilih. Pada kondisi ini, pemilih hendak memilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Setidaknya terdapat empat provinsi di mana terdapat sejumlah pemilih yang sudah hendak memilih tetapi tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Mereka terhambat berbagai urusan administratif, baik mengenai kependudukan atau yang berkaitan dengan aturan kepemiluan.

Kedua, banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap pemilih. Indikator ini juga merupakan alat ukur bagi aspek keamanan. Masih adanya tindakan kekerasan terhadap pemilih ini berkontribusi signifikan terhadap kerawanan mengenai partisipasi. Kasus kekerasan fisik menunjukkan tingginya kerawanan pada aspek partisipasi.

Ketiga, berkaitan dengan kondisi geografis. Daerah-daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menghambat pemilih mencapai lokasi TPS.

Keempat, terkait lembaga pemantau pemilu. Pada beberapa daerah ditemukan fakta tidak eksisnya lembaga pemantau pemilu yang melakukan pemantauan, memberikan advokasi, dan melaporkan temuan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu. Fakta ini melengkapi penilaian bahwa dalam aspek partisipasi masih menjadi potensi kerawanan tinggi pada penyelenggaraan Pilkada 2018.

4.1.4 Netralitas Aparatur Sipil Negara

Aspek kerawanan pada netralitas ASN terlihat dari tingginya indikator penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Setidaknya indikator ini tersebar masif pada empat provinsi dengan perolehan kerawanan tinggi (skor 5). Untuk menggambarkan seberapa jauh ketidaknetralan ASN, indikator ini diukur berdasarkan dua hal. Pertama, pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye pasangan calon. Kedua, adanya penggunaan fasilitas negara seperti gedung, mobil dinas, dan fasilitas lainnya dalam kegiatan kampanye pasangan calon.

Netralitas ASN ini kerap kali menjadi rawan karena adanya calon petahana. Tentu saja ketidaknetralan ASN juga bisa terjadi walaupun tidak ada petahana. Namun kecenderungannya akan lebih besar jika ada calon petahana. ASN yang memihak, selain rentan penyalahgunaan fasilitas negara, juga berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, seperti penggunaan APBD untuk kepentingan kampanye kandidat tertentu.

4.1.5 Politik Uang

Politik uang ini merupakan kerawanan yang diduga terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Akan tetapi pelanggaran politik uang hampir selalu lolos dari jaring pengawasan. Praktik bagi-bagi uang maupun barang, seperti sembako sampai pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang.

Menghadapi praktik politik uang ini, pengawas pemilu seringkali kesulitan untuk menjeratnya karena kerap kali kekurangan saksi dan alat bukti. Dalam IKP 2018 ini, pelaporan/peristiwa praktik politik uang dinilai sangat rawan di 7 (tujuh) provinsi. Sebaran pada ketujuh provinsi ini merupakan terbanyak ketiga dibanding indikator kerawanan tinggi lainnya.

4.2 Aspek Lain Potensial Sumber Kerawanan

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, setidaknya ada tiga aspek penting yang dapat dipotret oleh IKP Pilkada 2018 ini, yaitu keamanan, politik identitas (politik SARA), dan penggunaan media sosial. Ketiga aspek tersebut menjadi perbincangan publik dan isu yang mengemuka pada penyelenggaraan Pilkada 2017. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi sumber kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2018.

4.2.1 Keamanan

Penilaian terhadap aspek keamanan mencakup delapan indikator, yaitu kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara, kekerasan fisik terhadap penyelenggara, intimidasi terhadap penyelenggara, substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, konflik antarpeserta pemilu, tim sukses, pendukung, pengaruh pemuka agama/adat, dan kekerasan terhadap pemilih.

a. Aspek Keamanan Pilkada Provinsi 2018

Berdasarkan hasil pemetaan IKP Pilkada 2018 terhadap delapan indikator tersebut, sebanyak dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Papua, termasuk ke dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam aspek keamanan. Sebanyak 12 provinsi termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan sedang dan tiga provinsi termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah.

Kerawanan pada aspek keamanan di Kalimantan Barat dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indikator perusakan fasilitas penyelenggara, substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, dan konflik antarpeserta pemilu/tim sukses/pendukung. Tingginya kerawanan pada tiga indikator tersebut dipicu oleh kasus-kasus perusakan terhadap kantor KPU Kabupaten Kubu Raya oleh massa pendukung salah satu pasangan calon pada Pemilu 2014 dan maraknya kampanye yang mengandung *hoax*, hasutan, dan adu domba.

Sementara kerawanan aspek keamanan di Papua disebabkan oleh tingginya kerawanan pada indikator kekerasan kepada pemilih. Hal ini dipicu oleh terjadinya kekerasan terhadap pemilih di TPS yang menimbulkan korban jiwa pada penyelenggaraan pilkada/pemilu sebelumnya.

b. Aspek Keamanan Pilkada Kabupaten/Kota

Berdasarkan pemetaan hasil IKP Pilkada 2018, untuk aspek keamanan, sebanyak 11 kabupaten/kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kesebelas daerah tersebut adalah Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Murung Raya, Kota Sukabumi, dan Kota Tual. Sementara itu, sebanyak 42 kabupaten/kota masuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Sisanya, 101 kabupaten/kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah.

Kerawanan aspek keamanan pada empat kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Mimika memiliki tendensi yang sama. Kerawanan aspek keamanan disebabkan oleh tingginya tingkat kerawanan pada indikator perusakan terhadap fasilitas penyelenggara, kekerasan fisik terhadap penyelenggara, intimidasi terhadap penyelenggara,

pengaruh pemuka agama/adat, konflik antarpeserta pemilu, tim sukses, pendukung, dan kekerasan terhadap pemilih.

Beberapa kasus yang memicu tingginya kerawanan pada indikator-indikator tersebut di antaranya perusakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat terhadap kantor KPU Kabupaten Mimika dan Kantor Panwaslu Kabupaten Mimika pada pilkada sebelumnya dan Pemilu 2014 serta pelemparan kantor KPU Kabupaten dan Kantor Panwaslu pada pilkada sebelumnya di Kabupaten Puncak.

Sementara untuk Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Murung Raya, Kota Sukabumi, dan Kota Tual; faktor dominan yang menyebabkan kerawanan aspek keamanan adalah tingginya kerawanan pada indikator pengaruh pemuka agama/adat.

Gambar 4.1. Jumlah Daerah Berdasar Tingkat Kerawanan di Aspek Keamanan



4.2.2 Politik Identitas

Penilaian terhadap aspek politik identitas terjadi di level agama, suku atau etnis tertentu, dan klan atau keluarga. Terdapat tiga indikator yang masuk dalam aspek politik identitas, yaitu substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, kekerabatan politik calon, dan pengaruh pemuka agama/adat.

a. Aspek Politik Identitas pada Pilkada Provinsi 2018

Berdasarkan hasil pemetaan IKP Pilkada 2018 terhadap tiga indikator tersebut, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam aspek politik identitas. Sementara lima provinsi termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Hanya empat provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah dalam aspek politik identitas.

Kerawanan aspek politik identitas di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat, didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media. Salah satu yang memicu tingginya kerawanan pada indikator tersebut misalnya di Nusa Tenggara Barat ditemukan adanya hubungan kekerabatan antara calon bupati dan calon gubernur dan menjelang Pilkada 2018 diketahui ada pasangan calon yang memiliki kekerabatan dengan kepala daerah lain.

Sementara untuk Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua ditemukan tiga indikator, yaitu substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, kekerabatan politik calon, dan pengaruh pemuka agama/adat untuk memaksakan pilihan atau aspirasinya kepada publik.

b. Aspek Politik Identitas pada Pilkada Kabupaten/Kota 2018

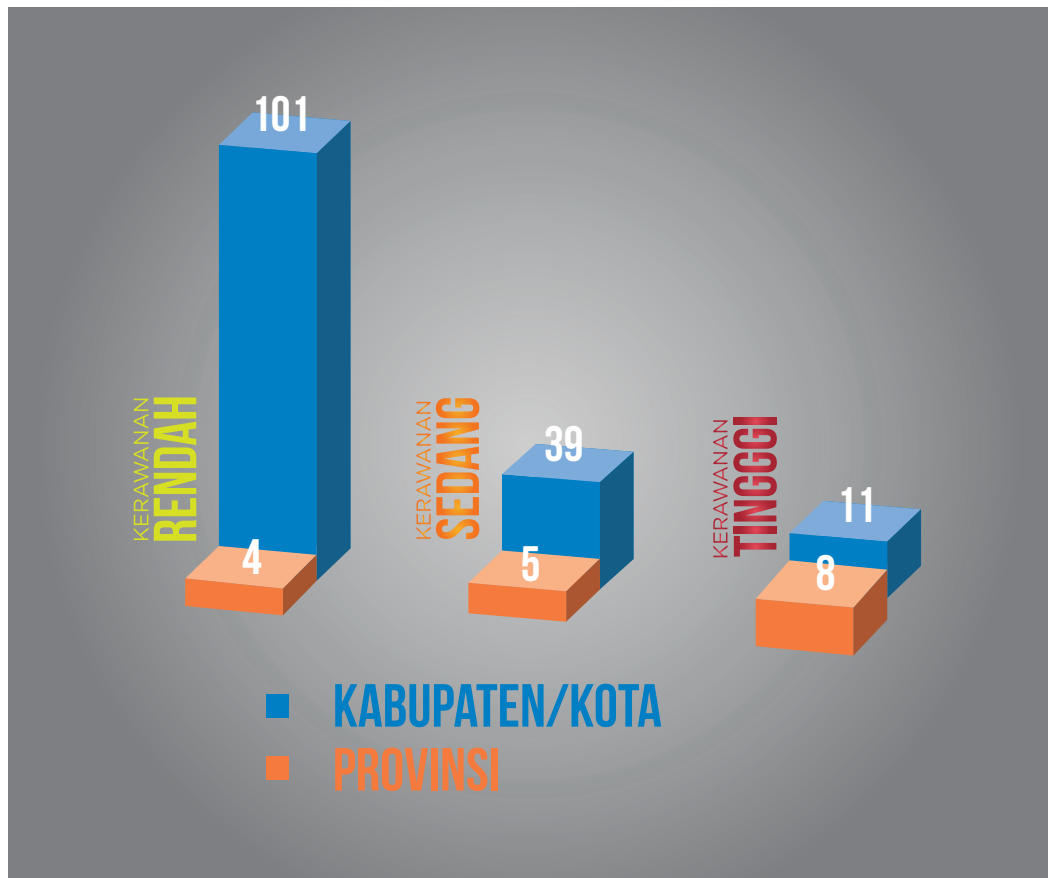
Berdasarkan pemetaan hasil IKP Pilkada 2018, untuk aspek politik identitas, sebanyak 14 kabupaten/kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Daerah-daerahnya adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Alor, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Mimika, Kota Subulussalam, dan Kota Prabumulih. Sementara 39 kabupaten/kota masuk dalam daerah dengan kategori tingkat

kerawanan sedang. Sisanya, 101 kabupaten/kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah.

Kerawanan aspek politik identitas pada tiga kabupaen/kota dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe yang dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media dan kekerabatan politik calon. Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Morowali, dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indikator pengaruh pemuka agama/adat.

Kota Prabumulih, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Alor dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media. Tingginya kerawanan pada indikator kekerabatan politik calon menjadi faktor dominan di Kabupaten Tegal. Sementara untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Mimika, dan Kota Subulussalam dipengaruhi oleh ketiga indikator, baik substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, kekerabatan politik calon, dan pengaruh pemuka agama/adat mengemuka dan berkontribusi terhadap tingginya kerawanan di aspek politik indentitas.

Gambar 4.2 Jumlah Daerah Berdasar Tingkat Kerawanan di Aspek Politik Identitas



4.2.3 Media sosial

a. Aspek Media Sosial pada Pilkada Provinsi 2018

Penilaian terhadap aspek media sosial mencakup dua indikator, yaitu substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media serta kekerabatan politik calon. Pada dasarnya indikator tersebut dapat terjadi disebabkan karena maraknya penggunaan media sosial dalam mengkampanyekan politik identitas pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018, sebanyak 12 provinsi atau sekitar 71 persen dari provinsi yang akan menggelar pilkada, masuk kategori tinggi tingkat penggunaan sosial media dalam menangkap isu-isu terkait pilkada. Provinsi-provinsi tersebut, yakni Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Sisanya sebanyak lima provinsi atau 29 persen, yaitu Provinsi Papua, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan masuk ke dalam kategori sedang. Hal tersebut berarti tidak ada provinsi yang tingkat penggunaan media sosialnya rendah untuk isu-isu terkait pilkada.

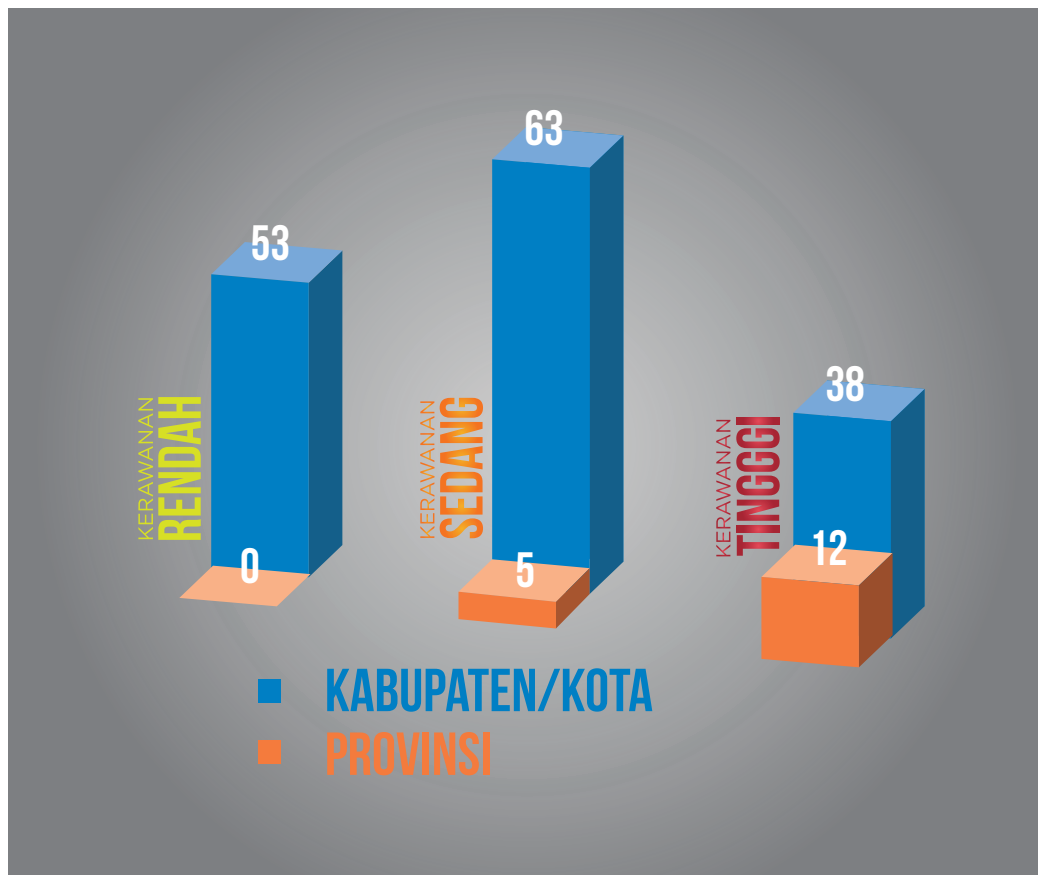
b. Aspek Media Sosial pada Pilkada Kabupaten/Kota 2018

Jika merujuk data temuan di lapangan, tingkat penggunaan media sosial terkait isu-isu seputar pilkada, termasuk di antaranya terkait isu politik identitas hampir marak terjadi di semua daerah dengan derajat yang berbeda. Sebanyak 38 daerah (25 persen) masuk kategori tinggi tingkat penggunaan sosial media untuk isu-isu pilkada di tingkat kabupaten/kota. Sementara sebagian besar memang masuk kategori sedang sebanyak 63 daerah (41 persen). Daerah dengan kategori sedang dan tinggi ini termasuk ke kelompok potensial rawan terjadinya ketegangan di sosial media terkait isu-isu pilkada. Sisanya, hanya sebanyak 53 daerah (34 persen) yang masuk kategori rendah tingkat penggunaan sosial medianya terkait isu-isu pilkada.

Dari 38 daerah yang masuk kedalam kategori kerawanan tinggi pada aspek media sosial, dua kabupaen/kota dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Konawe yang dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media dan kekerabatan politik calon. Tingginya skor di kedua daerah ini dipengaruhi oleh maraknya

isu tentang kesukuan dan calon putra daerah. Selain itu, wilayah kedua kabupaten ini merupakan daerah pertambangan sehingga riskan terjadi mobilisasi pekerja dari luar kedua daerah tersebut jika pemimpin yang terpilih bukanlah putra daerah.

Gambar 4.3 Jumlah Daerah Berdasar Tingkat Kerawanan di Aspek Penggunaan Media Sosial



BAB 5

TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI



5.1 Tindak Lanjut

Menindaklanjuti IKP Pilkada 2018 ini, dimana masih terdapat daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dan daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan kerawanan tinggi, maka Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu hal-hal sebagai berikut:

1. Pencegahan

- a) Mempelajari IKP Pilkada 2018 ini sebagai bahan untuk memahami kondisi dan potensi kerawanan pilkada di wilayah masing-masing.
- b) Menyusun strategi pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa, dengan mempertimbangkan karakter serta kondisi di daerah masing-masing.
- c) Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder pilkada terutama pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kominda, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka mendapatkan data dan Informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu. Terutama terkait dengan antisipasi penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), Politisasi Birokrasi, Politik Identitas, dan Politik Uang

yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu.

- d) Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif.

2. Pengawasan

- a) Bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda dan kegiatan pengawasan Pemilu, serta bersikap responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
- b) Bekerja secara taktis dengan menggerakkan sumber daya struktural organisasi pengawas Pemilu untuk mencapai efektifitas pengawasan.
- c) Memperkuat supervisi kepada jajaran pengawas pemilu dibawahnya untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaran pengawasan Pilkada.
- d) Melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pilkada untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, politisasi birokrasi, dan politik identitas.

3. Penindakan Pelanggaran dan Sengketa

- a) Melaporkan secara aktif dan berkala ke jajaran pengawas lebih tinggi terkait penanganan pelanggaran pilkada.
- b) Memperkuat koordinasi dalam rangka membangun kesepahaman dengan penegak hukum dalam sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu), untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran pidana pilkada.
- c) Memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pilkada dan penyelesaian sengketa.
- d) Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, serta Komisi Aparatur Sipil Negara terkait pengawasan terhadap netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara

- e) Menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada.

5.2 Rekomendasi

IKP Pilkada 2018 merekam masih tingginya potensi kerawanan Pilkada 2018 hampir disemua dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu menyadari bahwa upaya pencegahan membutuhkan partisipasi banyak pihak. Untuk itu Bawaslu merekomendasikan kepada sejumlah pihak beberapa hal berikut ini:

1. Komisi Pemilihan Umum

- a) Mengoptimalkan Supervisi terhadap struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada.
- b) Memastikan Profesionalisme struktur dibawahnya dalam rangka menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang.
- c) Memberikan perhatian seksama pada persoalan daftar pemilih serta menjamin bahwa setiap pemilih yang hendak melakukan pemilihan dapat melaksanakan haknya tersebut.
- d) Memberikan perhatian khusus pada masalah dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan dan masalah pada diskualifikasi calon.
- e) Memastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih, tidak ada pemilih yang terkendala masalah geografis.

2. Peserta Pilkada (Partai Politik dan Pasangan Calon)

- a) Melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, penggunaan politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara;
- b) Menjaga soliditas partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pilkada.

3. Kementerian Dalam Negeri

- a) Melakukan supervisi terhadap kepastian proses penganggaran dan pencairan anggaran Pilkada oleh pemerintah daerah;
- b) Memastikan netralitas ASN dan pemerintah daerah dalam pilkada;
- c) Menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawas Pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah.

4. Pemerintah Daerah

- a) Memberikan jaminan dan percepatan proses penyediaan serta penyaluran anggaran penyelenggaraan pilkada;
- b) Mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye;
- c) Menjaga netralitas ASN dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran;
- d) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu

5. Aparat Keamanan/Penegak Hukum

- a) Memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu dari potensi tindak kekerasan;
- b) Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama kekerasan fisik terhadap pemilih;

6. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan

- a) Mengkoordinasikan serta melakukan supervisi terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;

7. Kementerian Keuangan

- a) Melakukan supervisi terhadap proses penganggaran dan pencairan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

8. Masyarakat Sipil

- a) Masyarakat sipil terlibat aktif dalam mengawal proses Pilkada serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi;
- b) Meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam Pilkada Serentak tahun 2018.

9. Media

- a) Mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya pilkada berjalan jujur, adil, dan demokratis, termasuk tidak menyebarkan isu-isu sensitif yang memicu konflik di masyarakat, terkait agenda pilkada, tidak menyebarkan berita atau informasi bohong (*hoax*) yang memicu konflik di publik, terutama antara pasangan calon;
- b) Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang (*cover both sides*) dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Republik Indonesia. 2014. *IKP Pemilihan Legislatif Tahun 2014*. Jakarta
- Bawaslu Republik Indonesia. 2014. *IKP Pemilihan Presiden Tahun 2014*. Jakarta
- Bawaslu Republik Indonesia. 2015. *IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015*. Jakarta
- Bawaslu Republik Indonesia. 2016. *IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017*. Jakarta
- Bawaslu Republik Indonesia. 2017. *Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017*. Jakarta
- Bormann, Nils Christian dan Matt Golder. *Democratic Electoral Systems Around The World, 1946-2011*, Jurnal *Electoral Studies*, Volume 32, Issue 2, June 2013, Pages 360-369, diakses melalui <http://mattgolder.com/files/research/es3.pdf>
- Dahl, Robert A. 1982 *Dilemmas Of Pluralistic Democracy: Autonomy Vs Control*. New Haven: Yale University Press
- Drumeva, Emilia. 2005. *Electoral Systems, European Standard: Particular Aspects and Case Study*, dalam *Venice Commission, European Standard of Electoral Law in Contemporary Constitutionalism*. Council of Europe Publishing
- Idea, International. 2001. *Standard-Standard Internasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Halmstead, Swedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/rawan>, diakses Pada Tanggal 5 November 2017
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, <http://www.kpu.go.id/>
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, <http://Dkpp.Go.Id/Index.Php?A=Daftarputusan&Id=Putus>
- Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah Konstitusi. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Rekap-HPUD&menu=5>
- Saaty, Thomas L. 1980. *The Analytic Hierarchy Process*. New York: McGraw-Hill

LAMPIRAN

TABEL VARIABEL TIAP DIMENSI IKP PROVINSI

| NO | KAB/KOTA DIMENSI VARIABEL | PENYELENGGARAAN | | | | | KONTESTASI | | | | PARTISIPASI | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|------|------|------|
| | | Integritas Penyelenggara | Profesionalitas Penyelenggara | Kekerasan Terhadap Penyelenggara | Pen-calonan | Kampanye Kontestan | Keker-abatan | Hak Pilih | Karakter-istik Lokal | Penga-wasan/ Kontrol Mas-yarakat | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SUMATERA UTARA | 4.00 | 3.40 | 2.33 | 2.60 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 |
| 2 | RIAU | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| 3 | SUMATERA SELATAN | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 1.80 | 4.33 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
| 4 | LAMPUNG | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 1.80 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 5 | JAWA BARAT | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 6 | JAWA TENGAH | 1.00 | 2.20 | 2.33 | 2.20 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| 7 | JAWA TIMUR | 4.00 | 2.60 | 1.67 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| 8 | BALI | 2.00 | 2.60 | 1.67 | 3.80 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| 9 | NUSA TENGGARA BARAT | 1.00 | 2.20 | 2.33 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| 10 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 3.40 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
| 11 | KALIMANTAN BARAT | 2.00 | 2.60 | 3.67 | 2.60 | 4.33 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 12 | KALIMANTAN TIMUR | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.60 | 3.67 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| 14 | SULAWESI TENGGARA | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.60 | 3.67 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 15 | MALUKU | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 4.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 |
| 16 | MALUKU UTARA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
| 17 | PAPUA | 4.00 | 3.40 | 2.33 | 3.80 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 |

VARIABEL TIAP DIMENSI IKP KAB/KOTA

| NO | KAB/KOTA DIMENSI VARIABEL | PENYELENGGARAAN | | | | | KONTESTASI | | | | | PARTISIPASI | | |
|----|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|--|
| | | Integritas Penyelenggara | Profesionalitas Penyelenggara | Ke-kerasan Terhadap Penyelenggara | Pen-calonan | Kampa-mye | Kontes-tan | Keker-abatan | Hak Pilih | Karak-teristik Lokal | Penga-wasan/ Kontrol Mas-yarakat | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Kota Subulussalam | 2.00 | 2.60 | 1.67 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 3.50 | | | |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | | | |
| 3 | Kab. Pidie Jaya | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 3.50 | | | |
| 4 | Kota Padang Sidempuan | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 2.20 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 2.50 | | | |
| 5 | Kab. Padang Lawas Utara | 3.00 | 2.20 | 2.33 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 6 | Kab. Batu Bara | 3.00 | 2.60 | 1.67 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 | | | |
| 7 | Kab. Padang Lawas | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.50 | | | |
| 8 | Kab. Langkat | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 9 | Kab. Deli Serdang | 4.00 | 2.20 | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | | | |
| 10 | Kab. Tapanuli Utara | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.50 | | | |
| 11 | Kab. Dairi | 1.00 | 2.20 | 2.33 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | | | |
| 12 | Kota Sawahlunto | 1.00 | 3.40 | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | | | |
| 13 | Kota Padang Panjang | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | | | |
| 14 | Kota Pariaman | 1.00 | 2.60 | 2.33 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 3.67 | 1.00 | 2.50 | | | |
| 15 | Kota Padang | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 4.00 | | | |
| 16 | Kab. Indragiri Hilir | 1.00 | 2.60 | 1.67 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 17 | Kota Jambi | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 4.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18 | Kab. Merangin | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 4.00 |
| 19 | Kab. Kerinci | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 4.50 |
| 20 | Kota Lubuk Linggau | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 4.00 |
| 21 | Kota Pagar Alam | 1.00 | 1.40 | 3.00 | 2.60 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| 22 | Kota Prabumulih | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 3.67 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 4.00 |
| 23 | Kota Palembang | 2.00 | 1.80 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 3.50 |
| 24 | Kab. Muara Enim | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 1.40 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 |
| 25 | Kab. Empat Lawang | 3.00 | 2.60 | 1.67 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 1.50 |
| 26 | Kab. Banyuasin | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 1.80 | 4.33 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| 27 | Kab. Lahat | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 3.00 |
| 28 | Kab. Ogan Komering Ilir | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 3.00 |
| 29 | Kota Bengkulu | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | Kab. Tanggamus | 3.00 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 |
| 31 | Kab. Lampung Utara | 2.00 | 1.40 | 1.67 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 |
| 32 | Kota Pangkal Pinang | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 3.80 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 33 | Kab. Bangka | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.50 |
| 34 | Kab. Belitung | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.50 |
| 35 | Kota Tanjung Pinang | 2.00 | 2.20 | 1.67 | 1.80 | 4.33 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 36 | Kota Bekasi | 2.00 | 2.20 | 1.67 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| 37 | Kota Cirebon | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| 38 | Kota Sukabumi | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 1.40 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.50 |
| 39 | Kota Bandung | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 4.00 |
| 40 | Kota Banjar | 3.00 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 41 | Kota Bogor | 1.00 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 3.00 |
| 42 | Kab. Purwakarta | 3.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 43 | Kab. Bandung Barat | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 44 | Kab. Sumedang | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 45 | Kab. Kuningan | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 46 | Kab. Majalengka | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 47 | Kab. Subang | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 48 | Kab. Bogor | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | | |
| 49 | Kab. Garut | 1.00 | 2.20 | 3.00 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | | |
| 50 | Kab. Cirebon | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | |
| 51 | Kab. Ciamis | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 52 | Kota Tegal | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.40 | 1.67 | 1.00 | 5.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | | |
| 53 | Kab. Banyumas | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 2.20 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | |
| 54 | Kab. Temanggung | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | | |
| 55 | Kab. Kudus | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | | |
| 56 | Kab. Karanganyar | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 3.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 57 | Kab. Tegal | 1.00 | 2.60 | 1.67 | 1.40 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | | |
| 58 | Kab. Magelang | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.80 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 59 | Kota Malang | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | | |
| 60 | Kota Mojokerto | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | |
| 61 | Kota Probolinggo | 1.00 | 1.40 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | |
| 62 | Kota Kediri | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 2.20 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 63 | Kota Madiun | 2.00 | 1.80 | 2.33 | 2.60 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | | |
| 64 | Kab. Probolinggo | 2.00 | 1.40 | 1.67 | 2.60 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | | |
| 65 | Kab. Sampang | 3.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | |
| 66 | Kab. Bangkalan | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | | |
| 67 | Kab. Bojonegoro | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | | |
| 68 | Kab. Nganjuk | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 69 | Kab. Pamekasan | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | Kab. Tulung Agung | 1.00 | 2.60 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 2.00 |
| 71 | Kab. Pasuruan | 2.00 | 2.60 | 2.33 | 2.20 | 1.67 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 72 | Kab. Magetan | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |
| 73 | Kab. Madiun | 3.00 | 1.80 | 1.67 | 2.20 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| 74 | Kab. Lumajang | 2.00 | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 2.00 |
| 75 | Kab. Bondowoso | 2.00 | 2.20 | 2.33 | 1.40 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 3.00 |
| 76 | Kab. Jombang | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 2.20 | 4.33 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| 77 | Kota Serang | 2.00 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 78 | Kota Tangerang | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 2.50 |
| 79 | Kab. Tangerang | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 2.20 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | 2.50 |
| 80 | Kab. Lebak | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 4.33 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 81 | Kab. Gianyar | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 1.00 | 3.67 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.50 |
| 82 | Kab. Klungkung | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 83 | Kota Bima | 2.00 | 2.60 | 1.67 | 1.40 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 4.50 |
| 84 | Kab. Lombok Timur | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 2.20 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 2.50 |
| 85 | Kab. Lombok Barat | 1.00 | 2.60 | 2.33 | 1.40 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 4.00 | 1.00 |
| 86 | Kab. Sikka | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 87 | Kab. Sumba Tengah | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.40 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
| 88 | Kab. Nagekeo | 2.00 | 3.40 | 2.33 | 3.00 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 5.00 |
| 89 | Kab Rote Ndao | 1.00 | 3.40 | 1.00 | 2.60 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 90 | Kab. Mangarai Timur | 1.00 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 5.00 |
| 91 | Kab. Timor Tengah Selatan | 4.00 | 3.80 | 2.33 | 4.60 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
| 92 | Kab. Alor | 1.00 | 1.40 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 4.00 |
| 93 | Kab. Kupang | 2.00 | 3.40 | 1.00 | 1.40 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 4.00 |
| 94 | Kab. Ende | 2.00 | 1.40 | 3.67 | 1.40 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 95 | Kab. Sumba Barat Daya | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 3.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 3.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 96 | Kota Pontianak | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 2.20 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 3.00 |
| 97 | Kab. Kayong Utara | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 3.80 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |
| 98 | Kab. Sanggau | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.40 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 3.00 |
| 99 | Kab. Kubu Raya | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 1.40 | 4.33 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| 100 | Kab. Mempawah | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| 101 | Kota Palangkaraya | 4.00 | 2.60 | 1.00 | 4.20 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 102 | Kab. Kapuas | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| 103 | Kab. Sukamara | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 104 | Kab. Lamandau | 1.00 | 2.60 | 1.67 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | 1.00 | 3.67 | 1.00 | 3.00 |
| 105 | Kab. Seruyan | 1.00 | 2.20 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
| 106 | Kab. Katingan | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.60 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 107 | Kab. Pulang Pisau | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 3.80 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| 108 | Kab. Murung Raya | 1.00 | 2.60 | 3.67 | 3.80 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 4.00 |
| 109 | Kab. Barito Timur | 3.00 | 3.40 | 1.67 | 3.80 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 110 | Kab. Barito Utara | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 3.50 |
| 111 | Kab. Gunung Mas | 1.00 | 1.40 | 3.00 | 3.80 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 |
| 112 | Kab. Tapin | 3.00 | 1.80 | 1.67 | 2.20 | 3.67 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 |
| 113 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 114 | Kab. Tanah Laut | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 2.00 |
| 115 | Kab. Tabalong | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 3.67 | 1.00 | 5.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 |
| 116 | Kab. Penajam Paser Utara | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 117 | Kota Tarakan | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 2.50 |
| 118 | Kota Kotamobagu | 2.00 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 |
| 119 | Kab. Minahasa | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.80 | 4.33 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.50 |
| 120 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1.00 | 2.60 | 1.00 | 2.60 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 2.50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 121 | Kab. Sitaro | 2.00 | 2.20 | 1.67 | 2.20 | 1.67 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| 122 | Kab. Minahasa Tenggara | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| 123 | Kab. Kep. Talaud | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 3.80 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 124 | Kab. Morowali | 3.00 | 3.40 | 1.67 | 1.40 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| 125 | Kab. Parigi Moutong | 3.00 | 3.40 | 2.33 | 1.40 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 |
| 126 | Kab. Donggala | 5.00 | 2.60 | 2.33 | 3.80 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 2.50 |
| 127 | Kota Palopo | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 2.20 | 1.67 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 |
| 128 | Kota Parepare | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.50 |
| 129 | Kota Makassar | 3.00 | 1.80 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 130 | Kab. Bone | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |
| 131 | Kab. Sinjai | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |
| 132 | Kab. Bantaeng | 1.00 | 1.80 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| 133 | Kab. Enrekang | 1.00 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 3.00 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 134 | Kab. Sidenreng Rappang | 3.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.50 |
| 135 | Kab. Jeneponto | 2.00 | 2.20 | 1.67 | 2.60 | 1.67 | 2.60 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| 136 | Kab. Wajo | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 |
| 137 | Kab. Luwu | 2.00 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 1.00 |
| 138 | Kab. Pinrang | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.50 |
| 139 | Kota Bau-bau | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 2.33 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 3.00 |
| 140 | Kab. Konawe | 3.00 | 2.60 | 2.33 | 3.40 | 2.33 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 141 | Kab. Kolaka | 1.00 | 2.60 | 2.33 | 1.80 | 2.33 | 3.67 | 2.00 | 3.67 | 2.00 | 5.00 | 1.67 | 3.00 | 2.50 |
| 142 | Kota Gorontalo | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.67 | 2.00 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 2.50 |
| 143 | Kab. Gorontalo Utara | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.40 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| 144 | Kab. Mamasa | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 145 | Kab. Polewali Mandar | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 |
| 146 | Kota Tual | 2.00 | 1.80 | 3.00 | 1.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 147 | Kab. Maluku Tenggara | 2.00 | 3.40 | 3.00 | 1.40 | 4.33 | 4.00 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 |
| 148 | Kab. Mamberamo Tengah | 3.00 | 4.20 | 2.33 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.33 | 4.00 | 3.00 |
| 149 | Kab. Paniai | 4.00 | 4.20 | 4.33 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.67 | 4.00 | 4.00 |
| 150 | Kab. Puncak | 2.00 | 3.40 | 3.67 | 2.20 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 1.67 | 5.00 | 4.00 |
| 151 | Kab. Deiyai | 2.00 | 3.40 | 2.33 | 3.00 | 2.33 | 5.00 | 1.00 | 1.67 | 5.00 | 2.00 |
| 152 | Kab. Jayawijaya | 3.00 | 3.80 | 4.33 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 4.00 | 4.00 |
| 153 | Kab. Biak Numfor | 2.00 | 3.00 | 1.67 | 1.80 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 3.00 |
| 154 | Kab. Mimika | 5.00 | 4.20 | 4.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 3.50 |

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA:

Kami meminta bantuan pada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan, mencari, dan mengisi data dari daftar item pertanyaan yang berada dalam tabel di bawah ini untuk keperluan penyusunan index kerawanan pemilu. Pengisian data dilakukan hingga tanggal 8 Oktober 2017.

Keterangan Pengisian:

1. Untuk daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kuesioner ini diisi oleh Bawaslu Provinsi.
2. Untuk daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kuesioner ini diisi oleh Panwas Kab/Kota
3. Pertanyaan tertutup diisi dengan tanda (x), sedangkan pertanyaan terbuka diisi dengan uraian deskriptif.
4. Jawaban setiap pertanyaan didasarkan pada data dan kondisi di lapangan.

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------------|--|---|--------------|-------------------|------------------------------|--|
| 1 | Adakah putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara melanggar kode etik tentang netralitas terkait asas : - mandiri, jujur, adil, proporsionalitas | <table border="1"> <tr><td>a. Tidak Ada</td></tr> <tr><td>b. Ada, 1 Putusan</td></tr> <tr><td>c. Ada, lebih dari 1 putusan</td></tr> </table> | a. Tidak Ada | b. Ada, 1 Putusan | c. Ada, lebih dari 1 putusan | | <table border="1"> <tr><td>a. Tidak Ada</td></tr> <tr><td>b. Ada, 1 Putusan</td></tr> <tr><td>c. Ada, lebih dari 1 putusan</td></tr> </table> | a. Tidak Ada | b. Ada, 1 Putusan | c. Ada, lebih dari 1 putusan | | <table border="1"> <tr><td>a. Tidak Ada</td></tr> <tr><td>b. Ada, 1 Putusan</td></tr> <tr><td>c. Ada, lebih dari 1 putusan</td></tr> </table> | a. Tidak Ada | b. Ada, 1 Putusan | c. Ada, lebih dari 1 putusan | |
| a. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Ada, 1 Putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Ada, lebih dari 1 putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Ada, 1 Putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Ada, lebih dari 1 putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Ada, 1 Putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Ada, lebih dari 1 putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adakah Kasus hukum yang pernah dilakukan oleh penyelenggara (seperti nar-koba, pidana, korupsi, dsb) | <table border="1"> <tr><td>a. Tidak Ada</td></tr> <tr><td>b. Ada, 1 Putusan</td></tr> <tr><td>c. Ada, lebih dari 1 putusan</td></tr> </table> | a. Tidak Ada | b. Ada, 1 Putusan | c. Ada, lebih dari 1 putusan | | <table border="1"> <tr><td>a. Tidak Ada</td></tr> <tr><td>b. Ada, 1 Putusan</td></tr> <tr><td>c. Ada, lebih dari 1 putusan</td></tr> </table> | a. Tidak Ada | b. Ada, 1 Putusan | c. Ada, lebih dari 1 putusan | | <table border="1"> <tr><td>a. Tidak Ada</td></tr> <tr><td>b. Ada, 1 Putusan</td></tr> <tr><td>c. Ada, lebih dari 1 putusan</td></tr> </table> | a. Tidak Ada | b. Ada, 1 Putusan | c. Ada, lebih dari 1 putusan | |
| a. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Ada, 1 Putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Ada, lebih dari 1 putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Ada, 1 Putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Ada, lebih dari 1 putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Ada, 1 Putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Ada, lebih dari 1 putusan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|--|------------|---|------------|
| 3 | Adakah kebijakan penyelenggara pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum? | a. 0-1 Perubahan b. 2 Perubahan c. lebih dari 2 perubahan | | a. 0-1 Perubahan b. 2 Perubahan c. lebih dari 2 perubahan | | a. 0-1 Perubahan b. 2 Perubahan c. lebih dari 2 perubahan | |
| 4 | Adakah putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara melanggar kode etik terkait profesionalitas | a. Tidak Ada b. Ada, 1 Putusan c. Ada, lebih dari 1 putusan | | a. Tidak Ada b. Ada, 1 Putusan c. Ada, lebih dari 1 putusan | | a. Tidak Ada b. Ada, 1 Putusan c. Ada, lebih dari 1 putusan | |
| 5 | Adakah upaya dari pemda untuk menghambat proses pencairan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu (kepada KPU/Bawaslu) | jelaskan: | | jelaskan: | | jelaskan: | |
| 6 | Adakah laporan di pengawasan atau pemantauan terkait data pemilihan (pemukiran data pemilihan, pengumuman) | a. Tidak Ada b. Ada, 1 Laporan c. Ada, lebih dari 1 Laporan | | a. Tidak Ada b. Ada, 1 Laporan c. Ada, lebih dari 1 Laporan | | a. Tidak Ada b. Ada, 1 Laporan c. Ada, lebih dari 1 Laporan | |
| 7 | Adakah penyediaan akses di TPS bagi pemilihan berkebutuhan khusus | a. ada akses di semua TPS b. beberapa TPS tidak ada c. semua tidak ada | | a. ada akses di semua TPS b. beberapa TPS tidak ada c. semua tidak ada | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|--|------------|--|------------|
| 8 | Pernah atau tidak pernah terjadi perusahaan terhadap fasilitas penyelenggara baik KPU maupun bawaslu (gedung, mobil dinas, sarana kerja, dsb) | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | |
| 9 | Pernah atau tidak pernah terjadi kekerasan fisik terhadap penyelenggara baik KPU maupun bawaslu | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | |
| 10 | Pernah atau tidak pernah terjadi intimidasi terhadap penyelenggara baik KPU maupun bawaslu | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | |
| 11 | Adakah dukungan ganda (KTP) dalam proses calonan perseorangan? | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak ada b. ada namun tidak diskualifikasi c. ada dan paslon didiskualifikasi | | | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| 12 | Adakah dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan? | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak ada b. ada namun tidak diskualifikasi c. ada dan paslon didiskualifikasi | | | | | |
| 13 | Apakah pada pilkada sebelumnya KPU pernah menyatakan bakal pasangan calon (bakal paslon) tertentu tidak memenuhi syarat sebagai paslon kepal daerah? | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak ada b. ada namun tidak diskualifikasi c. ada dan paslon didiskualifikasi | | | | | |
| 14 | Adakah bakal calon dari petahana? | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak ada b. ada petahana dalam satu paket atau hanya salah satunya c. kedua petahana saling bersaing | | | | | |
| 15 | Adakah sengketa pencalonan? | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak ada b. ada sengketa dan tidak naik banding c. ada sengketa, banding, dan melibatkan pendukung | | | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|---|---------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| 16 | Adakah materi kampanye yang mengandung isu SARA, fitnah (hoax), hasutan, adu domba? | jawab: jelaskan: | | jawab: jelaskan: | | jawab: jelaskan: | |
| 17 | Adakah praktik politik uang pada Pemilu sebelumnya? | jawab: jelaskan: | | jawab: jelaskan: | | | |
| 18 | a) Apakah ada pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye pasangan calon? b) Adakah penggunaan fasilitas negara seperti gedung, mobil dinas dan fasilitas lainnya dalam kegiatan kampanye pasangan calon? c) Apakah ada rotasi jabatan yang dilakukan pada 6 bulan sebelum pilkada? | jawab: jelaskan: | | jawab: jelaskan: | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|---|------------|---|------------|
| 19 | Apakah ada kepemimpinan ganda partai politik di daerah anda ? | a. tidak ada | | a. tidak ada | | a. tidak ada | |
| | | b. dulu tidak ada sekarang ada | | b. dulu tidak ada sekarang ada | | b. dulu tidak ada sekarang ada | |
| | | c. dulu ada dan sekarang berpotensi ada | | c. dulu ada dan sekarang berpotensi ada | | c. dulu ada dan sekarang berpotensi ada | |
| 20 | Apakah ada konflik antar peserta pemilu, timses, dan pendukung yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tahapan pilkada? | Jelaskan: | | | | Jelaskan: | |
| | | | | | | | |
| 21 | a). Adakah hubungan kerabatan antara pasangan calon dengan petahana? | Jelaskan: | | | | | |
| | b). Apakah ada hubungan kekerabatan antara pasangan calon dengan kepala daerah lain di satu provinsi yang sama ? | Jelaskan: | | | | | |
| | c). Adakah hubungan kerabatan antara pasangan calon dengan penyelenggara? | Jelaskan: | | | | Jelaskan: | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MEJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|--|------------|-----------------------|------------|
| 22 | Berapa persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih? | a. tidak menggunakan hak pilih s.d 30% | | a. tidak menggunakan hak pilih s.d 30% | | | |
| | | b. tidak menggunakan hak pilih sebesar 31%-59% | | b. tidak menggunakan hak pilih sebesar 31%-59% | | | |
| | | c. tidak menggunakan hak pilih lebih dari 60% | | c. tidak menggunakan hak pilih lebih dari 60% | | | |
| 23 | Berapa jumlah pemilih yang terdapat dalam DPTB? | a. kurang dari 1% | | a. kurang dari 1% | | | |
| | | b. 1-3% | | b. 1-3% | | | |
| | | c. lebih dari 3% | | c. lebih dari 3% | | | |
| 24 | Adakah pemilih yang hendak memilih namun tidak dapat menggunakan hak pilih? | a. tidak | | a. tidak | | | |
| | | b. ada tapi tidak melapor | | b. ada tapi tidak melapor | | | |
| | | c. ada dan melapor | | c. ada dan melapor | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MEJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|---|------------|-----------------------|------------|
| 25 | Apakah kondisi geografis menghambat pemilihan mencapai TPS? (Menyertakan foto/beta/data topografi wilayah) | Jelaskan: | | Jelaskan: | | Jelaskan: | |
| 26 | Adakah tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh agama/adat dan kelompoknya terhadap pemilihan? | Jelaskan: | | Jelaskan: | | Jelaskan: | |
| 27 | Adakah lembaga pemantau pemilu, CSO, NGO dan ormas yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu? | <ul style="list-style-type: none"> a. ada pemantau dan melakukan advokasi b. ada tapi tidak melakukan advokasi c. tidak ada | | <ul style="list-style-type: none"> a. ada pemantau dan melakukan advokasi b. ada tapi tidak melakukan advokasi c. tidak ada | | | |
| 28 | Berapa persentase jumlah pemilih difabel yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya? | <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan hak pilih lebih dari 60% b. menggunakan hak pilih 31-59% c. menggunakan hak pilih s.d. 30% | | <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan hak pilih lebih dari 60% b. menggunakan hak pilih 31-59% c. menggunakan hak pilih s.d. 30% | | | |

| No | PERTANYAAN | PILKADA SEBELUMNYA | KETERANGAN | PILLEG DAN PILPRES 2014 | KETERANGAN | MENJELANG PILKADA 2018 | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|---|------------|------------------------|------------|
| 29 | Adakah laporan pelanggaran dari pemantau yang dilaporkan kepada pengawas pemilu? | <ul style="list-style-type: none"> a. ada dan melapor secara resmi (form A1) b. ada tapi tidak melapor secara resmi c. tidak ada | | <ul style="list-style-type: none"> a. ada dan melapor secara resmi (form A1) b. ada tapi tidak melapor secara resmi c. tidak ada | | | |
| 30 | Berapakah jumlah kejadian kasus kekerasan kepada pemilih yang terjadi di daerah anda dalam penyelenggaraan Pemilu? | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | <ul style="list-style-type: none"> a. tidak pernah b. 1-3 kali kejadian c. lebih dari 3 kali kejadian | | | |

CATATAN

A series of 24 horizontal dotted lines for writing notes.